

SULAWESI UTARA

DALAM PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA

Maria Heny Pratiknjo

**SULAWESI UTARA
DALAM PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA**

Maria Heny Pratiknjo

KEPE
press

Sulawesi Utara dalam Perspektif Sosial Budaya

© Penerbit Kepel Press

Penulis :

Maria Heny Pratiknjo

Desian Sampul:

Arief Budhi Setiawan

Desain Isi:

Tim Kreatif Kepel Press

Cetakan Pertama Desember 2016

Diterbitkan oleh **Penerbit Kepel Press**

Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan Ringroad Utara, Yogyakarta

Telp: (0274) 884500; Hp: 081 227 10912

email: amara_books@yahoo.com

Anggota IKAPI

ISBN : 978-602-356-124-7

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku, tanpa izin tertulis dari penulis
dan penerbit.

Percetakan Amara Books

Isi diluar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Tiap tahun, di kalangan Universitas Sam Ratulangi, ada semacam kelesuan soal tersedianya bahan bacaan dalam bidang ilmu-ilmu sosial, terutama yang disediakan oleh dosen di universitas ini. Hal ini dapat dikatakan sebagai salah satu faktor utama dalam menyusun buku yang dapat dianggap sebagai sebuah bunga rampai dalam melihat beberapa persoalan sosial-budaya yang terjadi di Sulawesi Utara. Mengusung tema yang cukup luas membuat buku dibagi ke dalam bagian-bagian yang melihat tema-tema spesifik

Penerbitan buku ini tentu tak bisa lepas dari bantuan banyak pihak. Karenanya kami ucapkan terima kasih dan syukur terutama kepada Adikodrati Tuhan Yang Maha Kuasa, Rektor Universitas Sam Ratulangi Prof. Dr. Ir. Ellen J. Kumaat, DEA, M. Sc dan Dekan FISIP Unsrat Dr. Novie R. Pioh, MSi, serta Kepala Bagian Tata Usaha FISIP Unsrat Dra. Dientje Silimang yang pantas kami sampaikan terima kasih karena telah mendorong untuk menerbitkan tulisan-tulisan lepas ini menjadi sebuah buku.

Terima kasih selanjutnya ditujukan kepada pihak-pihak yang telah membantu, Mas Bagas dari Penerbit Kepel Press, dan pihak-pihak yang telah larut dalam diskusi dan memberikan masukan untuk pembuatan buku ini.

Akhirnya, kekurangan buku ini, baik dari segi ketelitian substansi, analisa, teknis, data dan sebagainya tentu ditemukan pada berbagai tempat. Penulis mohon pemakluman atas hal-hal tersebut. Namun, justru karena kekurangan tersebutlah, karya ini berfungsi menyediakan ruang agar wacana-wacana mengenai realitas di daerah perbatasan menjadi layak untuk dibicarakan, dikritik, dikaji, dikembangkan serta diambil manfaatnya.

Semoga buku ini dapat menjadi refleksi bagi kita untuk melihat, mengkaji dan berefleksi dari persoalan-persoalan sosial budaya yang terjadi di sekitar kita, yang seringkali tidak kita sadari keberadaannya, tetapi justru menjadi pedoman kita untuk berlaku.

Manado, September 2016

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAGIAN 1: INDUSTRI PARIWISATA SULUT: POTENSI DAN TANTANGAN	1
BAGIAN 2 MEMPERKOKOH IDENTITAS KEINDONESIAAN MELALUI KETAHANAN BUDAYA MASYARAKAT PERBATASAN DI BIBIR PASIFIK STUDI KASUS PADA KABUPATEN TALAUD	21
BAGIAN 3 MIANGAS: SELAYANG PANDANG PULAU DI BATAS UTARA INDONESIA	41
BAGIAN 4 KISAH BEBERAPA EPISODE: MOBILITAS DAN IDENTITAS WANITA MINAHASA	61
BAGIAN 5 NILAI BUDAYA SUKU BANGSA MINAHASA	81

BAGIAN 6	
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MINAHASA DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM	89
BAGIAN 7	
NILAI BUDAYA BEKERJA DALAM KEHIDUPAN ORANG MANADO	151
BAGIAN 8	
POLITIK UANG SEBAGAI GAYA HIDUP INSTANT DAN RENDAHNYA ETOS KERJA	173
BIODATA PENULIS	185

BAGIAN 1:

INDUSTRI PARIWISATA SULUT: POTENSI DAN TANTANGAN

PENDAHULUAN

Undang-undang No 10 tahun 2009 tentang pariwisata antara lain menyebutkan pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional. Disebutkan juga bahwasanya kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Adapun Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata (Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 tahun 2009). Sedangkan Elemen dalam Industri Pariwisata

sebagai berikut: (1) Sumber Daya Pariwisata; (2) Sumber Daya Alam; (3) Sumber Daya Manusia; (4) Sumber daya ciptaan manusia; (5) Fasilitas Hiburan dan Olahraga; (6) Fasilitas rekreasi dan kebudayaan; (7) Fasilitas olahraga; (8) Prasarana umum dan Pariwisata; (9) Alat komunikasi dan perjalanan; (10) Instalasi sosial; (11) Instalasi dasar; (12) Telekomunikasi; (13) Pelayanan Penerimaan Pariwisata; (14) Agen dan biro perjalanan; (15) Kantor promosi dan kantor perwakilan; (16) Pelayanan informasi pengunjung; (17) Penyewaan kendaraan; (18) Pramuwisata dan petugas interpretasi; (19) Fasilitas Penerimaan; (20) Hotel, wisma tamu, desa dan kota; (21) Kondominium; (22) Tempat permukiman lainnya; (23) Permukiman untuk kebutuhan perorangan; (24) Instalasi untuk pelayanan makan dan minum.

Saat ini, sektor pariwisata Indonesia berkontribusi untuk kira-kira 4% dari total perekonomian dan diperkirakan pada tahun 2019, akan meningkat dua kali lipat menjadi 8% dari PDB. Untuk mengantisipasi prediksi ambisius tersebut maka pemerintah sejak awal tahun 2016 telah mencanangkan bahwasanya dalam kurun waktu 4 tahun kedepan, jumlah kunjungan wisatawan harus 20 juta.

Dalam rangka mencapai target ini, Pemerintah akan berfokus pada perbaikan infrastruktur Indonesia (termasuk infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi), akses, kesehatan dan kebersihan dan juga meningkatkan kampanye promosi online (marketing) di luar negeri. Pemerintah juga merevisi kebijakan akses visa gratis di 2015 sehingga mempengaruhi kunjungan wisatawan asing (untuk penjelasan lebih lanjut, lihat tabel di bawah) untuk menarik lebih banyak turis asing. Di mana kunjungan wisatawan asing dapat dilihat pada tabel berikut:

Kunjungan Wisatawan Asing di Indonesia, 2013-2015:

Bulan	Tourist Arrival 2013	Tourist Arrival 2014	Tourist Arrivals 2015	Tourist Arrivals 2016
Januari	614,328	753,079	723,039	740,570
Februari	678,415	702,666	786,653	
Maret	725,316	765,607	789,596	
April	646,117	726,332	749,882	
Mei	700,708	752,363	793,499	
Juni	789,594	851,475	815,148	
Juli	717,784	777,210	814,233	
Augustus	771,009	826,821	850,542	
September	770,878	791,296	869,179	
Oktober	719,900	808,767	825,818	
November	807,422	764,461	777,976	
Desember	766,966	915,334	913,828	
Total	8,802,129	9,435,411	9,729,350	

Kunjungan Wisatawan Asing di Indonesia, 2007-2015:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Wisatawan Asing (dalam juta)	5.51	6.23	6.32	7.00	7.65	8.04	8.80	9.44	9.73

Sumber: BPS

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kedatangan turis asing di Indonesia telah bertumbuh secara stabil dari tahun 2007 sampai 2015. Performa yang solid ini didukung oleh pengurangan insiden teroris di Indonesia.

Begitu halnya juga dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang menitikberatkan pada aspek pariwisata sebagai *prime mover* pembangunan daerah, untuk itu berbagai upaya telah dilakukan dan titik puncaknya adalah membuka penerbangan langsung Tiongkok ke Manado. Di samping itu pemerintah provinsi sedang merencanakan dan sedang dalam tahap negosiasi

untuk membuka 11 penerbangan langsung ke Manado antara lain Manado-Davao, Manado-Korea dan daerah tujuan wisata utama dunia lainnya.

Berdasarkan data Badan Pusat statistik tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sampai bulan Juli 2016 berjumlah 1.03 juta kunjungan, dan dalam kasus Sulawesi Utara jumlah ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 20,42 % dibandingkan periode sebelumnya dan adapun pintu utama dengan kenaikan jumlah kunjungan tertinggi adalah melalui Bandara Internasional Sam Ratulangi, yaitu Bandara Sam Ratulangi atau Sulawesi Utara dengan sebesar 267,50 %.

TITIK-TITIK KEDATANGAN WISATAWAN

Kebanyakan orang Indonesia memasuki Indonesia melalui Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali, pulau yang paling populer sebagai tempat berlibur untuk turis asing di Indonesia. Pulau ini adalah tempat tinggal dari sebagian besar masyarakat minoritas Hindu Indonesia dan menawarkan berbagai jenis pariwisata Hindu Bali yang berkaitan dengan seni dan budaya dan juga kehidupan malam yang semarak serta wilayah pedesaan yang cantik.

Titik kedatangan kedua adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, terletak dekat dengan Ibukota Jakarta. Banyak turis memulai liburan mereka dengan tinggal beberapa hari di Jakarta sebelum berkunjung ke wilayah-wilayah lain dari Indonesia. Jakarta juga merupakan pusat ekonomi dari Indonesia dan, walaupun dilarang oleh hukum, banyak pengunjung asing yang menggunakan visa turis (berlaku untuk 30 hari) untuk berpartisipasi dalam pertemuan ataupun even bisnis di Jakarta.

Titik masuk ketiga yang paling banyak digunakan adalah Batam, kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, di seberang

Selat Singapura. Batam telah berkembang cepat menjadi sebuah kota dengan industri yang berkembang sangat cepat dan juga pusat transport. Kota ini adalah bagian dari zona perdagangan bebas dari Segitiga Indonesia-Malaysia-Singapura. Sejak 2006, Batam (bersama-sama dengan Bintan dan Karimun) menjadi bagian dari Zona Ekonomi Khusus yang bekerja sama dengan Singapura, mengimplikasikan bahwa tarif perdagangan dan pajak pertambahan nilai untuk barang-barang yang dikirimkan antara Batam dan Singapura dihapuskan.

Titik Kedatangan Utama Wisatawan Asing di Indonesia:

Lokasi	2013	2014	2015
Ngurah Rai Airport (Bali)		3,241,889	3,731,735
Soekarno-Hatta Airport (Jakarta)	3,923,970		2,240,502
Batam	2,246,437	2,304,275	1,545,818
	1,336,340	1,454,110	

Sumber: BPS

KEBIJAKAN VISA BARU INDONESIA

Di 2015, Pemerintah Indonesia memberikan tambahan akses bebas visa ke Indonesia kepada warga dari 45 negara (Peraturan Presiden No. 69/2015 tentang Bebas Visa Kunjungan) dalam rangka mendongkrak industri pariwisata. Sebelumnya, warga dari negara-negara ini harus memiliki visa sebelum memasuki Indonesia. Ini berarti bahwa saat ini ada total 90 negara yang warganya tidak memerlukan visa untuk datang dan tinggal di Indonesia (untuk periode maksimum 30 hari). Sementara itu, pemerintah juga memperkenalkan peraturan baru tentang kapak-kapak pesiar dan *yacht*. Peraturan baru ini menghapuskan kewajiban *cabotage* untuk kapal-kapal pesiar dan *yacht* internasional, yang berarti

bahwa kapal-kapal pesiar internasional kini bisa menaikkan dan menurunkan penumpang di lima pelabuhan Indonesia: Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Belawan (Medan), Soekarno-Hatta (Makassar) dan and Beroa (Bali). Sebelumnya, hanya kapal-kapal Indonesia yang diizinkan secara legal untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di perairan Indonesia.

Perubahan-perubahan kebijakan ini dilakukan untuk menarik lebih banyak pengunjung asing. Meskipun membuka lebih banyak akses bebas visa ke Indonesia menyebabkan negara ini kehilangan kira-kira 11,3 juta dollar AS per tahun (karena saat ini biaya 35 dollar AS ditetapkan untuk 'visa kedatangan'), tindakan ini diperkirakan akan menarik tambahan 450.000 turis asing per tahun. Mengingat bahwa tiap turis menghabiskan rata-rata antara 1.100 dollar AS sampai 1.200 dollar AS per orang setiap kali mereka berkunjung ke Indonesia, negara ini akan mendapatkan kira-kira 500 juta dollar AS sebagai tambahan pemasukan devisa setiap tahunnya (turis domestik menghabiskan kira-kira Rp 711.000 per perjalanan).

Negara-Negara yang Dibebaskan dari Kewajiban Memiliki Visa Sebelum Memasuki Indonesia

1. Algeria	19. Dominica	37. Kazakhstan	55.	New Zealand
	73. South Africa			
2. Angola	20. Ecuador	38. Kuwait	56. Norway	7 4 .
	South Korea			
3. Argentina	21. Egypt	39. Kyrgyzstan	57.	5 7 .
	Oman	75. Spain		
4. Austria	22. Estonia	40. Laos	58. Panama	7 6 .
	Suriname			
5. Azerbaijan	23. Fiji	41. Latvia	59.	Papua New Guinea
	77. Sweden			
6. Bahrain	24. Finland	42. Lebanon	60. Peru	
78. Switzerland				

bahwa kapal-kapal pesiar internasional kini bisa menaikkan dan menurunkan penumpang di lima pelabuhan Indonesia: Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Belawan (Medan), Soekarno-Hatta (Makassar) dan and Benoa (Bali). Sebelumnya, hanya kapal-kapal Indonesia yang diizinkan secara legal untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di perairan Indonesia.

Perubahan-perubahan kebijakan ini dilakukan untuk menarik lebih banyak pengunjung asing. Meskipun membuka lebih banyak akses bebas visa ke Indonesia menyebabkan negara ini kehilangan kira-kira 11,3 juta dollar AS per tahun (karena saat ini biaya 35 dollar AS ditetapkan untuk 'visa kedatangan'), tindakan ini diperkirakan akan menarik tambahan 450.000 turis asing per tahun. Mengingat bahwa tiap turis menghabiskan rata-rata antara 1.100 dollar AS sampai 1.200 dollar AS per orang setiap kali mereka berkunjung ke Indonesia, negara ini akan mendapatkan kira-kira 500 juta dollar AS sebagai tambahan pemasukan devisa setiap tahunnya (turis domestik menghabiskan kira-kira Rp 711.000 per perjalanan).

Negara-Negara yang Dibebaskan dari Kewajiban Memiliki Visa Sebelum Memasuki Indonesia

1. Algeria	19. Dominica	37. Kazakhstan	55.	New Zealand
2. Angola	20. Ecuador	38. Kuwait	56. Norway	7 4 .
3. Argentina	21. Egypt	39. Kyrgyzstan	57.	South Korea
4. Austria	22. Estonia	40. Laos	58. Panama	7 6 .
5. Azerbaijan	23. Fiji	41. Latvia	59.	Suriname
6. Bahrain	24. Finland	42. Lebanon	60. Peru	New Guinea
7. Sweden				
8. Switzerland				

- | | | | |
|--------------------------|---------------|-------------------|------------------|
| 7. Belarus | 25. France | 43. Liechtenstein | 61. Philippines |
| 79. Taiwan | | | |
| 8. Belgium | 26. Germany | 44. Lithuania | 62. Poland |
| 80. Tanzania | | | |
| 9. Brunei | 27. Ghana | 45. Luxembourg | 63. Portugal |
| 81. Thailand | | | |
| 10. Bulgaria | 28. Greece | 46. Macau | 64. Qatar |
| 82. Timor-Leste | | | |
| 11. Cambodia | 29. Hong Kong | 47. Malaysia | 65. Romania |
| 83. Tunisia | | | |
| 12. Canada | 30. Hungary | 48. Maldives | 66. Russia |
| 84. Turkey | | | |
| 13. Chile | 31. Iceland | 49. Malta | 67. San Marino |
| 85. United Arab Emirates | | | |
| 14. China | 32. India | 50. Mexico | 68. Saudi Arabia |
| 86. United Kingdom | | | |
| 15. Croatia | 33. Ireland | 51. Monaco | 69. Seychelles |
| 87. United States | | | |
| 16. Cyprus | 34. Italy | 52. Morocco | 70. Singapore |
| 88. Vatican City | | | |
| 17. Czech Republic | 35. Japan | 53. Myanmar | 71. Slovakia |
| 89. Venezuela | | | |
| 18. Denmark | 36. Jordan | 54. Netherlands | 72. Slovenia |
| 90. Vietnam | | | |

Melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Indonesia mempromosikan diri sebagai tujuan wisata untuk turis-turis asing dengan kampanye "Wonderful Indonesia". Penting bagi pemerintah untuk berinvestasi dalam kampanye-kampanye promosi sejenis itu untuk menyebarkan citra positif Indonesia karena kebanyakan negara-negara Barat menerima berita-berita headline negatif dari Indonesia (contohnya Islam radikal, bencana

alam seperti tsunami dan letusan gunung berapi), menyebabkan citra negatif yang tidak tepat dari negara ini.

Juga penting bagi pihak-pihak berwenang untuk menciptakan brand yang magnetis mengenai negara ini secara keseluruhan. Walaupun Pulau Bali telah memiliki brand yang kuat dan sangat terkenal di seluruh dunia, Indonesia secara keseluruhan belum memiliki *brand* seperti itu.

KESEMPATAN-KESEMPATAN DALAM INDUSTRI PARIWISATA DI INDONESIA

Dengan bertambahnya jumlah kedatangan turis asing (baik turis maupun pebisnis asing) dikombinasikan dengan pertumbuhan PDB sebesar +5% dan pertumbuhan investasi, ada permintaan yang meningkat untuk hotel dan kondominium (yang menggabungkan ciri-ciri apartemen dan hotel), dan juga tempat-tempat konferensi dan pameran. Apabila target pemerintah menyambut 20 juta turis asing pada 2020 tercapai maka ada kebutuhan besar untuk industri perhotelan negara ini. Terlebih lagi, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang akan dimulai pada akhir tahun 2015, mengimplikasikan hubungan dagang yang lebih intensif di wilayah ASEAN (mengakibatkan semakin besarnya permintaan untuk akomodasi hotel, dll).

Kendati begitu, Bali dan Jakarta telah mendapatkan investasi yang besar di beberapa tahun terakhir (terutama di pasar kelas atas) yang menyebabkan suplai yang berlebihan. Para investor yang ingin mendirikan hotel-hotel di wilayah ini (dan juga hotel-hotel yang sudah ada) perlu memunculkan konsep yang asli dan kreatif untuk menjadi pemimpin pasar.

Pemerintah berencana akan mengeluarkan paket kebijakan bebas visa bagi 30 negara untuk kunjungan singkat/wisata ke Indonesia. Melalui kebijakan ini pemerintah berharap dapat

mendorong banyak wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia. Diharapkan dengan demikian persoalan defisit neraca transaksi yang membuat melemahnya nilai tukar rupiah terbantu untuk diatasi.

Kebijakan ini menjadi salah satu langkah yang penting, tidak hanya untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah saja. Melainkan juga mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang selama ini masih cenderung tumbuh linier dan tertinggal dari banyak negara termasuk negara ASEAN.

Pemerintah Jokowi telah menetapkan pariwisata sebagai sektor prioritas yang mampu mendorong ekonomi. Di dalam RPJMN 2015-2019 pemerintah telah menetapkan target kunjungan wisatawan mancanegara hingga 20 juta orang pada tahun 2019. Walaupun sampai saat ini belum ada roadmap yang jelas terkait strategi pengembangan sektor pariwisata dalam lima tahun ke depan dapat mencapai target tersebut. Center of Reform on Economics (CORE) memberikan beberapa catatan penting untuk dapat meningkatkan kinerja sektor pariwisata dalam lima tahun ke depan.

Pertama, percepatan pertumbuhan sektor pariwisata akan dapat mengatasi defisit neraca jasa, dengan demikian pertumbuhan sektor pariwisata akan didorong lebih cepat lagi, tidak sekedar mengikuti tren pertumbuhan linier seperti yang terjadi selama ini.

Kedua, untuk dapat merespon dinamika dalam bisnis pariwisata secara cepat, efektif dan efisien, pengelolaan pariwisata di Indonesia perlu menggunakan pendekatan bisnis, bukan dengan pendekatan birokrasi, karena sektor pariwisata bukanlah pelayanan dasar publik sebagaimana halnya sektor pendidikan dan kesehatan. Pendekatan secara bisnis ini semestinya diterapkan dengan mendirikan badan pengembangan pariwisata independen yang dikelola secara profesional dan menempatkan pemerintah serta seluruh stakeholder di sektor ini.

Ketiga, kebijakan bebas visa merupakan langkah terobosan yang bagus, namun untuk mendongkrak kinerja sektor pariwisata dan melakukan percepatan pertumbuhan sektor ini secara signifikan tidak bisa hanya dengan mengandalkan satu kebijakan saja. Kebijakan bebas visa juga harus diikuti dengan langkah-langkah lain yang bersifat pro-aktif dan inovatif, melakukan promosi wisata secara gencar, disamping terus memacu pembangunan infrastruktur khususnya yang berdampak terhadap peningkatan daya saing wisata.

Keempat, untuk mendorong surplus jasa perjalanan, selain menjaring sebanyak mungkin wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia, perlu pula mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih memilih berwisata di dalam negeri.

Pemerintahan Jokowi berusaha membuat pariwisata Indonesia menjadi sangat populer di dunia dengan mengambil langkah-langkah berikut:

1. Kucurkan Dana Besar Sokong Pembangunan Pariwisata
Salah satu cara presiden Jokowi untuk membuat pariwisata Indonesia menjadi terpopuler di dunia ini dengan mengucurkan dana besar untuk membangun infrastruktur dan promosi wisata seperti yang diungkapkan langsung oleh Penasihat Kehormatan Menteri Pariwisata, Sapta Nirwandar: "Pak Jokowi memberi sinyal yang baik untuk infrastruktur dan promosi. Sekitar Rp 5,6 triliun. Presiden berpihak ke pariwisata," ujarnya di Gedung Eighty Eight, Kasablanka, Jakarta. Sapta Nirwandar mengatakan jika Jokowi harus bisa mengembangkan dan mempromosikan pariwisata yang ada di Indonesia untuk meraup untung dari fenomena ini yang kurang dari 1,1 triliun wisatawan.

2. Pemberian Bebas Visa. Untuk menjadikan Pariwisata Tanah Air Indonesia menjadi terpopuler di dunia, Jokowi memutuskan kebijakan berupa pemberlakuan bebas visa untuk 92 negara. Rizal Ramli sendiri kembali memberikan izin bebas visa ke 84

negara baru yang diantaranya stralia, Ukraine, Kenya, Montenegro, Uzbekistan, Bangladesh, Kamerun, Sierra Leone, Palestina, Honduras, Pakistan, Mongolia, Uruguay, Latin Amerika, Bosnia Herzegovina, Costa Rica, Israel, Albania, Mozambik, Macedonia, Comoros, El Salvador, Zambia, Madagascar, Moldova, Georgia Namibia, Kiribati, Armenia, Bolivia, Bhutan, Trinidad & Tobago, Guatemala, Mauritania, Paraguay, dan lain-lain. "Kenapa mesti lakukan ini? Karena ternyata bebas visa paling cepat menambah wisatawan, nggak perlu biaya. Semua ada 84 Negara, cuman itu aja yang bisa saya sebut. Banyak banget," kata Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli di kantornya, Jakarta.

3. Pembentukan 10 Otoritas Tujuan Wisata Prioritas. Jokowi juga akan melakukan pembentukan Badan Otoritas kepariwisataan seperti pembentukan otoritas Nusa Dua di Bali, di mana wilayah Nusa Dua yang sebelumnya bukan menjadi obyek wisata khusus, menjadi wilayah MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) berkaliber internasional. Dengan Pembentukan Badan Otoritas Pariwisata ini diharapkan target pendapatan dari sektor pariwisata dapat menjadi 20 juta USD pada tahun 2019. Dalam menjadikan Pariwisata Tanah Air ini menjadi terpopuler di dunia, pemerintah sebelumnya akan melakukan uji coba pertama penerapan Badan Otoritas Pariwisata ini ialah Danau Toba dan diharapkan dapat menjadi contoh untuk 9 destinasi wisata unggulan. Sementara itu, Menteri Pariwisata Arif Yahya mengharapkan dengan penetapan 10 destinasi wisata unggulan Indonesia yakni Danau Toba-Sumut, Tanjung Kelayang-Belitung, Tanjung Lcsung-Banten, Pulau Seribu-DKI, Borubudur-Jateng, Bromo-Jatim, Mandalika-Lombok, Morotai-Maluku utara, Wakatobi Sulawesi tenggara, dan Labuan Bajo Komodo-NTT di mana pada destinasi wisata ini akan dikembangkan infrastruktur dasar, jaringan internet, air, pelabuhan dan marina.

4. Infrastruktur Perhubungan diperkuat. Untuk mengembangkan destinasi wisata agar Pariwisata Indonesia menjadi terpopuler ini dikabarkan Presiden Jokowi mengungkapkan ada tiga hal besar yang harus dilakukan yang diantaranya kapal diperlukan untuk akses antarpulau karena kalau tidak biayanya akan mahal sekali. Contohnya jika untuk mengelilingi Rajaampat saja diperlukan dana yang lumayan besar yaitu sekitar Rp 30 juta. Maka dari itu tempat wisata Raja Ampat dan Pulau Komodo ini akan dikategorikan sebagai tempat wisata untuk high end (kelas menengah atas).

5. Kirim dosen dan mahasiswa Contek Ilmu Spanyol. Agar pariwisata Indonesia menjadi terpopuler di dunia, pemerintah Indonesia akan berniat mengirim dosen atau mahasiswa dari 4 perguruan tinggi pariwisata yang berada di bawah Kementerian Pariwisata ke Spanyol. Seperti STP Bandung, STP Bali, Akademi Pariwisata Medan, dan Akademi Pariwisata Makasar, yang wajib memiliki pengalaman luar negeri. Cara ini dilakukan atas kekaguman Menteri Pariwisata Arief Yahya terhadap capaian negara Spanyol dalam merebut pasar wisman hingga 68 juta turis dalam setahun. Sebuah prestasi yang fantastis dan menjadi referensi utama dalam pengembangan pariwisata bagi negara-negara di dunia.

POTENSI PARIWISATA DI SULAWESI UTARA

Dalam hal pengembangan dunia pariwisata, Provinsi Sulawesi Utara memiliki beberapa kabupaten dan kota yakni Kota Manado, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud. Masing-masing kabupaten kota menunjukkan karakteristik tujuan wisata yang agak berbeda namun bisa saling

melengkapi antara satu dengan yang lain. Antara lain objek wisata bahari, gunung, danau dan lain-lain. Misalnya jika melihat potensi pariwisata yang ada di Manado sebagai ibukota provinsi, yaitu:

- Taman Laut Bunaken, pulau Manado Tua, pulau Siladen yang menawarkan keindahan wisata bawah laut dengan biota laut yang mempunyai spesifikasi khusus.
- Gunung Tumpa kawasan hutan lindung yang merupakan wilayah konservasi kota Manado. Dari puncak gunung kita dapat melihat seluruh pemandangan kota Manado. Objek wisata ini dilengkapi dengan wisata religi yg dinamakan bukit Doa.
- Air Terjun Kima Atas
- Pantai Malalayang tempat rekreasi pemandian tepi pantai
- Museum Negeri dengan berbagai koleksi historis, arkeologi, etnografis dll.
- Museum Perjuangan TNI AD dan Museum Negeri Sulawesi Utara
- Situs peninggalan Sejarah dan Purbakala yakni Goa Jepang, Makam Kanjeng Ratu Kedaton, istri Sultan Hamengku Buwono ke V
- Objek wisata yang berhubungan dengan mitos antara lain: Tugu Dotulolong-Lasut, Watu Pinabetengan, Waruga Toar-Lumimuut dan lain-lain

Keberagaman objek wisata di Sulut, terutama variasi keindahan alamnya menjanjikan suatu potensi yang jika dikelola dengan baik dapat mendorong peningkatan kapasitas ekonomi berbagai sektor, dari industri kapital dengan modal besar seperti maskapai penerbangan, hingga usaha-usaha kecil-menengah. Bahkan ini dapat mendorong pada terbangunnya ketersediaan infrastruktur yang memadai dan tidak hanya digunakan oleh dunia pariwisata, tetapi juga masyarakat secara umum.

Variasi objek wisata di berbagai daerah, baik kabupaten maupun kota ditambah dengan Manado sebagai pusat mobilitas, dapat memberikan banyak dampak yang baik dalam perkembangan ekonomi. Dengan memperhitungkan Manado sebagai pusat mobilitas arus wisatawan, dan titik awal dari jelajah mereka di Sulawesi Utara, dampak ekonomi di kota menjadi lebih nyata karena aktivitas ekonomi (makan, minum, pleasure, dll) banyak dihabiskan di kota ini. Dimana, Manado dapat juga berperan sebagai jembatan untuk mendistribusi wisatawan ke daerah-daerah lain. Bukan hanya itu, bahkan jika lebih jeli dan terprogram dapat dikembangkan sebagai daerah transit dan distribusi utama bagi wisatawan yang akan berkunjung ke daerah-daerah Indonesia Timur Bagian Utara, bahkan mungkin Filipina dan Malayasia bagian Timur.

KONTEKS SOSIAL-BUDAYA DAN HUBUNGANNYA DENGAN PARIWISATA DI SULAWESI UTARA

Dalam konteks Sulawesi Utara, isu sosial-budaya, terutama agama dan etnis merupakan sebuah keuntungan untuk membangun dunia pariwisata karena kondisi kondusif yang selama ini telah terbangun dan telah dikenal luas, baik Indonesia maupun mancanegara. Hal ini nampak pada kehidupan beragama dari berbagai dedominasi baik Islam, Kritten Protestan, Kristen Katolik Advent, para pemeluk agama yang berbeda dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan mengedepankan prinsip-prinsip *rationalitas* dan sikap toleransi antara satu dengan yang lainnya, ketika merebak kerusuhan masa terbuka di beberapa tempat lainnya di Indonesia dengan issue SARA (Suku, Agama, Ras dan Antara Golongan) misalnya kasus Jakarta 1999, Ambon, Poso, bahkan Temanggung dan Banten tahun 2011 mala *rasionalitas* dikedepankan dengan mengusung ajaran kitab suci masing-

masing agama yakni sikap saling menghargai dan cinta kasih. Bahkan semboyan masyarakat Propinsi Sulawesi Utara pada umumnya diterapkan oleh para tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat dan warga sendiri dalam mengedepankan prinsip-prinsip serta menghargai setiap perbedaan dengan semboyan "Torang Samua Basudara Baku-Baku Bae Kong Baku-Baku Sayang".

Dalam hubungannya dengan dunia pariwisata, kondisi ini tentu saja, mendorong sebuah potensi besar dalam lingkungan sosial yang menjamin rasa aman wisatawan yang datang berkunjung. Sekuritas sosial macam ini, jadi modal penting dalam mendorong kedatangan wisatawan, bahkan menjamin Bergeraknya roda ekonomi daerah dan masyarakat yang dirangsang oleh dunia pariwisata.

Pada pihak bersamaan, tidak dapat dipungkiri, warga Manado, sekalipun multi-etnis, juga sangat dipengaruhi budaya dominan Minahasa. Nilai-nilai budaya yang dapat mendukung kondusifitas sosial yang menjamin dan mendorong Bergeraknya dunia pariwisata secara aman antara lain: (1) Falsafah Hidup *Sitou Timou Tumou Tou* yang artinya: manusia hidup memanusiaikan manusia lain yang ditelorkan oleh Dr. Sam Ratulangi; (2) *Torang Samua Basudara* (kita semua bersaudara); (3) Budaya *Mupalus* (kerjasama); (4) Budaya Demokrasi; (5) Budaya Anti Diskriminasi; (6) Budaya Silaturahmi; (7) Nilai Rasionalitas.

Pada pihak yang kontras, ada juga watak-watak kultural yang menjadi konteks perilaku sebagian besar warga Sulut, yang dapat dinilai memperlambat Bergeraknya perkembangan sektor pariwisata. Dimana hal tersebut akan kami uraikan dalam bagian faktor-faktor penghambat, yang tidak hanya merupakan uraian penghambat secara fisik atau material, seperti fasilitas, tetapi juga penghalang-penghalang psikologis.

FAKTOR PENGHAMBAT PERKEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA DAN SULAWESI UTARA?

Dalam *Travel & Tourism Competitiveness Report* dari World Economic Forum, yang “mengukur sejumlah faktor dan kebijakan yang memungkinkan perkembangan berkelanjutan dari sektor travel & wisata, yang pada gilirannya, berkontribusi pada pembangunan dan daya kompetitif negara ini,” Indonesia melompat dari peringkat 70 di tahun 2013 menjadi peringkat 50 di tahun 2015, sebuah kemajuan yang mengagumkan. Lompatan ini disebabkan oleh pertumbuhan cepat dari kedatangan turis asing ke Indonesia, prioritas nasional untuk industri pariwisata dan investasi infrastruktur (contohnya jaringan telepon selular kini mencapai sebagian besar wilayah di negara ini, dan transportasi udara telah meluas). Laporan ini menyatakan bahwa keuntungan daya saing Indonesia adalah harga yang kompetitif, kekayaan sumberdaya alam (biodiversitas), dan adanya sejumlah lokasi warisan budaya.

Kendati begitu, khususnya bidang sumber daya alam, tetap juga ada laporan yang menyatakan bahwa Indonesia tidak memberi cukup penekanan pada keberlanjutan lingkungan hidup, sehingga mengakibatkan penggundulan hutan dan membahayakan spesies-spesies langka, sementara hanya sedikit dari limbah air yang diolah, padahal ini juga untuk kemajuan pariwisata, karena tingginya variasi segmen wisatawan yang justru lebih banyak sebagai penikmat keindahan alam daripada kemewahan fasilitas perkotaan.

Walaupun begitu, untungnya, sebagaimana telah disentil pada bagian-bagian sebelumnya, sekalipun di Indonesia pada umumnya ada kekuatiran-kekuatiran tentang keselamatan dan keamanan, terutama kerugian bisnis karena terorisme, di mana di Sulawesi Utara hal ini tidak terjadi.

Ada pula, pertimbangan kurangnya infrastruktur yang layak di Indonesia adalah masalah yang berkelanjutan, bukan hanya karena hal ini sangat meningkatkan biaya-biaya logistik sehingga membuat iklim investasi kurang menarik namun juga mengurangi kelancaran perjalanan untuk pariwisata. Infrastruktur di Bali luar biasa dan di Jakarta cukup layak (kecuali untuk kemacetan lalu lintas yang sangat besar) namun di luar Bali dan Jakarta kebanyakan infrastruktur di negara ini kurang layak, terutama di wilayah Timur Indonesia karena kurangnya bandara, pelabuhan, jalan, dan hotel. Kurangnya konektivitas di dalam dan antar pulau berarti ada sejumlah besar wilayah di Indonesia dengan potensi pariwisata yang tidak bisa didatangi dengan mudah. Dalam kasus Sulawesi Utara misalnya, gelombang masuknya turis dari negara China, telah memaksa industri pariwisata daerah ini untuk menyewa bus dari luar provinsi bahkan luar Pulau Sulawesi untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dimaksud.

Selain infrastruktur, pendidikan juga menjadi halangan, terutama pendidikan mengenai keramah-tamahan. Meskipun di Pulau Bali dan hotel-hotel mewah di Jakarta kebanyakan penduduk asli yang bekerja di sektor pariwisata cukup fasih berbahasa Inggris (dan bahkan bahasa-bahasa asing lainnya), di wilayah-wilayah yang lebih terpencil, penduduk asli kesulitan untuk berkomunikasi dengan para turis. Oleh karena itu, fokus pada mempelajari Bahasa Inggris akan membantu mengatasi keadaan ini.

Secara spesifik dalam kasus Sulawesi Utara, faktor utama bukan hanya persoalan-persoalan fisik, fasilitas dan infrastruktur semacam ini. Tetapi juga persoalan kultural, serta sikap dan perilaku hidup yang mendukung kesadaran wisata secara kolektif. Misalnya, kesadaran akan kebersihan hidup dalam perilaku buang sampah dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar, keramahan serta kesesuaian sikap dalam menjamu tamu, senyum, pelayanan

prima dan sikap-sikap kolektif semacam ini. Dalam beberapa wawancara dengan wisatawan, terutama wisatawan asing, kondisi ini justru sangat mengganggu, misalnya aroma tidak enak dari drainase dan kondisi kebersihan yang rendah dan tidak teratur, karena wisatawan-wisatawan ini sangat peduli bukan hanya karena soal keindahan, melainkan juga menurut mereka ini berkontribusi pada kondisi lingkungan yang tidak sehat yang mereka kunjungi.

JALAN KELUAR DAN TAHAP-TAHAP PENGEMBANGANNYA

Dapat dipahami, terutama menjadi bagian pemerintah sebagai pemilik regulasi, bahwa merangsang –tidak hanya membangun- ketersediaan infrastruktur merupakan program efek berantai yang tidak hanya menguatkan industri pariwisata semata, tetapi juga menguatkan mobilitas, tingkat ekonomi masyarakat dan pelayanan publik dan jasa pariwisata itu sendiri. Sehingga merangsang ketersediaan infrastruktur, tentu saja berdampak kepada kehidupan warga masyarakat secara umum, dan dunia pariwisata secara khusus.

Menanggapi berbagai persoalan promosi pariwisata, ketersediaan fasilitas dan organisasi kegiatan dan objek pariwisata, ada baiknya untuk membangun sebuah badan khusus –yang bukan hanya sebuah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana lazim- yang bertugas untuk mengembangkan dan merangsang tumbuhnya dunia dan jasa pariwisata, tetapi sekaligus juga menghidupkan atau merangsang ketersediaan sumberdaya manusia dan komunitas sadar wisata, sehingga komunitas warga kota/daerah, dalam hal ini di Sulawesi Utara, daya tarik wisatanya tidak hanya objek wisata alam semata, tetapi keramahan dan kesadaran wisata penduduk lokal. Dimana, hal ini bahkan secara

lebih jauh dapat merangsang berkembangnya usaha-usaha kecil menengah yang terorganisir dalam menunjang pengembangan usaha pariwisata.

Dalam kasus Manado, ibukota provinsi misalnya, usaha yang dilakukan pemerintah kota dengan membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah sudah tepat. Sehingga, ada sebuah instansi yang mengorganisir kegiatan ini secara khusus, terarah dan intensif. Misalnya, tidak hanya dengan menyelenggarakan event yang kontinyu setiap harinya, tetapi juga mendukung dan mendorong terus tumbuhnya komunitas warga kota yang ramah, higienis, bersih lingkungan yang kesemuanya itu berarti sadar wisata. Dengan cara, misalnya merangsang program pelatihan dalam skala besar, yaitu pelatihan bahasa Inggris dan Mandarin yang telah menjadi bahasa internasional kedua serta segmentasi wisatawan asing terbanyak di Manado dan Sulawesi Utara. Termasuk juga pengenalan dan pemahaman objek wisata di Sulut bagi warga lokal untuk kepentingan dunia pariwisata, sehingga ada peluang ekonomi bagi warga lokal untuk menjadi guide.

Pada pihak lain, penting juga melakukan sosialisasi dan pembentukan komunitas-komunitas sadar wisata, misalnya dalam lingkungan sekolah-sekolah. Sehingga adanya komunitas yang "melek" wisatawan, agar masalah-masalah seperti kebersihan lingkungan dan keramah-tamahan bisa segera diuraikan.

Dalam kondisi, rencana-rencana dan program-program semacam inilah dunia pariwisata dapat dieskalasi tingkat keberhasilannya, yang pasti tidak hanya menguntungkan secara ekonomi dan sosial dunia pariwisata itu sendiri melainkan juga menjadi efek berantai dalam pengembangan kehidupan warga kota dan bahkan provinsi di berbagai bidang kehidupan lain.

BAGIAN 2

MEMPERKOKOH IDENTITAS KEINDONESIAAN MELALUI KETAHANAN BUDAYA MASYARAKAT PERBATASAN DI BIBIR PASIFIK STUDI KASUS PADA KABUPATEN TALAUD

PENDAHULUAN

Sebagai daerah perbatasan, wilayah Kepulauan Talaud mengalami nasib yang sama dengan daerah perbatasan lain di Indonesia yakni keterbatasan akses dalam hal transportasi dan komunikasi, masalah kemiskinan. Kemudian daerah ini menjadi lintasan antar bangsa yang membuka peluang bagi kerentanan pengaruh bangsa luar dan lintasan aktivitas ilegal seperti penyeludupan, pelintasan teroris, dan sebagainya.

Kondisi masyarakat yang umumnya nelayan, bertani dengan pendapatan rendah sedangkan biaya hidup tergolong cukup tinggi. Kebutuhan pangan dan sandang kedua kepulauan ini banyak disediakan dari Manado dengan biaya transport yang tinggi. Uang yang beredar di pasaran setempat adalah campuran antara mata uang Philipina (peso) dan Indonesia (rupiah).

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di kabupaten ini cukup berbeda dengan kondisi masyarakat Philipina Selatan yang sedikit lebih baik. Ancaman yang dihadapi oleh masyarakat

daerahperbatasan terpencil ini adalah menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat akibat minimnya infrastruktur sosial ekonomi serta menurunnya rasa cinta tanah air dan bela negara karena kurangnya akses informasi dan komunikasi.

Saat Belanda menguasai Nusantara, George Mc Turnan Kahin, (1950) menjelaskan di awal abad 19, badan usaha Pemerintah Batavia, *Copra Fund* menetapkan harga yang digunakan oleh produsen untuk menjual kopra miliknya pada fund, satu-satunya pembeli sah. Harga itu rata-rata jauh lebih kecil daripada harga yang dapat diperoleh di pasar dunia terdekat di Filipina. Orang-orang Indonesia dan Cina di Makasar dan Manado memberitahunya bahwa harga di pasaran dunia, mereka dapat menjual kopra dengan harga sekitar dua kali lipat dari harga yang dibayar oleh *Copra Fund*. Hal ini membuat banyak orang Indonesia tergoda untuk menyeludupkan kopra ke Davao meskipun ada hukuman penjara yang berat bila sampai tertangkap oleh pejabat Belanda. Pada bulan Maret 1949, harga Kopra diturunkan lagi 10% (kantor penerangan pemerintah Hindia Belanda, A. E. 1087, Batavia 17 Maret 1949).¹

Karenanya perdagangan yang tidak melalui jalur resmi justru sangat menguntungkan, yakni upaya menjual hasil-hasil bumi ke negara tetangga seperti Filipina. Mereka meraup keuntungan yang besar, aktivitas ini terus berjalan, pada saat peristiwa Permesta yang melanda kawasan timur Indonesia dengan berpusat di Manado, pemimpin-pemimpin Permesta mendapatkan biaya operasional gerakan mereka, salah satunya dari hasil penjualan Kopra ke negeri-negara tetangga, memanfaatkan kedekatan geografis yang menguntungkan.

1 Kahin, George McTuman. 1995. *Timbulnya Pergerakan Kebangsaan Indonesia, dalam Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. hlm. 215 -232

Desa Bowongbaru Pulau Karakelang, hampir sebagian besar warga masyarakatnya menjalin hubungan lintas batas karena keluarga mereka banyak yang tinggal di Filipina. Menurut beberapa informan, seperti yang dikemukakan oleh Deny Lalegit (40 th), teknologi pembuatan *perahu penangkap ikan*² saja telah diadopsi dari negara Filipina yakni pamboat, yang banyak dipakai sekarang. Kapal atau perahu pamboat bertenaga mesin Fuso, yakni mesin yang dipakai oleh kendaraan Truk. Kapal ini dapat berlayar selama 4-5 jam sampai ke Filipina. Warga Bowongbaru memiliki kurang lebih 200 perahu pamboat. Dengan demikian, aktivitas perdagangan tradisional orang Talaud dengan Filipina sangat marak di desa ini. Selain itu pamboat sangat efektif digunakan mereka untuk menangkap ikan, yakni ikan pelagis seperti Malalugis, Deho, Tuna.

Aktivitas perdagangan tradisional ini sebenarnya menyebar di desa-desa yang ada di Kepulauan Talaud, sehingga bisa dengan mudahnya menemukan barang-barang antara lain; minuman beralkohol, minuman ringan, peralatan makan dan minum dan lain-lain yang didatangkan dari Filipina dan bisa ditemukan pada keluarga-keluarga di pedesaan dan perkotaan di Kepulauan Talaud.

Jalur perdagangan lintas batas ini telah berlangsung sejak ratusan tahun silam. Banyak barang asal Davao, terutama parfum dan minuman keras yang diperjualbelikan secara bebas di Sangihe Talaud. Sebut saja, di kawasan perdagangan *Board Crossing Area* (BCA) di Marore, barang-barang asal Filipina mendominasi isi toko.

Dengan demikian hubungan dagang tradisional dan hubungan melintas batas antara masyarakat Talaud dengan Filipina telah berlangsung semenjak lama dan merupakan strategi masyarakat

2 Disebut pamboat

kepulauan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dan menjalin hubungan keluarga. Hubungan ini membuat ketergantungan ekonomi sebagian masyarakat Talaud kepada orang Filipina. Fenomena hubungan lintas batas ini menjadi sebuah faktor yang dapat mempengaruhi kondisi integritas bangsa dalam mempertahankan identitas nasional. Dikarenakan pilihan kesejahteraan lebih kuat kepada daya tarik Filipina, ketika perhatian Pemerintah Indonesia dianggap belum memuaskan kesejahteraan masyarakat. Hubungan lintas batas tersebut berdasarkan pengalaman atau cerita beberapa informan dapat mempengaruhi perkembangan perubahan dalam masyarakat.

Terdapat sejumlah permasalahan di bidang perdagangan lintas batas seperti biasa barang selundupan marak di Sangihe, Talaud, dan Manado, akibat kedekatan jarak kepulauan Talaud dengan Filipina, penduduk kedua wilayah antarnegara ini, bisa saling berkunjung. Bahkan, hanya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk kepada petugas di pos perbatasan. Seperti data yang kami peroleh dari beberapa informan Bupati Saranggani adalah keturunan Talaud, ketika melaksanakan syukuran mengundang kerabatnya yang ada di Talaud, maka para kerabat yang nota bene orang Talaud pergi ke Saranggani dengan dua perahu pambuat kurang lebih 200 orang tanpa ada surat izin masuk keluar antar negara (*pasport*).

Fakta-fakta sejarah banyak mengungkapkan tentang mobilitas penduduk yang keluar masuk baik warga Talaud dan juga warga bukan dari luar kepulauan Talaud. Miangas dikisahkan berasal dari Filipina, Kakorotan memiliki cerita Bantek yang datang dari Cina, Damau yang sempat dihuni bangsa Portugis sejak 1534, Ternate. Cerita-cerita ini menunjukkan Kepulauan Talaud tidak bisa dipisahkan dari hubungannya dengan orang di luar kepulauan Talaud, hal ini terkait dengan posisinya yang strategis menghubungkan wilayah nusantara dengan negara-negara luar

bagian utara nusantara seperti Filipina, Cina, Jepang, Amerika dan sebagainya. Dapat diperlihatkan bahwa posisi strategis di bibir Pasifik yang menghubungkan jalur Utara ke Selatan atau dari bangsa-bangsa Utara ke Nusantara, membuat Kepulauan Talaud sebagai daerah yang selalu menjadi tempat strategis bagi para pelintas, penjelajah, pedagang, dari berbagai bangsa.

Bahkan dalam beberapa tulisan sejarah purbakala, persebaran suku bangsa dunia, terutama Ras Austronesia yang meliputi sebagian besar penduduk Indonesia, menyebutkan kawasan Talaud sebagai salah satu pintu gerbang. Dengan demikian perubahan budaya terhadap masyarakat Talaud sangat terbuka dan rentan, yang kelanjutannya bisa mempengaruhi identitas nasional yang melekat pada identitas lokal masyarakat Talaud.

STRATEGI KETAHANAN BUDAYA MASYARAKAT

Kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan cara belajar³

Kajian mengenai ketahanan budaya juga dikatakan oleh Emile Durkheim mengemukakan bahwa solidaritas organik suatu masyarakat dibentuk dan dipelihara oleh keberadaan suatu sistem nilai kebersamaan yang secara historis dibangun melalui tradisi.⁴

Kepatuhan warga masyarakat Talaud kepada adat dan pada pemuka-pemuka adat atau tokoh masyarakat lainnya, masih sangat kuat. Mereka masih meyakini bahwa sebuah pelanggaran adat akan menimbulkan akibat yang akan ditanggung mereka yang bisa mendatangkan malapetaka berupa sakit, kematian, bencana alam, kegagalan dalam penghasilan perekonomian. Lebih

3 Koentjaraningrat, 1986. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru. Hlm. 180

4 Emile Durkheim, 1964. "The Division of Labor in society", hlm. 18-93.

luas sebenarnya masuk dalam peraturan-peraturan larangan yakni dalam konsep EHA⁵.

Perilaku warga masyarakat yang terbuka terhadap pendatang, dapat menerima pendatang dari manapun. Setiap bertemu pendatang, mereka menyapa dengan ramah. Perihal keramah-tamahan warga merupakan modal sosial bagi mereka mengingat tingkat mobilitas penduduk yang cukup tinggi.

Keberadaan lembaga adat (*ratu mbunua* dan *inanggu wanua*, serta *tinmadde ruanga*) yang mengatur pelaksanaan tradisi dalam kampung seperti, pelaksanaan *eha* atau pantang berkala untuk dua hal yaitu *eha* yang diberlakukan pada tanaman kelapa yang dilakukan setiap periode kuartalan atau tiga bulan dan *eha* di lokasi yang disiapkan untuk acara *manammi*⁶ (yaitu menangkap ikan dengan tata cara adat setiap tahun), memberikan sanksi bagi warga yang mabuk, melanggar *eha* dan melakukan perzinahan.

Bahwa *Eha* dan tradisi *Manamime*⁷ sebenarnya sangat memperkuat eksistensi budaya orang Talaud. Di Bulude dan Mangaran tradisi ini masih berlangsung, ini dimungkinkan adanya beberapa lokasi pantai yang sangat cocok untuk dilangsungkannya *Mane'e*⁸, terdapat karang-karang pantai yang luas, sehingga ikan-ikan bisa dikumpulkan dengan mudahnya setelah masa larangan *Eha* telah lewat.

Pada sektor pertanian dikenal adanya adat istiadat yang dilakukan dalam beberapa bentuk upacara mulai dari membuka lahan hingga masa panen. Panen yang baik selalu dihubungkan dengan kemampuan seorang pemimpin adat dalam hal ini pemimpin adat. Sebaliknya apabila terjadi serangan hama, gagal panen dipercayai terjadinya penyimpangan dalam kehidupan keluarga

5 *Eha* adalah larangan

6 Menangkap ikan dengan tatacara adat tiap tahun

7 Tradisi laut masyarakat mengambil ikan Balude/ Kabaruan

8 Tradisi laut masyarakat mengambil ikan Kakorotan.

atau dalam kelompok masyarakat umumnya seperti terjadinya hubungan seksual terutama yang sumbang atau *incest*. Pemimpin tradisional yang baik adalah mereka yang dianggap mampu menghidupi warganya yang biasa dikenal dengan ungkapan “*Ma’anna wuru ma’ a inassa wanua*”⁹ Pelaksanaan dalam setiap upacara adalah para pemimpin adat. Oleh masyarakat setempat, mereka bukan saja dianggap sebagai orang yang mengetahui berbagai pengetahuan dalam soal bercocok tanam seperti pengetahuan tentang waktu-waktu yang dianggap tepat memulai pekerjaan, tetapi juga mereka dipercaya memiliki kemampuan berhubungan dengan penguasa alam yang ada di bumi sebagai suatu kepercayaan lama yang hingga saat ini masih tetap diakui oleh masyarakat.

Dahulu bentuk penyembahan dilakukan dengan menyiapkan berbagai sesajen yang dipersembahkan pada para penguasa alam (dewa-dewa yang dianggap memiliki kesaktian), kini penyembahan dilakukan pada Tuhan Allah Sang Pencipta alam semesta. Para pemimpin adat merangkap pada umumnya diangkat memegang jabatan sebagai pemimpin gereja.

Terdapat beberapa tahap upacara dalam bercocok tanam seperti :

*Malintukku Halele*¹⁰, *Malintukku Wualan*¹¹, *Manimullah Sasuanna*¹², *Mallano Sasuanna*.¹³ *Sawakka (Manawakka)*,¹⁴

9 mampu menghadirkan makanan dan ikan atau lauk pauk pada warga komunitasnya”.

10 (merurunkanparang), merupakan upacara adat yang biasanya dilakukan pada saat persiapan pembukaan lahan, untuk memulai membuka dan menyiapkan lahan. Setelah lahan siap tanam dilanjutkan dengan upacara adat Malintukku Wualan.

11 (merurunkan benih/bibit) yang mengandung makna permohonan kepada Yang Maha Kuasa agar bibit yang ditanam bertumbuh dengan baik.

12 (mengasapi/menyehatkan tanaman), merupakan upacara adat permohonan doa agar tanaman tumbuh dengan subur.

13 memohon doa agar tanaman terhindar dari penyakit

14 upacara ini dilakukan pada saat selesai panen sebagai suatu ucapan syukur kepada Tuhan Penguasa atas perolehan hasil panen.

Setiap menjalankan upacara dilakukan oleh pemimpin adat.

Mengawali pelaksanaan kegiatan para pemimpin adat memberi nasehat-nasehat pada para petani dengan diawali doa bersama permohonan restu memulai pekerjaan (*mangimpalukka*).

Menurunkan padi (*Aimpalukku Malintukku Wualana*), kegiatan ini dilaksanakan setelah lahan/kebun selesai dibersihkan dan siap ditanami. Upacara dilakukan oleh para pemimpin adat seperti pada pelaksanaan awal. Dengan memegang bibit yang hendak ditanam pemimpin adat membawakan doa.

Doa syukur hasil panen (*manawakka*). Pada saat pengambilan hasil panen, diadakan doa syukur bersama yang disebut *manawakka*. *Manawakka* dibawakan oleh pemimpin adat yang mempunyai tujuan menyatakan rasa hormat dan kasih kepada Tuhan atas hasil yang boleh diperoleh, juga karena para pekerja atau petani sudah dipelihara selama bekerja.

Berbagai upacara yang dilaksanakan mulai pada saat membuka lahan sampai pada saat panen, memiliki makna untuk mewujudkan masyarakat agar jauh dari konflik.

Pengembangan kesenian tradisional masih bisa diketemukan diberbagai tempat di Talaud seperti adanya tari Gunde, Bara'a, dan lain sebagainya. Khusus di Pulau Kabaruan terdapat tarian khas pergaulan muda-mudi yakni tarian Garis Dobil. Tari ini sering diadakan pada acara-acara pesta, pisah tahun, peringatan hari-hari besar lainnya. Dalam rangka melestarikan kebudayaan daerah peran pemerintah, pemimpin agama dan tokoh masyarakat sangat diperlukan. Pemerintah sebagai lembaga formal dan tokoh agama sebagai lembaga non formal berkolaborasi dengan dengan strategi sebagai berikut yakni: pemerintah daerah berupaya mengembangkan kesenian daerah dengan mengumpulkan tokoh-tokoh adat yakni ratumbanua dan ratumtampa dengan membuat pertemuan-pertemuan terjadwal untuk membahas masalah yang dihadapi masyarakat. Walaupun pengaruh modernisasi dari negara tetangga masuk kedalam kehidupan masyarakat Talaud,

mempengaruhi sampai kepada bentuk-bentuk budaya Talaud, tetapi nilai budaya orang Talaud masih bisa eksis atau bertahan. Masyarakat masih punya budaya patuh disamping toleran terhadap masuknya unsur-unsur budaya luar.

Eksistensi budaya masyarakat Talaud telah memperkuat jati diri orang Talaud, beberapa unsur budaya dari Talaud yang merupakan identitas orang Talaud sangat ditentukan oleh penguasaan atau pemahaman akan tradisi-tradisi Talaud seperti kesenian tradisional, bahasa, aturan-aturan adat, dan sebagainya. Dipahami dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun telah lama berada di negara luar seperti Pilipina, mereka tetap mengakui keberadaannya sebagai orang Talaud yang merupakan bagian bangsa Indonesia. Merekapun menganku kerabat dan leluhur mereka di Talaud

Lagu-lagu daerah Talaud yang sangat populer pada masyarakat kepulauan Talaud menunjukkan identitas kebudayaan Talaud dan kebangsaan Indonesia sangat mereka cintai. Beberapa lagu daerah Talaud yang populer adalah terdiri lagu-lagu pujian terhadap Daerah Talaud seperti yang disebutkan di atas; Lagu *Su' Bowon' Manu Darua, Eh Apa Lodda Sia, Porodisa Itellare, Lembungu Rrintulu, Tuta Mandasa, Passaran'nu Indonesia, Oh Tal,oda Inariadi, Tahal, oang Tondol, ana*. Lagu-lagu tersebut menggambarkan pujian dan pujaan terhadap tanah kelahiran dan rasa cinta orang Talaud terhadap tanah Talaud. , dimanapun mereka pergi tanah Talaud selalu akan diingat dan tidak terlupakan. Hal ini memberikan satu gambaran bahwasanya pengaruh eksternal tidak mudah menggoyahkan identitasnya sebagai orang Talaud, sehingga dapat diartikan sebagai ketahanan budaya yang harus dipupuk dan dilestarikan. Untuk memperkuat ketahanan budaya atau keindonesiaan.

Jadi kekuatan integrasi Talaud dalam keluarga suku bangsa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terletak pada ketahanan budaya masyarakat Talaud itu sendiri. Beberapa kali

terjadi peristiwa yang dapat menggoyahkan integritasnya akan nasionalisme Indonesia, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap masyarakat luas misalnya pengibaran bendera filipina dan lain-lain.

Identitas sosial warga Talaud merupakan bagian dari identitas nasional. Wargamemandang diri mereka secara kultural adalah bagian dari bangsa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia dan Melayu Indonesia, atau menaikkan bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mereka mencintai suku bangsa Talaud dan bangga sebagai warga negara Indonesia.

Proses asimilasi melalui perkawinan, barter barang, dan perdagangan tradisional, manakala pemenuhan kesejahteraan dari bangsa sendiri tidak memuaskan sebuah kondisi yang mengkawatirkan integrasi nasional orang Talaud tidak terjadi. Justru hal negatif lainnya yang muncul, yakni karena terbukanya kawasan lintas batas dan perdagangan tradisional tersebut hingga dengan mudah terjadi proses niaga antar kedua negara, termasuk aktivitas perdagangan ilegal seperti senjata dan keluar masuk para teroris.

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MEMPERKUAT KETAHANAN BUDAYA

Kepatuhan para pemimpin adat yang ditokohkan dalam masyarakat. Ternyata memiliki kemampuan menggerakkan masyarakat dalam hal berpartisipasi menunjang berbagai program sosial kemasyarakatan. Bahkan sebagaimana wawancara dengan seorang pemimpin adat, mengatakan kemampuan seorang pemimpin adat dalam menggerakkan dan mendorong masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan melebihi kemampuan kepala desa. Hal ini disebabkan karena pemimpin adat senantiasa berada dan turut merasakan segala sesuatu yang dialami oleh warganya. Sedangkan

seorang kepala desa melakukan tugasnya yang dikomando dari atasannya, sehingga kurang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Sebagai pemimpin adat yang memiliki kewenangan penuh dengan memberi komando kepada warganya dalam hal aktivitas bersama menunjang program pemerintah. Seperti halnya kerja bakti bersama, mulai dari membersihkan pekarangan masing-masing, membersihkan selokan-selokan sampai dengan membuat jalan.

Dengan demikian semua warga masyarakat bukan hanya merasakan bantuan pemerintah tetapi juga turut melaksanakan dan mensukseskan program dari pemerintah. Pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama seluruh warga masyarakat pada akhirnya dinikmati secara bersama-sama oleh semua warga masyarakat. Sehingga tercipta satu keharmonisan hidup diantara para warga masyarakat. Hal ini dapat terjadi atas kemampuan dan loyalitas dari pemimpin adat.

Dalam kehidupan sehari-hari pemimpin adat sangat berpengaruh seperti : menjalankan tradisi upacara-upacara dalam berbagai aspek (pertanian, menangkap ikan, perkawinan, kematian, berbagai macam selamat, penjemputan tamu, dan sebagainya). Bahkan pemimpin adat juga berperan dalam upacara-upacara menghalau berbagai bentuk malapetaka yang dipercayai oleh masyarakat mengganggu ketentraman warga.

Selain upacara-upacara, pemimpin adat pun harus memiliki pengetahuan secara tradisional atau kearifan tradisional dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai masyarakat yang memiliki mata pencaharian utama bertani, maka pengetahuan lokal masyarakat tentang cara bertani dan pengetahuan tentang musim-musim yang cocok untuk menanam harus dimiliki oleh pemimpin adat. Dalam hal berladang mereka mengenal dua musim yang disebut *lamba* dan *mattitomma* merupakan waktu yang tepat untuk memulai bertanam.

Pengaturan pola tanam secara melalui pengetahuan tradisional yang didasarkan pada kondisi musim dan ekologi setempat, bukan hanya ditentukan secara individu dalam masyarakat, tetapi ditentukan secara bersama dengan para pemimpin adat. Selain memilih waktu yang tepat sesuai musim juga disesuaikan dengan pengetahuan tentang pasang surutnya air laut.

Para petani melalui pemimpin adat membuat aturan untuk mengatur berbagai hal terkait dengan pola tanam, jenis tanaman yang ditanam, waktu menanam sampai pada teknologi yang diterapkan dalam penanaman. Dengan cara seperti ini, para petani benar-benar melakukan berdasarkan kaidah-kaidah mengikuti alam setempat. Secara umum, tanaman yang ditanam digilir secara bergantian melihat kondisi kesuburan tanah. Dengan demikian ada saatnya ladang pertanian istirahat ditanami dan melangsungkan siklus unsur hara secara alamiah.

Sebuah lembaga adat tidak terlepas dari kepemimpinan seorang pemimpin karena kepemimpinan merupakan suatu proses interaksi antara pemimpin dengan anggota-anggota lain dalam kelompoknya. Dalam struktur sosial seorang pemimpin umumnya menduduki posisi yang menjadi titik penentu (*local point*) pembuat keputusan. Tidak sedikit sistem pemerintahan tradisional yang pernah atau masih bertahan di Indonesia. Umumnya kekuasaan diperoleh oleh pewaris, adanya keyakinan yang dimantapkan oleh kesucian tradisi yang diterima.

Keberadaan pemimpin adat masyarakat perbatasan diwarnai sistem nilai/ajaran agama dan adat setempat. Terpilihnya mereka sebagai pemimpin di masyarakat tidak terlepas dari sejarah, keahlian, pendidikan dan perilaku yang ditunjukkan demi menunjang tatanan kehidupan bermasyarakat di masa lampau dan sampai sekarang.

Bentuk-bentuk budaya tersebut di atas seperti *Eha*, *Manee*, *Manami*, *Manammebukan* saja memberi arti dalam kehidupan

masyarakat kepulauan perbatasan Indonesia-Philipina, sebagai cara menangkap ikan dengan tidak menggunakan alat tangkap modern, namun tradisi masyarakat kepulauan Talaud ini, memberi arti dan pemahaman ke dalam cara sekelompok manusia dalam berkomunikasi. Bentuk komunikasi yang dihasilkan dalam proses budayaini, adalah komunikasi antarpersonal, dalam forum budaya ataupun komunikasi kelompok besar.

PERAN PEMIMPIN FORMAL, PEMIMPIN ADAT DAN PEMIMPIN AGAMA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT TALAUD

Dalam Kehidupan masyarakat Talaud terdapat sekian banyak aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku sampai saat ini. Agar kelestarian dari peraturan-peraturan adat tetap terjaga, maka seluruh komponen warga masyarakat dan para pemimpin baik pemimpin formal dalam hal ini pemerintah serta para aparatnya, maupun pemimpin non formal atau para tokoh adat yang dipercaya harus berperan aktif. Pemimpin adat yang dipercayakan harus mampu menjaga kesinambungan adat istiadat dan memiliki fungsi sebagai pelindung adat-istiadat, melaksanakan control social bagi warga masyarakat yang melanggar aturan-aturan. Dalam fungsinya yang demikian sehingga pemimpin adat tidak dapat dijabat oleh sembarang orang. Pemimpin adat ini harus menjadi teladan, panutan bagi masyarakat, sehingga mereka memiliki peran pada hampir semua bidang kehidupan yang ada di masyarakat.

Aktivitas sosial penduduk di Kepulauan Talaud senantiasa melibatkan berbagai unsur atau elemen dalam masyarakat. Partisipasi yang ditunjukkan dalam aktivitas sosial tersebut ada yang diminta langsung oleh pemimpin adat, tetapi ada pula atas inisiatif warga masyarakat sendiri. Pada saat melakukan pengambilan data di Pulau Kabaruan di Desa Damau, Kecamatan Damau sedang

dilaksanakan Dialog Budaya, Festival Budaya, dan Pameran Budaya yang diselenggarakan oleh Rumah Budaya Napombaru. Peneliti menyaksikan partisipasi seluruh elemen yang ada dalam masyarakat yakni pemimpin formal yakni bapak camat, kepala desa dan para perangkatnya, guru-guru, pemimpin adat dan para tokoh adat lainnya, tokoh-tokoh agama dari berbagai denominasi, anak-anak sekolah serta warga masyarakat yang ada dikecamatan Damau. Keikutsertaan mereka full pada setiap tahapan kegiatan. penulis amati mulai pada saat penyambutan tamu, pembukaan acara, serta seluruh kegiatan selalu terlihat partisipasi para warga masyarakat seperti sudah digambarkan dalam alinea sebelumnya.

Sebagai contoh pada saat penyambutan tamu oleh *ratumbanua* dilaksanakan dengan ibadah diikuti oleh unsur pimpinan kecamatan, pimpinan agama, tokoh masyarakat anak-anak sekolah serta para warga masyarakat. Demikian halnya pada saat pembukaan kegiatan dilakukan dengan ibadah yang dipimpin oleh pendeta dari GERMITA (Gereja Masehi Injili Talaud) diikuti dengan sambutan² mewakili tokoh formal yakni bapak camat, *ratumbanua*, para tokoh agama dilanjutkan dengan upacara adat, doa makan dan makan bersama seluruh dengan warga masyarakat dan undangan. Terlihat masyarakat dari berbagai unsur yang merupakan peserta festival sangat antusias. Selama tiga hari penulis mengamati dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut terlihat keikutsertaan dan perilaku para peserta yang nota bene adalah warga masyarakat di Kecamatan Damau begitu bersemangat dan warga lainnya menikmati hiburan berupa atraksi tarian dan lagu-lagu. Bahkan kegiatan festival Budaya ini ditutup dengan KKR (Kebaktian Kebangunan Rohani) yang diselenggarakan oleh Gereja Tiberias di Damau, dengan mendatangkan penginjil dari Jakarta.

Relasi yang terbangun antara Pemimpin Adat, Pemerintah dan Gereja, menyiratkan hubungan yang saling mengisi, meskipun masing-masing memiliki pemahaman yang terkadang berbeda.

Perbedaan masing-masing ditutupi dengan kerjasama antar institusi tersebut. Misalnya dalam acara adat perkawinan, gereja mengambil bagian untuk melakukan pemberkatan, *ratumbanua* melakukan pelacakan silsilah apakah boleh dinikahkan atau tidak terutama bukan hubungan sedarah atau hubungan keluarga dekat dalam tiga tingkatan keturunan. *Ratumbanua* juga menentukan waktu perkawinan yang tepat dan memberi nasehat-nasehat. Pemerintah mengambil bagian dalam pengesahan dalam bentuk akta perkawinan.

Pemimpin gereja berupaya untuk mengakomodasi simbol-simbol adat dalam pelayanan gereja, seperti penataan gedung gereja yang menggunakan ornamen-ornamen adat Talaud, kalimat-kalimat bahasa Talaud digunakan pada pintu masuk gedung gereja.

Beberapa lagu gereja telah dibuatkan bahasa daerah Talaudnya, dan sering dinyanyikan dalam peribadatan-peribadatan. Lagu gereja berbahasa Talaud ini, bukan hanya dilagukan pada peribadatan gereja, juga pada acara-acara kedukaan, ibadah Kolom, ibadah hari ulang tahun, dan sebaagainya. Lagu gereja berbahasa daerah Talaud menjadi sangat populer.

KESIMPULAN

Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan kabupaten terluar dari Negara Indonesia. Terletak di kawasan perbatasan antara Negara Indonesia dan negara luar yakni Filipina, Malaysia, dan Amerika Serikat. Berdasarkan fakta-fakta historis sejak dahulu kala Talaud terbuka bagi kehadiran bangsa-bangsa lain dan menjadi lintasan perdagangan serta jalur lintasan antar bangsa-bangsa bagian utara menuju bagian selatan. Keterbukaan ini membawa pengaruh yang besar terhadap eksistensi masyarakat dan kebudayaan. Berbagai peristiwa bahkan tindakan kriminal

yang menyalahi aturan negara, aturan agama dan aturan adat rentan terjadi. Hal tersebut dapat kita lihat dari berbagai aspek antara lain ideologi, politik, sosial budaya dan ekonomi. Hubungan yang paling intens terutama dengan masyarakat Filipina berupa hubungan dagang tradisional, kunjungan kekeluargaan, dan yang paling buruk menjadi perlintasan para vitas tersebut agak sukar teroris, perdagangan senjata ilegal, serta penyelundupan narkoba. Aktivitas tersebut agak sukar di diawasi mengingat Kepulauan Talaud terdiri atas gugusan pulau-pulau yang relatif dapat dengan mudah didarati dilain pihak sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan sangat minim dan tidak memadai, sementara sebagian warga membiarkan aktivitas ilegal tersebut.

Kondisi rentan masyarakat Talaud terhadap pengaruh asing, sangat memungkinkan terjadi bedasarkan posisi kawasan Talaud sebagai lintasan antar bangsa tersebut, di samping perkembangan modernisasi masyarakat. Pengaruh tersebut dapat melunturkan identitas nasional masyarakat Talaud terhadap Indonesia, manakala terjadi ketergantungan perekonomian kepada negara luar Indonesia sementara masyarakat Talaud masih berada dalam kondisi keterbelakangan akses dan kemiskinan disebabkan pemerataan pembangunan tidak seimbang sehingga sulit menikmati kesejahteraan secara layak dari pembangunan nasional.

Kebudayaan Talaud, berupa kompleksitas nilai budaya masyarakat menjadi spirit untuk memperkokoh ketahanan nasional. Berbagai bentuk kebudayaan dan nilai budaya milik etnik Talaud masih tetap dipertahankan antara lain Sistem Kepemimpinan Adat *Ratumbanua*, Kearifan dalam bentuk *Eha*, *Mane'e*, *Manamme*, Kesenian rakyat seperti Lagu-lagu Daerah, Tari Ba'ra, Tari Gunde, Garis Dobil. Faktor kepatuhan masyarakat terhadap adat istiadat dan kepada tokoh informal yang sangat kuat, mempertinggi kekuatan ketahanan budaya masyarakat Talaud. Suatu keyakinan dan kepercayaan akan ditimpa malapetaka berupa kutukan baik

secara pribadi maupun keluarga dalam beberapa aspek kehidupan jika melakukan pelanggaran adat harus dapat dipertahankan.

Identitas nasional Indonesia melekat dalam identitas kedaerahan mereka sebagai orang Talaud yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Sehingga kondisi rentan kawasan Talaud yang bisa menggoyahkan identitas nasionalnya dapat ditangkal, di mana orang Talaud meski memiliki hubungan yang terbuka dengan bangsa luar namun tetap mempertahankan jatidiri sebagai orang Indonesia pada umumnya dan orang Talaud khususnya. Beberapa kali kejadian sekelompok orang yang merasa perhatian pemerintah Indonesia sangat buruk dan mau beralih ke kedaulatan bangsa luar, tidak didukung oleh masyarakat Talaud sendiri dan hanya terlewatkan begitu saja. Mereka sulit memisahkan identitas nasional Indonesia dan kesukuannya sebagai etnik Talaud.

Dalam kehidupan masyarakat Talaud sehari-hari, pimpinan adat, pimpinan formal serta pimpinan agama senantiasa melakukan interaksi dan koordinasi untuk mengimplementasikan berbagai program baik yang berasal dari pemerintah maupun yang berasal dari adat-istiadat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani
2005 Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
- Abdul Wahid Santoso
2010 Identitas, Kebudayaan Dan Nasionalisme
- Amartya, Sen
2006 Kekerasan dan Ilusi tentang Identitas, Tangerang: Marjin Kiri.
- Bogdan, R. , & Taylor, S. J

- 1975 Introduction to qualitative research methods. New York : John Wiley
- Bungin, Burhan
- 2003 Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penyusunan Model Aplikasi. PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Denzin, N. K
- 1978 Sociological methods. New York : McGraw-Hill
- Kahin, George McTuman
- 1995 *Timbulnya Pergerakan Kebangsaan Indonesia, dalam Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Koentjaraningrat
- 1986 *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- 1997 *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Penerbit Rajawali. Jakarta.
- Lincoln, Y. S. Guba E. G. L.
- 1984 *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hill, CA: Sage Publication, inc.
- Mikkelsen, Britha
2006. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta*.
- Moleong, Lexy, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung,
- Mubyarto, 1984. *Pembangunan Pedesaan*, P3PK UGM, Yogyakarta.
- Muhadjir, H. Noeng, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Yogyakarta.
- Pandu Utama Manggala, 2009. *Globalisasi vs nasionalisme : Mencari Identitas Bangsa*. Makalah.
- Patricia M. Goff, 2000. *Invisible Borders: Economic Liberalization and National Identity*. Oxford: Blackwell Publishers.

- stiwanto, 2011. *Komodifikasi dan Pergeseran Makna Kearifan Lokal Studi Kasus Upacara Tradisional Tangkap Ikan Mane'e Pada Masyarakat Di Perbatasan Indonesia-Philipina (Tesis)*. FISIP Universitas Airlangga Surabaya.
- arto, Aswatini, dkk, 1993. *Migrasi Kembali Orang Sangir-Talaud dari Pulau-pulau di Wilayah Filipina Selatan*, Laporan Penelitian Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Jakarta: LIPI,
- cana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara, 2000. *Buku Rinci Di Provinsi Sulawesi Utara*.
- d. Lily&Estefien Katuuk, 2009. *Peran Lagu Talaud*. BPSNT Manado
- adeho, dkk, 2008. *Kawasan Sangihe-Talaud-Sitaro Daerah Perbatasan Keterbatasan Pembatasan*. Jogjakarta, FUSPAD
- ndajang, Sinyo Harry, 2011. *Geostrategi*. Penerbit KATA Jakarta.
- din, Ahmad Fedyani. 2011. *Konflik dan Intereaksi*. Rajawali Jakarta
- rimbun, dkk. 1986 *Metode Penelitian Survey*, Suntingan P3ES, Jakarta.
- ono, 2006. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta.

BAGIAN 3

MIANGAS: SELAYANG PANDANG PULAU DI BATAS UTARA INDONESIA

SEJARAH DAN NAMA PULAU MIANGAS

Berbicara mengenai asal-muasal atau pun sejarah suatu kewilayahan daerah, kebanyakan akan menemukan berbagai macam versi cerita dan sejarahnya. Dari persoalan siapakah yang pertama kali menemukan, penamaan, atau pun kepemilikan daerah/atau pulau tersebut. Sama halnya dengan Pulau Miangas, di mana ada berbagai macam cerita dalam menelusuri kesejarahannya. Alkisah, Pulau Miangas atau sebutan lainnya *Palmas island*, ditemukan oleh pelayaran yang dilakukan Bangsa Spanyol (Ulaen, Wulandari dan Tangkilisan, 2012; 10-23). Dalam bukunya, juga menyebutkan bahwa Pulau Miangas ditemukan oleh Pelaut Portugis. Kebaradaannya juga sudah diabadikan oleh kartograf terdahulu dalam sebuah peta yang menggambarkan letak geografi Pulau Miangas. Masih dalam catatan yang sama, menyebutkan Miangas dengan istilah *poilaten* atau *poi wanua*. Kata *poilaten* digunakan oleh pelaut zaman dahulu untuk menunjukkan benda-benda yang mereka lihat, termasuk pulau. Penggunaan kata *poilaten* konon karena pantangan menyebutkan nama benda yang mereka lihat ketika berlayar termasuk Pulau Miangas. *Poilaten* dalam bahasa Indonesia berarti di sana kampung halaman atau pulau kita. *Las palmas* atau *palmas island* adalah nama yang diberikan

oleh Negara Filipina saat mengklaim Pulau Miangas bagian dari teritorialnya.

Pulau Miangas ternyata sudah dikenal sejak zaman dahulu-terutama para penjelajah samudera dan penjelajah alam serta pada masa kolonial dan pekabaran injil, (lihat: Ulaen, Wulandari dan Tangkilisan, 2012:10). Nama Miangas atau nama lainnya *las palmas*, adalah dua nama yang sering digunakan untuk menunjukkan nama pulau di ujung utara Indonesia itu. Di samping kedua nama itu, ada juga nama-nama lain yang ditemukan dalam dokumen Eropa, seperti *Ilha de Palmeiras*, *Isla de Cocos*, *Las Islas Miangis*, *Mianguis*, *Island Mengais*, *Meangas (Mejages)*, dan *Melangis*. Kesemua nama tersebut hanya menunjukkan pada satu pulau di ujung Utara Indonesia, atau orang Indonesia menyebutkan sebagai Pulau Miangas.

Beragamnya nama Pulau Miangas di mata dunia, ikut serta dengan kisah-kisah asal-muasal orang Miangas. Dalam sebuah buku (lihat: Ulaen, Wulandari dan Tangkilisan, 2012), disebutkan cikal-bakal nenek moyang orang Miangas bernama *Padudu*. Alkisah, *Padudu* berasal dari kampung yang bernama Melu di Mindanao. Ketika pulau itu diserang perompak, *Padudu* bersama dengan rekan-rekannya melarikan diri menuju ke arah selatan, yaitu ke wilayah Kepulauan Nanusa dan mendarat di Pulau Laluhe, Marampit. *Padudu* bersama pengikutnya pun kawin-mawin di pulau tersebut. Setelah keturunannya dewasa, ia mengirimkan keturunannya kembali dan mendiami Pulau Miangas. Lain halnya dengan apa yang diceritakan seorang informan. Menurut ceritanya, ada dua versi cerita yang berkembang di dua kelompok masyarakat mengenai asal-muasal nenek moyang orang Miangas. Nama dari moyang Orang Miangas adalah *Sinyo*. Konon, *Sinyo* berasal dari Bukit Bagobo yang terdapat di Filipina. Kemudian datang ke Pulau Miangas dan beranak-cucu di pulau tersebut. Menurut informan, cerita itu kemudian di bantah oleh

masyarakat Pulau Kakorotan. Dari penuturannya, orang Kakorotan meyakini bahwa *Sinyo* adalah orang Miangas yang melarikan diri pada saat terjadi peperangan, yang pada masa itu Kerajaan Sulu tengah menyerang diseluruh Kepulauan Sangihe-Talaud. *Sinyo* diyakini lari ke Bukit Bagobo, dan mendiami tempat tersebut cukup lama. Ia dan pengikutnya pun kemudian kawin-mawin dengan penduduk lokal di Pulau Mindanao. Setelah cukup lama, dan keturunannya beranjak dewasa, Ia kemudian mengirimkan kembali anak-anaknya ke Pulau Miangas dan menghuni kembali pulau tersebut sampai sekarang ini.

Pulau Miangas berasal dari kata *Mangasia* dalam bahasa Talaud yang berarti menangis. Adapun arti dari mengartikan kata Miangas yaitu Kasihan. Pendefinisian Miangas dalam arti kasihan, berakar dari letak Pulau Miangas yang berada jauh dari pulau-pulau lainnya yang tergabung dalam gugusan Kepulauan Nanusa. Kesendiriannya itu diibaratkan sebagai anak yatim-piatu hidup dalam kesendirian. Dalam bahasa kesehariannya, masyarakat Kepulauan Talaud, khususnya Miangas, tidak menggunakan kata Miangas sebagai pengenalan nama pulau tersebut, akan tetapi menggunakan kata *tinonda* dan *poilaten*. *Tinonda*, oleh masyarakat Kepulauan Talaud mengartikan dengan "Di bawah" dan "Diseberangkan". Kedua arti dari *tinonda* tersebut pun mempunyai makna dan sejarah berbeda.

Dalam catatan lain, mengisahkan mengenai asal muasal munculnya pulau tersebut. Alkisah, sekitar tahun 1500-an, hidup suami isteri yang tinggal di Mindanao tepatnya di atas bukit Wagobo. Dalam kehidupannya mereka dikaruniai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Seiring dengan bertambahnya kedewasaan dari kedua anak tersebut, mereka selalu memperhatikan keadaan sekitar tempat mereka. Dari hasil pengamatan mereka, terdapat sebuah pulau di arah timur dari tempat tinggal mereka. Kedua anak itu yang penasaran dengan

keberadaan pulau tersebut, meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk pergi melihat lebih dekat keadaan pulau. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang berat, akhirnya kedua orang tua mereka mengizinkan kedua anaknya untuk pergi merantau ke pulau yang mereka lihat itu. Dalam perjalanannya, kedua anak tersebut, dikisahkan menggunakan transportasi di luar dari pada biasanya. Mereka menggunakan *gorango*. *Gorango* adalah ikan hiu. Bagi masyarakat kepulauan Talaud Ikan Hiu sering disebut dengan *gorango*. Setelah sekian lama sejak kepergian kedua anak tersebut, orang tua mereka tidak mendapatkan kabar apa-apa dari mereka, sehingga kedua orang tua itu mengira jangan-jangan anak mereka telah meninggal dunia. Rasa penasaran mulai menggerogoti kedua orang tua itu. Kekhawatiran terhadap anak mereka semakin menjadi-jadi. Hingga disuatu ketika mereka memanjatkan doa kepada yang Maha Kuasa. Isi doa tersebut adalah scandainya anak mereka masih hidup maka diberikanlah pertanda berupa sambaran petir di tempat ayah dan ibu tinggal dan juga di tempat anak-anaknya berada. Doa kedua orang tua itu pun, seakan dikabulkan Tuhan dengan memberikan tanda berupa sambaran petir di tempat tinggal orang tua itu dan juga tempat tinggal anak-anaknya. Atas kejadian itu, maka nama pulau yang menjadi tempat tinggal kedua anak itu menjadi *poi laten*. Artinya jika di Pulau Mindanao ada kilat, maka pulau yang menjadi tempat tinggal kedua anak itu juga ada kilat.

Dalam masalah kewilayahan adat, Pulau Miangas tergabung dalam Gugusan Pulau-pulau Nanusa, dan berada dalam formasi *watu Napato* atau batu yang berjejer. Disebut batu berjejer, karena, posisi dari pulau-pulau tersebut tertata rapi berjejeran. Akan tetapi, Pulau Miangas yang termasuk dalam Gugusan Pulau Nanusa, tidak mengakui mereka disebut sebagai bagaian dari *watu napato*. Pulau Miangas yang terletak di paling ujung dan jaraknya yang jauh dengan pulau-pulau Nanusa lainnya, menganggap mereka

berada di luar formasi *watu napatu*. Sehingga mereka menyebut nama tempat tinggal mereka dengan istilah *tinonda* atau "berada jauh di bawah". Kondisi geografis itu pun secara langsung mempengaruhi artkulasi dari *tinonda* yang berarti "jauh di bawah". Sebagai contoh percakapan sebagai berikut ; "Mau pergi kemana Engkau?", "Saya hendak pergi ke bawah (Miangas)".

Sementara itu Miangas dalam arti "diseberangkan", mempunyai sejarah berbeda. Kepulauan Talaud dan sebagian Filipina, kala itu masih di bawah kekuasaan Kesultanan Ternate dan Tidore. Raja-raja dari kedua kepulauan tersebut kemudian diberi mandat oleh kesultanan. Mandatnya berupa seruan untuk mengisi pulau-pulau kosong dengan orang-orang di wilayah Kepulauan Talaud dan sebagian Filipina. Atas perintah itu, para raja Kepulauan Talaud dan Filipina pun menyeberangkan orang-orang atau penduduknya ke pulau-pulau kosong tersebut, termasuk Miangas. Kegiatan menyeberangkan itu dalam bahasa daerah disebut *tinonda*. Atas dasar itulah Pulau Miangas mendapat sebutan/nama lain *tinonda* atau diseberangkan. Dan hingga kini pulau tersebut masih disebut dengan sebutan *tinonda*.

Tradisi lisan yang diwariskan turun-temurun dari orang-orang tua dulu kegenerasi selanjutnya, menjadi warisan budaya yang menggambarkan kehidupan orang Miangas. Kesejarahan mengenai asal muasal orang Miangas pun ditelusuri. Dalam satu kesempatan wawancara, ada yang meyakini bahwa orang Miangas berasal dari Negeri Filipina dan ada pula yang mengatakan dari Kepulauan Nanusa (Karatung dan Marampit), sebagiannya kawin-mawin di negeri seberang Mindanao. Namun, dari mana pun asal muasal orang Miangas, yang pasti dan jelas, Pulau Miangas berserta isinya, telah menjadi wilayah NKRI. Ada kisah memilukan yang terjadi pada zaman kerajaan dahulu di negeri ini. Diceritakan seorang informan mengenai perlawanan mereka terhadap orang Sulu. Pada waktu itu di bawah kepemimpinan

Raja Utu, orang Sulu yang dikenal dengan kekejamannya masuk kewilayah-wilayah kepulauan Sangihe dan Talaud bahkan sampai ke daerah Bolaang Mongondow. Raja Utu yang dikenal kejam dalam pemerintahan, menyuruh antek-anteknya salah satu orang Sulu, untuk menyerang orang-orang di pulau-pulau Sangihe dan Talaud bahkan sampai ke tanah Bolaang Mongondow. Mereka merampok, membunuh menculik orang-orang yang ada di pulau tersebut untuk dijadikan budak oleh Raja Utu. Kisah itu pun sampai sekarang masih membekas dalam benak orang-orang Miangas. Ingatan itu dilengkapi dengan berdirinya benteng pertahanan kala melawan penyerangan Orang Sulu membuat pertalian persaudaraan antara mereka begitu kuat. Satu kisah yang masih membekas hingga kini pada orang miangas ditandai dengan berdirinya benteng perlawanan di Pulau Miangas.

Secara administratif Pulau Miangas pun mempunyai sejarahnya sendiri. Masuknya Pulau Miangas dalam kewilayahan Kepulauan Talaud secara administratif telah terjadi sejak zaman kolonial Belanda. Pada sekitar tahun 1700, Raja Tabukan Marcus Lalero, telah menandatangani kontrak dengan VOC, dan menyatakan bahwa Pulau Miangas sebagai wilayah dari Kerajaan Tabukan. Pada kontrak kerjasama itu, ikut disertakan pengakuan masyarakat Miangas atas kesetiaan mereka terhadap Kerajaan Tabukan. Tidak hanya masyarakatnya yang menyatakan kesetiannya, masuknya Pulau Miangas sebagai jajahan Kerajaan Tabukan turut ditegaskan oleh Gubernur Ternate, bahwa Pulau Miangas yang terletak di Ujung Utara Kepulauan Talaud, merupakan jajahan dari Kerajaan Tabukan. Pada tahun 1889, untuk pertama kalinya Pemerintah Hindia-Belanda melantik seorang Kapiten Laut atau Kepala Kampung Pulau Miangas. Kapiten Laut pertama kali di Pulau Miangas bernama Abiten, yang sebelumnya ia menjabat sebagai *Ratumbanua*. Pelantikan itu pun dilakukan oleh Keresidenan Manado. Pulau Miangas pun

sempat dikunjungi oleh bangsa kolonial Spanyol, pada Tahun 1895. Akan tetapi, kehadiran Spanyol ditolak secara tegas oleh masyarakat dan Kapiten Laut Pulau Miangas. Spanyol yang dengan penawaran mengibarkan benderanya ditolak tegas dikarenakan, masyarakat Miangas sudah turun-temurun di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Penolakan itu pun sampai ke telinga Keresidenan Manado. Atas sikap masyarakat dan Kapiten Laut Pulau Miangas itu, Keresidenan Manado yang di bawah pimpinan E. J. Jellesma, datang langsung ke Pulau Miangas dan memberikan penghargaan berupa medali dan bendera Belanda untuk Kapiten Laut. Kemudian kepada warganya, Residen Manado memberikan lambang Kerajaan Belanda. Pulau Miangas pun turut diramaikan dengan kunjungan-kunjungan. Di antaranya adalah kunjungan ilmuwan yang dipimpin oleh Dr. H. J. Lam, pada tahun 1926. Ketertarikan para ilmuwan dikarenakan melihat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Investigator Amerika, Prof. E. D. Merrill, seorang ahli botani.

Persoalan perebutan kepemilikan wilayah Pulau Miangas oleh dua Bangsa Kolonial Amerika dan Belanda, pun sempat memperpanjang sejarah Pulau Miangas. Negeri Filipina kala itu diduduki oleh Amerika Serikat, mengklaim bahwa Pulau Miangas sebagai milik dari Negara Filipina berdasarkan acuan dari pelayar yang bernama Magelhaens, yang disebut-sebut sebagai orang yang pertama kali menemukan Pulau Miangas. Oleh karena, Magelhaens pada waktu itu bekerjasama dengan Pemerintahan Filipina, jadi penemuannya itu menjadi penemuan Negara Filipina. Klaim itu pun disampaikan melalui masuknya wilayah Pulau Miangas menjadi bagian dari Filipina. Sementara itu Kerajaan Sangihe-Talaud di bawah pemerintahan Hindia-Belanda, juga mengklaim kepemilikan tersebut, berdasarkan kewilayahan tanah adat di bawah pemerintahan Kerajaan Sangihe-Talaud. Tarik-menarik antara Hindia-Belanda dan Amerika atas kepemilikan Pulau

Miagas pun bermuara di Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional dipimpin oleh Hakim Tunggal, Max Hubert, pun memutuskan kepemilikan Pulau Miagas jatuh ke tangan Pemerintah Hindia-Belanda, berdasarkan bukti-bukti yang ada. Di antaranya adalah Pulau Miagas adalah salah satu daerah tanah adat yang dikuasai oleh Kerajaan Sangihe-Talaud sudah sejak lama. Seperti penandatanganan kontrak antara Raja Tabukan dan VOC, Pada tahun 1700. Serta dokumen Belanda yang menyatakan "..... Pulau-Pulau Talaud berada pada arah Timur Laut, tepatnya 126° 30'-127° 10' Bujur Timur dan 3° 40'-5° 35' Lintang Utara, terdiri atas Pulau-pulau Karakelang, Salibabu dan Kabaruan serta pulau-pulau kecil, meliputi kelompok pulau-pulau Nanusa dan Ujungnya Pulau Miagas atau Palmas". Keputusan Arbitrase Internasional itu pun ditetapkan pada 4 April 1928. Kemudian diikuti dengan pengibaran bendera Belanda yang dipimpin oleh Raja Talaud dan dihadiri oleh Residen Manado.

Selanjutnya setelah zaman kemerdekaan, di mana Indonesia dan Filipina telah sama-sama mendapatkan kemerdekaannya atas negara penjajah. Persoalan tapal batas pun mencuat. Meskipun nyata-nyata Indonesia telah secara sah sebagai pemilik Pulau Miagas dan Filipina mengakui Pulau Miagas bagian dari Indonesia, namun, pemberitaan mengenai sengketa Pulau Miagas terus bermunculan. Dari koran daerah (misalkan: Manado Post), sampai koran nasional (misalkan: Tempo dan Kompas). Akan tetapi, pemerintah lebih fokus pada masalah lintas batas antara Indonesia-Filipina. Pemerintah Indonesia dan Filipina, kemudian melakukan beberapa perjanjian bilateral, diantaranya adalah perjanjian lintas-batas Indonesia-Filipina, yang lebih dikenal dengan nama *Border Crossing Agreement*. Perjanjian itu kemudian ditanda tangani oleh wakil dari masing-masing negara pada Tanggal 4 Juli 1928. Tidak hanya itu saja, Indonesia dan Filipina pun melakukan perjanjian bersama di bidang pertahanan dan

keamanan di wilayah perbatasan masing-masing, pada Tahun 1975. Persoalan yang sampai saat ini muncul adalah persoalan tapal-batas. Di mana Wilayah Indonesia Khususnya batas Pulau Miangas dan Filipina saling tumpang tindih. Filipina yang mengacu pada traktat Paris, dalam perjanjian antara Spanyol dan Amerika Serikat. Spanyol menyerahkan wilayah jajahannya (Filipina) kepada Amerika Serikat dalam perjanjian perdamaian yang ditandatangani di Paris, yang dikenal dengan nama Traktat Paris 1898. Dalam isi perjanjian tersebut, daerah *las palmas* atau Pulau Miangas tercakup di dalamnya dan merupakan bagian dari Filipina. Sementara itu, pemerintah RI mengacu pada undang-undang No. 1/1973, tentang landasan Kontinen Indonesia. Acuan tersebut didukung dengan penetapan zona ekonomi eksklusif, yaitu dua konsepsi yang diatur dalam undang-undang No. 17/1985. Kemudian mengesahkan *United Nations Convention on the Law Of the Sea* (UNCLOS) pada tahun 1982. Penentuan kedua belah pihak, sepertinya tidak memikirkan tumpang tindih batas wilayah, sehingga hingga sekarang masalah perbatasan masih diperdebatkan oleh Indonesia dan Filipina. Jarak batas wilayah laut yang kurang dari 400 mil, juga ikut mendukung terjadinya tumpang tindih wilayah perbatasan. Persoalan ini pun sudah dirundingkan sejak 1994, namun hingga kini belum tercapai kesepakatan bersama atas persoalan tersebut.

Meskipun terdapat banyak cerita dan versi kesejarahan mengenai penamaan Pulau Miangas, serta pelbagai masalah yang timbul di Pulau Miangas, namun, jika sudah berbicara masalah kewilayahan tanah adat, Penduduk Nanusa sering menyebut dengan "*Dari Tinonda sampai Tuwong Kawawitan*" artinya dari jauh di bawah sampai melewati pulau karang yaitu Pulau Malo. Daerah adat tersebut tidak pernah akan terpisah atau pun dipisahkan oleh siapa pun. Karena itu sudah merupakan harga mati dan sudah ada sejak zaman pendahulu-pendahulu mereka.

Keurikan serta daya tarik yang dimiliki Pulau Miangas beserta isinya, ikut menarik perhatian kalangan ilmuwan dari dalam maupun luar negeri, untuk memberikan perhatian lebih terciptanya karya-karya yang bermanfaat bagi Pulau Miangas dan seisinya. Begitu pula dengan media massa, yang seakan mendapat ladang baru untuk mendulang keuntungan atas nilai jual yang dimiliki pulau tersebut. Atau pun para pejabat dari yang sekedar pencitraan sampai yang benar-benar memperdulikan nasib mereka yang berada di perbatasan Pulau Miangas.

TOPOGRAFI PULAU MIANGAS

Menyoal Pulau Miangas tentu selalu terkait erat dengan daerah perbatasan yang terletak di ujung utara Provinsi Sulawesi Utara. Carut-marut juga desas-desus, mengenai kehidupan masyarakat Pulau Miangas, sudah makin santer terdengar. Media massa, artikel, buku, dan juga kunjungan-kunjungan pejabat negara, serta kegiatan berbagai macam organisasi membuat pulau tersebut makin dikenal halayak umum. Persoalan-persoalan daerah perbatasan mengenai kesejahteraan dan segala keterbasannya, mungkin akan menjadi makanan sehari-hari ketika hendak mencari tahu keadaan pulau tersebut. Tak ketinggalan juga, tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah atau pun organisasi-organisasi, sebagai bentuk pemberitahuan tegas atas kepemilikan Pulau Miangas, seperti halnya dengan pengibaran bendera yang melingkari seluruh Pulau Miangas sepanjang 7.000 meter. Semuanya adalah bentuk eksistensi Pulau Miangas sebagai bagian dari NKRI. Meminjam kata dari dari beberapa tulisan yang menyebut Pulau Miangas sebagai "Beranda Depan", (contohnya lihat: Ulaen, Wulandari, Tangkilisan, 2012, 161), Pulau Miangas menjadi pintu masuk-keluarnya lintas batas negara antara Negara Indonesia dan Filipina. Juga menjadi lini terdepan dalam

pertahanan dan keamanan Negara Indonesia. Perhatian terhadap pulau tersebut kini seakan menjadi sangat populer di kalangan penggiat-penggiat tulisan dan media. Letak geografisnya yang jauh dari daerah pemerintahan juga ikut mendorong perhatian khusus terhadap pulau itu.

Laporan seorang ilmuwan, Dr. H. J. Lam, telah menggambarkan kondisi perkampungan Miangas. Dalam laporannya, perkampungan Miangas tergolong perkampungan yang rapi, terletak di pesisir pantai barat-daya dan terdapat jalan utama yang lebar dan lurus ke arah pantai, dan dua jalan sempit yang sejajar. Ketiga jalan ini, terhubung jalan memotong yang membentuk persimpangan. Konstruksi jalan pun kelihatan rapi dan tertutup pasir-kerikil putih. Sementara itu, bangun perumahan di perkampungan Miangas kebanyakan berdinding rendah dan padat. Halamannya depan dibuatkan pagar beton yang terbentang sepanjang jalan. Karena kurangnya kayu, kebanyakan rumah-rumah di perkampungan Miangas-termasuk sekolah dan gereja, terbuat dari batang pohon kelapa.

Merunut ke data statistik, tercatat di Kantor Kecamatan Khusus Pulau Miangas Tahun 2012, Pulau Miangas merupakan pulau dengan satu kecamatan Khusus, satu desa dan tiga dusun, terletak di ujung utara Provinsi Sulawesi Utara, dan sebagai wilayah pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud. Pulau Miangas juga disebut sebagai "Beranda Depan" dan berbatasan langsung dengan Negara Filipina. Serta tergabung dalam Gugusan Kepulauan Nanusa. Di antaranya adalah Pulau Marampit, Pulau Karatung, Pulau Kakorotan, Pulau Malo, Pulau Mangupung, Pulau Intata, Pulau Garat, dan Pulau Wora. Pulau Miangas yang dulu hanya sebuah desa kini telah dimekarkan menjadi sebuah kecamatan khusus atas Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, No. 11 Tahun 2006. Secara geografis Pulau Miangas terletak antara 5°32" - 9°14" Lintang Utara dan 127°34"-

126°9' Bujur Timur, dengan luas Wilayah Pulau Miangas 2,39 KM² dan Panjang Garis Pantai 6 KM. Luas wilayah pulau tersebut, dalam catatan Kantor Kecamatan Khusus Pulau Miangas pada Tahun 2012, Luas Wilayah Pulau Miangas hanya 210 hektar. Luas Pulau Miangas dalam catatan-catatan atau buku-buku sering menunjukkan angka pada 315 hektar. Namun, pada catatan Kantor Kecamatan Khusus Pulau Miangas, menunjukkan angka 210 hektar.

Batas-batas Wilayah Pulau Miangas meliputi:

- Sebelah Barat dengan Negara Filipina,
- Sebelah Utara dengan Negara Filipina,
- Sebelah Timur dengan Laut Pasifik, dan
- Sebelah Selatan dengan Laut Sulawesi.

Kondisi topografi Pulau Miangas pun cukup beragam, terdiri dari 80,18 % landai, 18,82% berombak, karang, dan sisanya merupakan daerah perbukitan yang kurang lebih 50-70 meter di atas permukaan laut. Selain itu, Pulau Miangas dikelilingi dan memiliki pantai berpasir putih. Pohon kelapa pun banyak tumbuh di tanah Miangas. Selain pohon kelapa, pala, pohon sagu dan tanaman khas seperti *laluga* atau talas rawa. Luas lahan yang dimiliki Pulau Miangas pemanfaatannya pun dibagi-bagi: Pemukiman penduduk 3 ha, kebun dengan beragam tumbuhan 21 hektar, kebun kelapa 60 hektar, rawa 12 hektar, hutan 4 hektar dan lahan terbuka 10 hektar.

Jarak antara Pulau Miangas menuju ke pulau-pulau Kabupaten Talaud, tergolong sangat jauh dibandingkan jarak Pulau Miangas ke Negara Filipina yang hanya berjarak 48 mil. Jarak untuk ke kepulauan Nanusa 145 mil. Kedekatan jarak dari Filipina membuat mobilitas orang Miangas ke negeri seberang cukup tinggi. Hal tersebut akan dikupas lebih luas dalam bab pembahasan.

Akses yang digunakan sampai saat ini hanya berupa kapal laut. Sementara akses untuk jalur udara masih sementara dibangun oleh pemerintah. Akan tetapi, akses udara tersebut, menurut rumor di kalangan masyarakat Pulau Miangas hanya akan dipakai sebagai pangkalan udara militer demi pertahanan dan keamanan daerah perbatasan dan tidak untuk penerbangan komersil. Jadi pada saat ini satu-satunya jalur yang bisa menuju ke pulau tersebut adalah jalur laut. Dalam melakukan perjalanan laut, perlu juga diingat bahwa cuaca atau alam sangat berperan penting. Pada bulan-bulan tertentu, di mana angin barat bertiup, adalah saat cuaca ekstrim terjadi. Itu terjadi antara bulan Oktober, November, dan Desember. Ketika Angin Barat berhembus, Pulau Miangas seakan terisolasi karena transportasi lumpuh. Hal tersebut, juga mendukung banyak pelayaran dari/ke Pulau Miangas ditunda sampai menunggu cuaca membaik.

“Halangan” untuk mencapai pulau tersebut tidak pada cuaca saja, tetapi halangan bisa dari keadaan kapal yang akan ditumpangi. Kondisi kapal yang sudah dimakan usia juga ikut mempengaruhi terhambatnya akses ke Pulau Miangas. Tidak jarang, ketika jadwal yang sudah ditentukan untuk keberangkatan kapal, kemudian ditunda karena kapal mengalami kerusakan. Dengan kerusakan itu, mau tidak mau harus menunggu sampai kapal tersebut diperbaiki dan siap untuk berlayar. Ada pun alternatif lain yang bisa dipilih sebagai alat transportasi, yaitu dengan menggunakan *pamboat* (kapal motor). *Pamboat* adalah kapal nelayan untuk menangkap ikan. Selain menangkap ikan, para nelayan juga sering memanfaatkan *pamboat* sebagai jasa angkut penumpang. Akan tetapi, perjalanan dengan menggunakan *pamboat* menelan biaya yang tidak sedikit yaitu sekitar 30-50 juta sekali berlayar. Biaya mahal bukan tidak punya alasan. Kelangkaan dan harga bahan bakar minyak terutama minyak bensin sangat mahal di daerah tersebut, mencapai Rp 35.000,- didukung dengan jarak

yag jauh, membuat pemakaian bensin harus lebih. Oleh sebab itu pelayaran dengan mengguakan *pamboat* untuk pergi ke Pulau Miangas hanya dilakukan oleh kalangan tertentu dan kepentingan yang mendesak. Pertimbanga lain jika hendak melakukan pelayaran dengan menggunakan *pamboat* adalah faktor keselamatan.

Pengetahuan mengenai ilmu perbintangan, arah mata angin dan dalam melihat gejala alam, didapat turun-temurun. Masyarakat Pulau Miangas paham betul ketika cuaca sudah mulai berubah. Kemampuan mereka dalam membaca gejala alam cukup mengesankan. Hanya dengan melihat awan dan tiupan angin di dedaunan⁴ (daun Kelapa), mereka sudah tahu arah angin yang bertiup, laut tenang atau berombak dan sebagainya. Ketelatenan masyarakat pelaut khususnya masyarakat Pulau Miangas dalam membaca gejala alam tersebut, mereka pelajari hanya melihat orang-orang tua waktu dulu. Dan itu tetap ada pada mereka dan seakan diwariskan secara turun-temurun.

Adapun jalur-jalur yang biasa dilewati kapal-kapal Peln yang hendak berlayar ke Pulau Miangas. Pelayaran jalur tersebut bisa dimulai dari pelabuhan Kota Bitung, Pelabuhan Lirung, Pelabuhan Melonguane, dan lain-lain dengan menempuh jarak dan waktu yang berbeda-beda. Lebih lengkapnya dapat anda lihat dari tabel berikut:

No	Keberangkatan	Tujuan	Jenis Transportasi	Waktu Perjalanan	Biaya
1.	Miangas	Lirung	Kapal Laut (Pelni)	12 Jam	Rp. 80.000
2.	Miangas	Pelabuhan Bitung	Kapal Laut (Pelni)	2 Hari	Rp. 216.000
3.	Miangas	Melonguane (Ibu kota Kabupaten)	Kapal Laut (Perintis)	2 Hari	Rp. 35.000
4.	Miangas	Pelabuhan Bitung	Kapal Laut (Perintis)	3 Hari	Rp. 55.000

Sumber: Kantor Kecamatan Khusus Pulau Miangas 2012.

DEMOGRAFI PULAU MIANGAS

Pulau Miangas adalah pulau yang terdapat satu kecamatan khusus, dengan satu desa dan tiga dusun/Desa Miangas yang terbagi dalam tiga dusun. Sejak zaman dahulu atau zaman kolonial Belanda, penduduk Pulau Miangas sepertinya tidak banyak bertambah. Dr. H. J. Lam, seorang ilmuwan yang meneliti Pulau Miangas pada Tahun 1926, mencatat bahwa penduduk Pulau Miangas sebanyak 680 jiwa terdiri atas 325 orang laki-laki dan 355 orang perempuan. Dari catatan Kepulauan Talaud Dalam Angka Tahun 2010, penduduk Kecamatan Khusus Pulau Miangas sebanyak 648 Jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 339 jiwa dan perempuan 309 jiwa. Sementara itu, data terbaru yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Khusus Pulau Miangas Tahun 2012, angka penduduk Pulau Miangas terlihat menanjak. Jumlah penduduk pada Tahun 2012 sebanyak 766 jiwa, dibagi dalam 210 kepala keluarga. Meskipun jumlah penduduk Pulau Miangas yang tergolong sedikit, namun, Pulau Miangas tergolong dalam Pulau yang mempunyai kepadatan penduduk yang cukup tinggi, dilihat dari wilayah atau lahan untuk tempat tinggal masyarakatnya. Dalam catatan-catatan atau buku-buku (semisal: Ulaen, Wulandari dan Tangkilisan, 2012), menuliskan luas keseluruhan Pulau Miangas adalah 317 hektar. Namun, dalam catatan Kantor Kecamatan, luas Pulau Miangas hanya 210 hektar. Perbedaan ini memang tidak menjadi permasalahan dalam data untuk mencari tahu luas sesungguhnya Pulau Miangas. Permasalahannya, luas pulau yang tergolong kecil itu, tidak mendukung pertumbuhan penduduk, hal tersebut akan berdampak pada masalah sosial masyarakat Pulau Miangas dengan saling berebutan lahan. Ditambah dengan pembangunan bandar udara yang hingga sekarang ini masih berlangsung di Pulau Miangas, membuat daerah tersebut semakin terkena dampak krisis lahan tempat tinggal.

Pembangunan bandar udara ini, disebut-disebut akan mengundang kembali transmigrasi penduduk keempat, yang sebelumnya telah terjadi tiga kali perpindahan penduduk. Disebutkan oleh seorang pejabat pemerintah, pembangunan bandar udara akan berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial masyarakat Pulau Miangas. Menurutnya, dengan luas yang tidak memadai ditambah dengan persoalan pembangunan bandar udara, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat Pulau Miangas akan kembali mengalami masa-masa transmigrasi. Karena berkurangnya lahan, lahan pertanian pun sudah tidak ada dan lahan tempat tinggal semakin sempit. Masyarakat yang dahulunya menggantungkan kebutuhan pangannya dengan membuka lahan pertanian, kini harus memutar otak untuk mengganti usaha yang mereka rintis sejak lama. Dan tidak menutup kemungkinan, suatu ketika Pulau Miangas yang di dalamnya hanya satu kecamatan khusus, satu desa dan tiga dusun ini, akan ditinggalkan oleh masyarakat pribumi. Pulau Miangas juga disebut-sebut akan menjadi pusat pangkalan militer guna menjaga keamanan wilayah perbatasan.

Meskipun begitu, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian kalangan. Untuk kalangan akademisi, melihat bahwa itu akan berdampak besar pada kehidupan sosial masyarakat Pulau Miangas, serta dikhawatirkan budaya-budaya yang terdapat di Pulau Miangas akan terkikis habis. Kekhawatiran tersebut menimbulkan upaya pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis agar budaya masyarakat Pulau Miangas tidak hilang seiring dengan pembangunan yang berlangsung. Salah satunya dengan melakukan penelitian, dokumentasi bahkan pembuatan film yang bertemakan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Pulau Miangas.

Pulau Miangas yang dikelilingi laut membuat mata pencaharian masyarakatnya didominasi oleh nelayan. Sejak zaman dahulu profesi ini sudah dijalani. Adakalanya mereka bercocok tanam

di lahan perkebunan mereka dan ketika berada di rumah mereka menganyam tikar dari daun pandan. Menganyam tikar adalah satu-satunya industri rumahan saat itu, dan dijadikan sebagai pengganti uang dalam membayar pajak ke Lirung. Hubungan mereka (orang Miangas) dengan negeri Filipina/Mindanao, juga sudah terjalin sejak zaman kolonial. Terbukti dengan seringnya orang Miangas bepergian ke Mindanao untuk menukarkan tikar dengan barang-barang keperluan lainnya. Banyaknya orang Miangas bepergian ke Mindanao disebabkan oleh jarak yang lebih dekat dari pada pulau-pulau di Nanusa atau Kepulauan Talaud.

Sejak zaman dahulu potensi laut yang cukup berlimpah ini, seperti ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Sekarang pun, potensi yang cukup menjanjikan ini, belum didukung oleh pemasaran yang memadai. Mereka hanya mendagangkan hasil tangkapannya kepada penumpang kapal yang berlabuh di pelabuhan Pulau Miangas. Adapun mereka mereka menukarkan dengan barang-barang lainnya, semisal beras. Atau pun ikan hasil tangkapan dibuat ikan kayu atau *halla* dalam bahasa daerah. Proses pembuatan ikan kayu ini, yaitu ikan tuna yang direbus kemudian dijemur sampai benar-benar kering dan keras. Ikan yang telah berubah menjadi keras seperti kayu itu kemudian dipasarkan ke penumpang kapal yang berkunjung ke Pulau Miangas. Ada pun mereka menjadikan sebagai bekal terhadap keluarganya yang datang berkunjung ke Pulau tersebut atau mereka membawanya untuk dipasarkan ke wilayah Kepulauan Talaud lainnya. Profesi kedua yang mereka lakoni adalah sebagai petani dan membuat anyaman tikar dari pandan. Pada zaman dahulu juga, orang Miangas mahir membuat perahu layar. Keterampilan itu mereka peroleh dari orang-orang Melayu yang singgah di Pulau Miangas. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, teknologi mulai berkembang, dan perahu layar pun tergantikan dengan mesin-mesin motor. Ada pun, perahu yang tidak menggunakan mesin, namun juga tidak menggunakan

layar. Perahu hanya dilengkapi oleh dua tiang yang dipasang kiri dan kanan (*sema-sema*) dan menggunakan tenaga dorong berupa dayung. Sekarang ini luas lahan pertanian menjadi berkurang seiring dengan pembangunan Bandar udara di pulau tersebut. Ini mengakibatkan penduduk Pulau Miangas sekarang bergantung kepada hasil laut saja. Ada pun pekerjaan lain yang ditekuni, seperti PNS, Polisi, TNI, atau pun pekerja serabutan semisal buruh. Kondisi ini disikapi serius oleh salah seorang pejabat pemerintah. Ia mengatakan, seharusnya, pembangunan Bandar udara yang telah mengurangi lahan pertanian tersebut, diganti dengan dibukanya sumber atau industri perikanan yang menjadi andalan Penduduk Miangas. Kesulitan penduduk Pulau Miangas bertambah ketika sudah masuk pada bulan-bulan tertentu di mana mereka tidak bisa melaut. Sementara lahan pertanian yang dijadikan sebagai pengganti pendapatan dilaut, telah tidak ada lagi. Lahan yang biasanya ditanami tanaman umbi-umbian seperti talas rawa atau *laluga* dalam bahas daerah, merupakan makanan khas penduduk Pulau Miangas, kini sudah tidak ada lagi. Begitu pun dengan tanaman lainnya. Bias dalam situasi tersebut adalah kelangkaan bahan makanan. Ada pun data jenis mata pencaharian dan jumlah orang yang menekuninya dapat dilihat dalam bagan di bawah ini :

Untuk PNS, TNI, serta Polri, kebanyakan berasal dari luar Pulau Miangas yang dditugaskan dan menetap di Pulau tersebut. Biasa, mereka yang bekerja di instansi pemerintahan, di Kepulauan Talaud pada umumnya dan Miangas pada khususnya, sudah mapan dalam kehidupannya, tidak lagi mengharapkan bantuan dari pemerintah. Karena dari sisi gaji yang mereka dapat maupun tunjangan. Untuk pekerja serabutan, selain tidak mempunyai tanah olahan mereka hanya bergantung pada apa yang mereka kerjakan hari ini, misalkan menjadi buruh bongkar-muat jika ada kapal

yang singgah, menawarkan jasa sebagai pekerja kebun, atau apa pun yang penting bias menghasilkan dan bias mengisi perut. Keadaan ini mungkin adalah kebalikan dari ketenaran Pulau Miangas, yang *booming* pada waktu lalu. Mulai dari iklan komersil perusahaan makanan sampai penciteraian para pejabat. Di mana kebanyakan mereka hanya mengekspos mengenai batas wilayah, kepemilikan yang semestinya tidak perlu dipersoalkan karena sudah jelas miangas merupakan daerah NKRI. Pemerintah dan awak media seakan lupa mengenai kehidupan orang yang ada di dalamnya. Orang perbatasan dengan segala keterbatasan.

Dalam kehidupannya, pembangunan di Pulau Miangas tergolong cepat. Banyaknya program-program pemerintah mengenai pembangunan daerah-daerah perbatasan ikut mendorong pesatnya pembangunan di tanah Miangas. Mulai dari pembangunan fasilitas umum, fasilitas militer dan monumen-monumen pengokohan Pulau Miangas bagian dari wilayah NKRI, begitu pesat terjadi. Akan tetapi, pembangunan tersebut tidak diikuti dengan pembangunan sumber daya manusianya. Mereka seakan tidak dibekali dengan kemampuan-kemampuan dalam mengelola sumber daya. Daya dukung alam yang menyediakan berbagai macam sumber kehidupan tidak dimanfaatkan secara maksimal. Semisal, kemana mereka memasarkan hasil tangkapan ikan dan hasil kerajinan yang mereka buat. Pasar yang dibangun pemerintah seakan hanya menjadi bangunan tua yang menghabiskan dana negara, yang tidak terpakai dan terbengkalai. Perputaran ekonomi pun hanya terjadi di daerah itu saja. Tidak ada dukungan investor membuat mereka kebingungan memasarkan hasil bumi dan kerajinan mereka. Situasi ini patut, untuk diperhatikan sehingga tingginya pembangunan yang terjadi di Pulau Miangas dibarengi dengan sumber daya manusia yang memadai.

Pembangunan yang dilakukan semenjak zaman orde lama, orde baru sampai sekarang ini seakan hanya difokuskan pada "beranda depan" yang menjadi julukan Pulau Miangas, dan berdampak pada pembangunan-pembangunan pengokohan wilayah NKRI saja dan tidak melihat pada aspek sosial-budaya masyarakatnya Pulau Miangas. Tentu, diperlukan dukungan pemerintah dan pihak-pihak terkait agar dengan seiringnya perkembangan pembangunan daerah perbatasan diikuti dengan kemajuan masyarakat perbatasan.

Meskipun kondisi orang Miangas yang di gambarkan orang kebanyakan-seperti memprihatinkan-semisal apa yang disampaikan oleh tim peneliti Pusbangtansosmas dalam hasil penelitiannya, akan tetapi, hubungan persaudaraan di antara mereka sangat kuat terjalin. Sejak masuknya pekabaran injil yang dibawa oleh bangsa kolonial sehingga membuat pada zaman itu semua orang Miangas memeluk agama Kristen Protestan. Sampai masuknya para pedagang berbahasa Melayu yang menjadikan sebagian orang Miangas memeluk agama Islam, Miangas masih menjadi tempat yang ramah untuk ditinggali. Sebagai bentuk pengakuan dari seorang informan yang menggambarkan kehidupan bermasyarakat orang Miangas "..... Orang Miangas sampai saat ini masih kental dengan rasa persaudaraan, dapat dilihat saat mereka membangun rumah penduduk, rumah ibadah, atau dalam menggelar hajatan. Mereka (orang Miangas) selalu saling bahu-membahu bergotong royong untuk membantu sesamanya". Meskipun kondisi orang Miangas yang semakin hari seakan semaki tergeser dan seakan tidak mempunyai tempat di tanahnya sendiri, rasa persaudaraan dan persatuan di antara mereka masih terjalin hingga sekarang ini.

BAGIAN 4

KISAH BEBERAPA EPISODE: MOBILITAS DAN IDENTITAS WANITA MINAHASA

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui, perbincangan mengenai isu dunia sosial wanita atau yang kemudian populer disebut isu Gender begitu marak di Indonesia. Bahkan sebelum negara ini merdeka. Tentu yang paling terkenal adalah terbitnya kumpulan korespondensi kritik emansipatif R. A. Kartini dalam bentuk buku berjudul *Door Duisternis Tot Licht*, Habis Gelap Terbitlah Terang.

Isu tersebut di atas menjadi luas cakupan dan peminatnya. Komentar, analisa, pandangan tidak hanya datang dari para ilmuwan sosial. Bahkan segenap orang yang mengaku praktisi, ahli hukum, aktivis perempuan, birokrat, menteri, politisi hingga masyarakat awam. Karena itu, studi-studi mengenai hubungan antara dunia kerja dan wanita menjadi begitu substansial dan strategis artinya. Tentu agar kita dapat melihat wacana-wacana dan fenomena-fenomena yang terkandung di dalamnya dengan lebih jernih serta seimbang.

Sementara itu, telah menjadi pengetahuan umum para antropolog, bahwa salah satu karya etnografi paling maju di Indonesia adalah studi mengenai orang Minahasa. Setidaknya yang paling ramai jika melongok kajian sejenis pada masyarakat di bagian lain Indonesia Timur. Dapat dikatakan, hampir tidak ada

tema yang benar-benar baru dalam eksplorasi kajian mengenai masyarakat dan kebudayaan Minahasa. Bisa disimpulkan, semua hasil studi yang disajikan di masa ini adalah pelebaran wacana, pemutakhiran data dan fakta serta pencarian sisi "lain" dari studi-studi terdahulu.

Begitu pula dengan studi mengenai kaum wanitanya. Berbagai kajian yang secara khusus membahas wanita Minahasa dan didapati relasi kerja dapat kita temukan. Misalnya dalam karya Manoppo-Watupongoh (1989; 1995) ataupun Lalamentik, *et. al.* (1994). Ada pula, tulisan sederhana yang memuat biografi singkat beberapa wanita Sulut berprestasi dan sangat nampak dominasi wanita Minahasanya (Ratag, 2005). Hadir juga, kumpulan artikel yang diedit ibu Tiwa-Rotinsulu dan Kapahang-Kaunang (2005). Di samping itu, ada juga nukilan-nukilan analitis mengenai perempuan Minahasa berdasar data sejarah dan penelitian lapangan yang tersebar dalam berbagai karya penulis luar negeri, Mieke Schouten (1995; 1998) contohnya. Sehingga, karya mengenai wanita Minahasa dan berbagai aspek hidup, terutama soal pekerjaannya dapat dibilang cukup banyak tersebar.

Sehingga, pada kesempatan ini saya bermaksud menulis sebuah artikel sekaligus refleksi ilmiah yang terkait dengan isu tersebut dan berjudul: "Kisah Beberapa Episode: Mobilitas dan Identitas Wanita Minahasa". Berdasar model pendekatan ilmu yang saya tekuni, Antropologi, maka pendekatan teoritis tentu akan kurang dijumpai di sini. Karena, model induktif yang kami manfaatkan mendorong fakta empiris dalam *grounded research*, pembaha-san terhadap isu-isu partikular tematis dan konsentrasi pada wilayah atau dalam kasus artikel ini, entitas tertentu yang terkendali, memiliki konsekuensi menempatkan teori sebagai "pelengkap" dan bukan "menu utama" dari "sajian ilmiah" yang dipaparkan.

ORANG MINAHASA: DUNIA KERJA DAN MIGRASI

Melihat studi-studi mengenai kebudayaan masyarakat di Indonesia, maka telah dikenal luas bahwa orang Minahasa yang disebut juga orang Manado merupakan entitas dengan pengaruh kebudayaan barat serta Kristen paling dalam dan signifikan dari entitas lain di Indonesia (Wallace, 2010[1869]: 183-203; Lundstroom-Burghoorn, 1981; Henley, 1993; 1996; Schouten, 1998; Benson, 2012[1938]: 229). Melalui publikasi-publikasi rujukan tersebut, kita memperoleh gambaran bagaimana pengaruh kebudayaan Eropa telah menjadi bagian kehidupan orang pribumi baik melalui gaya hidup dan material. Entah itu pola permukiman, pakaian, cara makan, jenis makanan dan minuman, serta hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, terutama bahasa¹⁵.

Lewat publikasi-publikasi rujukan tersebut pula, diketahui bahwa pengaruh asing terutama diintroduksi dan ditanamkan pihak kolonial melalui institusi pendidikan dan pola hidup Kristen. Dalam pengaruh kuat peradaban barat atau tepatnya Belanda, Salah satu implikasi yang diterima adalah kita dapat melihat mobilitas penduduk Minahasa dan terutama berhubungan dengan dunia kerja mereka.

Pertalian mobilitas dalam era kolonial ini sangat erat dengan keberadaan dunia pendidikan di Minahasa. Mula-mula ditandai dengan kedatangan penganjil NZG¹⁶ Riedel dan Schwarz pada paruh pertama 1930. Tidak hanya mengabarkan Injil sebagai bagian dari tugas misionaris mereka, namun mengenalkan juga

15. Soal penekanan peran penting Bahasa (Melayu dan Belanda) yang akhirnya mendukung mobilitas atau diaspora atau migrasi dan interaksi mereka dengan komunitas lain dapat dilihat dalam Alex J. Ulaen, "Kembara dan Diaspora: Sebuah Amatan dari Luar", di dalam Roy E. Mamerigko (Ed.), *Etnik Minahasa Dalam Akselerasi Perubahan: Telaah Historis-Teologis-Antropologis* (Jakarta: Sinar Harapan, 2002) hlm. 403-404

16. Singkatan dari *Netherlandsch Zendeling Genootschap*, lembaga penganjilan gereja Protestan yang berkedudukan di Belanda

pranata pendidikan non-formal *anak piara* atau *murid*¹⁷. Lalu diikuti pembentukan sekolah formal yang tercatat dimulai tahun 1851 yaitu, *kweekschool* (sekolah guru), *hoofdenschool* (sekolah "raja" untuk melatih *ambtenaar*) hingga MULO. Baik didirikan organisasi misi (*zending school*), negara (*staat-school*) maupun pemerintah distrik (*negorij school*), bahkan jauh sebelum pelaksanaan kebijakan politik etis di nusantara (Henley, 1993: 60; Henley, 1996: 98-101; Schouten, 1998: 113-118).

Kemudian dijelaskan, kemajuan pendidikan¹⁸ ini telah membentuk elit baru dalam bidang-bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian baca-tulis. Para elit ini bermigrasi dan tersebar luas di nusantara untuk menempati posisi-posisi sebagai anggota KNIL (tentara Hindia-Belanda), pegawai administrasi, para-medis, guru, misionaris-pribumi (*inlandsch-leraar*), termasuk pengawas perkebunan. Keti-ka itulah, terbentuk sebuah elit dan tren birokrat-kelas menengah dalam pekerjaan *white collar* yang juga menjadi penanda identitas sosial individu dalam komunitas (Henley, 1996: 78-79; Schouten, 1998: 187-208). Perihal yang masih sangat terasa sampai kini. Hingga, dalam hal migrasi untuk memenuhi kebutuhan *ambtenaar*, guru *zending* dan anggota KNIL di berbagai daerah Indonesia timur misalnya, kita dapat menemukan catatan mengenai kehadi-ran orang Minahasadisana, entah di Sunda Kecil, Makassar, Ambon, bahkan Papua (Miller, 2012[1996]:*passim*).

17 Model pendidikan dengan mengangkat anak penduduk pribumi baik pria ataupun wanita untuk diajarkan cara hidup Kristen dan tata krama eropa, untuk penjelasan ini dapat melihat Mieke Schouten, *Leadership and Social Mobility in Southeast Asian Society Minahasa 1677-1983* (Leiden: KITLV, 1998) hlm. 114

18 Kita dapat melihat kemajuan angka pertumbuhan sekolah dan melek huruf di Minahasa dibandingkan daerah lain di Hindia Belanda dengan membaca: A. B. Lopian, "Manusia Minahasa: Sejarah dan Adat Istiadatnya", di dalam E. K. M. Masinambow, et. al. (eds.), *Si Tou Timou Timou Tou* (Jakarta: Kerukunan Keluarga Kawanua, 1991) hlm. 142; David Henley, *Nationalism and Regionalism in Colonial Context Minahasa in The Dutch East Indies* (Leiden: KITLV, 1996) hlm. 59-65; 80-81; Mieke Schouten, Op. Cit. , hlm. 113-116

Hal-hal di atas tentu terbatas soal mobilitas dalam kaitan dengan perolehan pendidikan di tanah Minahasa sendiri. Setelah itu, baru mereka disebar oleh pemerintah kolonial ke berbagai wilayah. Namun ada juga yang untuk kepentingan pendidikan, baik pria maupun wanita sengaja dimigrasikan ke pulau Jawa oleh pemerintah sejak 1850an untuk memperoleh pendidikan medis dan obstetri dasar agar menjadi paramedis-pribumi atau disebut juga *dokter jawa* (Schoute, 1936; Winter, 1974 dan De Clerq 1871 dalam Schouten, 1998: 116).

Ketika itu, mobilitas sudah terjadi hingga ke luar negeri. Dalam hal ini, capaian akademik-formal dikejar untuk menjadi penanda mence-cap pendidikan yang lebih tinggi dan maju. Tradisi mobilitas dalam bidang pendidikan ini kemudian dikenal luas dengan bahasa lokal *sumikolah*. Dalam kasus ini, terutama hingga ke negeri Belanda. Tercatat salah satu pioncer misalnya, Lambertus Mangindaan melanjutkan pendidikan untuk memperdalam keahlian gurunya pada tahun 1850an (Schouten, 1998: 117). Ada juga ayah pahlawan nasional asal Minahasa, G. S. S. J. Ratulangie, Joziaz Ratu-langie yang menyelesaikan pendidikan di sekolah guru negeri terkenal di Haarlem, Belanda pada penghujung abad ke 19 (Schouten, 1998: 117-118).

Dalam bidang pekerjaan profesional-administratif, penduduk Minahasa bersaing dengan orang Ambon dan Eurasia (*borgo*¹⁹ – tambahan dari penulis-) untuk menempati posisi sebagai kepala sekolah dan akuntan (Benson, 2012[1938]: 229). Dari sisi orang Belanda, orang Minahasa mendapat apresiasi lebih dari orang pribumi manapun serta mendapat posisi setara dengan orang Indo-Eropa, terutama dalam hal makanan dan upah kerja (Henley, 1993: 101-102; 1996: 82). Ini membangkitkan suatu kelas menengah

¹⁹ Populer disebut *borgo*. Dapat disamakan dengan *mestizo*, penduduk *half-blood* antara orang Eropa dan Asia-pribumi. Lazimnya campuran darah Portugis atau Spanyol dengan penduduk pribumi.

pribumi yang berada sedikit di "bawah" Belanda dan di "atas" orang pribumi lainnya. Bahkan, dalam beragam keadaan dan situasi, orang Minahasa menganggap mereka setara dengan orang Belanda, begitu juga sebaliknya (Lapian, 1991: 135-136).

Orang-orang Minahasa yang tersebar di seluruh Hindia Belanda, terutama pada paruh pertama abad ke 20, sebagaimana dipaparkan Henley (1993: 81) mulai menggandrungi pekerjaan sebagai pelaut, pengawas di perusahaan kereta api, pertambangan minyak dan jurnalis. Mereka tersebar di berbagai wilayah Hindia-Belanda, seperti Sulawesi Selatan, Sumatera, Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, Jawa dan Madura. Lebih lanjut, para Jurnalis dimaksud membantu mengembangkan surat-surat kabar yang berdiri di pulau Jawa. Dalam kondisi-kondisi migrasi yang begitu luas tersebut, orang Minahasa mungkin menjadi salah-satu entitas di Hindia-Belanda yang paling terdiaspora. Pada cacah jiwa atau *volksteeling* tahun 1930, tercatat 1 dari 8 orang Minahasa berada di luar tanah mereka (Henley, 1993: 81; 1996: 100-101). Tercatat juga, kurang lebih 10. 000 orang Minahasa tinggal di bagian lain pulau Sulawesi selain Minahasa (Henley, 1996: 101).

Pada sisi berbeda, memasuki masa akhir pemerintahan kolonial, implikasi pertalian antara kesuksesan pranata pendidikan, kristenisasi dan migrasi harus berhadapan dengan beragam kebudayaan di Indonesia, yang bisa dikatakan, ketika itu "tidak seberuntung" orang Minahasa. Hubungan erat tersebut telah membuat Minahasa disebut *twalfe de provincie van Netherlandsch* atau provinsi kedua-belas Belanda tidak hanya oleh para sejarawan dan etnograf (Lapian, 1991; Henley, 1996; Schou-ten, 1998), namun juga oleh sebagian besar orang lokal sendiri. Hal mana menjadi salah satu penanda identitas penting bagi orang Minahasa. Baik sebagai orang "dalam" ataupun dari orang pribumi lainnya. Ironisnya, hal ini juga menjadi semacam jurang pemisah dan persoalan ketika berbenturan dengan orang pribumi lain yang 'timur' dan

bukan Kristen. Pada masa kolonial –bahkan terasa hingga hari ini– identitas Minahasa sebagai paling beradab diantara pribumi manapun di Hindia-Belanda (Henley, 1996: 101; Swazey, 2008: 34) telah membentuk suatu etnosentrisme dan mereka merasa setara dengan orang Eropa (Swazey, 2008: 34). Namun, keadaan justru berbalik ketika Indonesia merdeka hingga menimbulkan semacam gear budaya bagi orang Minahasa. Bahkan dalam suatu film berjudul “Merah Putih” dengan mengambil latar masa revolusi Indonesia, seorang serdadu republik asal Minahasa dipanggil “anjing Belanda” oleh temannya di kesatuan yang seorang aristokrat Jawa. Dalam kondisi seperti inilah kemudian muncul benturan identitas dalam relasi oposisi-oposisi biner yang bertentangan, seperti: Kristen versus Islam; pusat dan pinggiran; Jawa dan Minahasa; budaya timur lawan budaya barat.

Tak bisa dipungkiri, soal-soal identitas seperti itu, juga menggerakkan gerak migrasi orang Minahasa ke luar negeri beberapa saat sebelum dan pasca kelahiran Indonesia sebagai negara. Tujuan utamanya tentu ke Belanda bagi mereka yang mendukung pemerintah kolonial (Lundström-Burghoorn, 1981: 28; Hekker, 1987 dalam Ulaen, 2002: 406-407). Mungkin secara tidak sadar para migran ini memperlakukan Belanda sebagai *patroon* dan mereka menempatkan diri sebagai *client* ketika itu. Di Belanda mereka mendirikan Perkumpulan Kawanua pada tahun 1957, dilanjutkan *Bond van Minhasers* pada 1960 sebagai pengikat identitas para migran dengan tanah leluhurnya (Hekker, 1987 dalam Ulaen, 2002: 406-407). Hal mana, dapat dimaknai sebagai tanda kehadiran relasi trans-nasional(isme), tidak hanya sekedar gerak mobilitas dan diaspora semata (Ulaen, 2002: 407).

Memasuki masa kontemporer, Minahasa masih tetap merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang paling diasporik dan terkonsentrasi bermukim di pusat-pusat urban dunia; seperti Eropa terutama di Belanda; Amerika Utara terkonsentrasi di pesisir

barat seperti California; dan belakangan Jepang (Tirtosudarmo, 2005: 110). Dimulai pertengahan tahun 1980an, gelombang migrasi ini ber-gerak dengan tren menuju Jepang (Tirtosudar-mo, 2005; Pudjiastuti, 2005; Okushima, 2006) dan Amerika (Swazey, 2008). Berbeda seperti gelombang migrasi ke Belanda yang kental unsur politis-emosionalnya, kepergian ke Amerika Serikat dan Jepang (awalnya?-tambahan dari penulis-) hanya dilandasi faktor ekonomi semata (Ulaen, 2002: 406). Sementara ke Korea, belum kami temukan tulisan ilmiah yang menguraikan kehidupan para pekerja migran Minahasa disana. Sekalipun kesaksian tentang tren ke negeri ginseng tersebut tetap diperoleh. Ditambah, sekarang ini telah berdiri lembaga pelatihan Kawannua-Korea yang bertugas menyiapkan calon tenaga kerja Minahasa tujuan Korea. Sebuah data yang membuat kami menarik asumsi awal, bahwa kedatangan para muhibah tersebut lebih didasari faktor ekonomi semata dan bisa dikatakan belum berkembang menjadi sebuah dorongan psikologis-emosional.

Artikel ilmiah yang membahas kehidupan pekerja migran Minahasa di Jepang, terutama di Oarai sebuah kota di prefektur Ibaraki bisa dikatakan lebih informatif dan lengkap diban-ding dengan tulisan mengenai pekerja migran Minahasa di Amerika Serikat. Apalagi di Korea Selatan. Tulisan Tirtosudarmo (2005) mengenai pekerja migran Minahasa di Oarai, bercerita soal pembentukan pranata sosial orang Minahasa dan bagaimana itu berfungsi tidak hanya sebagai pendukung dan pelindung kehidupan pekerjaan dan harian mereka di negeri asing. Tapi juga bagaimana pranata-pranata tersebut menjadi wadah menyalurkan dan memupuk perasaan nasionalisme ke-Minahasaan mereka dengan para *kawannua* senasib dan se-daerah asal. Sebagian dari tulisan artikel barusan, kemudian penulisnya analisa kembali dan simpulkan hal tersebut sebagai suatu model transnasionalisme pekerja migran untuk mencari, mengukuhkan, menguatkan,

melindungi dan memanfaatkan identitas keMinahasaan atau bisa juga keIndonesiaan sebagai strategi mempertahankan eksistensi mereka (Tirtosudarmo, 2010).

Tulisan Pudjiastuti (2005), menunjukkan bagaimana pengaruh kebijakan imigrasi pemerintah Jepang dari tingkat nasional hingga tingkat prefektur dan Kota Oarai terhadap pasang-surut kehidupan pekerja migran asal Minahasa disana. Sementara tulisan Okushima (2006), menceritakan peran institusi Gereja dalam berkompromi serta bersiasat dengan kebijakan serta petugas imigrasi Jepang dalam melindungi, menjamin dan mendukung kehidupan pekerja migran asal Minahasa.

Pada belahan dunia lain, Kelli Alicia Swazey (2008) melakukan studi mengenai migrasi orang Minahasa di New England, Amerika Serikat. Disana ia melihat bagaimana transnasionalisme terbentuk dalam organisasi gereja dan tata cara ibadah serta kehidupan orang Minahasa dalam pranata pendukungnya disana. Juga, dalam beberapa bagian, menyentil suka-duka dunia kerja orang Minahasa terutama siasat yang digunakan dalam menghadapi persoalan keimigrasian.

Berbagai paparan di atas, sejauh terdeskripsi menunjukkan mobilitas dan migrasi orang Minahasa menjadi pekerja di luar daerah. Namun pada sisi lain, juga memperlihatkan belumlah wanita Minahasa ditempatkan dalam konsentrasi studi mengenai pekerja migran. Terutama yang berada di luar negeri. Karena sejauh ini, mereka ditempatkan justru dalam payung penelitian besar mengenai orang Minahasa secara umum dan bukan wanita Minahasa secara khusus. Catatan-catatannya hanyalah berupa sentilan sana-sini, dan sekali lagi, bukan dijadikan konsentrasi studi. Karena itu, penelusuran tulisan-tulisan mengenai migrasi wanita Minahasa dan hubungannya dengan pekerjaan mereka akan coba kami uraikan dalam bagian berikut. Baik itu yang

tercecer dalam tema besar Minahasa ataupun yang secara khusus mengangkat kehidupan wanitanya dalam berbagai aspek.

WANITA MINAHASA: EMANSIPASI, PEKERJA MIGRAN DAN IDENTITAS

Kita telah dapat mengambil kesimpulan, bahwa masuknya peradaban barat dan Kristen telah memberikan pengaruh yang besar dalam kemajuan pendidikan dan tentunya migrasi-kerja. Model egaliterianisme ini berpengaruh hingga membentuk nir-diskriminasi dalam bidang pendidikan dan pekerjaan bagi wanita. Ini memberi dampak hingga ke mobilitas kerja mereka sejak era kolonial hingga masa ini tentunya. Pada lain sisi, konstruksi ini tentu tidak lepas dari klaim kebudayaan lokal Minahasa, yang menganggap mitos sejarah kehadiran manusia di tanah *Malesung* (Minahasa) lewat kisah Karema, Lumimuut dan Toar telah menempatkan wanita setara dengan pria. Termasuk, kisah bagaimana mereka bertemu untuk mengawali membangun keturunan berikutnya dengan melakukan perjalanan mengelilingi dunia. Jadi, orang Minahasa, secara *taken for granted* telah dididik, bahwa posisi wanita setara dengan pria dan didorong untuk "mengelilingi dunia" dalam rangka memulai kehidupan.

Subordinasi lewat otoritas pria yang berlebihan tidak nampak dalam kisah di atas. Hingga, pernyataan "menuju kesetaraan gender" menjadi terlihat *absurd* dan kurang relevan di Minahasa. Karena sudah emansipatif sejak mulanya. Secara biner opositif pula, klaim tersebut justru mengesankan wanita Minahasa tidak setara dengan kaum prianya.

Beragam catatan studi, baik yang metodologis atau berupa catatan perjalanan dalam melihat kesetaraan posisi wanita dengan pria yang mengambil latar belakang masa kolonial bisa dipaparkan disini. Penelusuran Schouten (1998: 114) memperlihatkan bagai-

mana sistem *anak piara* atau *murid* dari para misionaris tidak hanya mendidik anak pria tapi juga wanita.

Penting pula kita melihat Refleksi perjalanan misionaris N. Graafland (1991 [1869]: 432) dalam dasawarsa 1850an saat menjelajahi pedalaman Minahasa misalnya, ia menulis:

Memang, kaum wanita [...] betul-betul sangat peka terhadap perkembangan intelektual. Mereka memiliki otak yang encer, daya tangkap yang bagus, perasaan yang hidup dan kemauan yang keras. Oleh karena itu [...] sebagaimana banyak tempat di daerah Minahasa, jarang ditemukan anak gadis yang kalah pintar dari anak-anak lelaki.

Emansipasi antara pria dan wanita di Minahasa, sejauh bacaan pustaka dan perhatian pada realitas sosial, rasanya menjadi sesuatu yang alamiah. Sehingga menjadi relevan bagi kita untuk melihat dinamika wanita Minahasa dalam dunia pendidikan, keagamaan dan pekerjaan yang dipaparkan secara cerdas dan lugas oleh Mieke Schouten. Antropolog lu-lusan Vrije Universiteit van Amsterdam menulis soal ini dalam bagian bukunya yang diberi judul: "Girls and Schools, Women and Christianity" (Schouten, 1998: 118-121); serta "Education and Emancipation" (Schouten: 1998: 187-208).

Dalam arsip negara kolonial berangka tahun 1871, bahkan pada tahun 1869 lebih dari 30 tahun sebelum kebijakan politik etis dijalankan di Hindia Belanda, murid wanita telah sebanyak 34,5 % dari keseluruhan murid di Minahasa yang tersebar di: sekolah negara (*staatschool*) 28 %; sekolah-sekolah misi (*zending/mission schools*) 34%; sekolah distrik (*negorij schools*) (Schouten, 1998: 119). Hal tersebutlah yang mungkin membuat "iri" seorang R. A. Kartini pada kemajuan dunia pendidikan di Tomohan-Minahasa yang memberi peluang besar kepada wanita untuk ikut serta. Hal itu seperti tertulis dalam dalam buku korespondensinya yang terkenal *Door Duisternis Toot Licht!* (Kartini, 1912: 260; 303).

Kehadiran murid wanita dalam dunia pen-didikan jaman kolonial bahkan sampai pada pelatihan-pelatihan profesional. Dalam tulisan Ratulangie (1914) sebagaimana dikutip Schouten (1998: 118), pada tahun 1898, kakak Sam –panggilan akrab Ratulangie-, Wulan Kajes Rahel Wilhelmina melewati ujian *klein ambte-naars*²⁰ dengan nilai tertinggi yang lebih baik dari anak laki-laki manapun yang mengikuti ujian tersebut. Begitu juga dengan adik perempuan Sam yang memperoleh *hulpacte* atau sertifikat dasar lulus sekolah kerajaan pada tahun 1912.

Mengenai keadaan pendidikan wanita di Minahasa dan migrasi mereka karena dorongan kerja yang tinggi, dapat juga kita peroleh keterangan dari tulisan Ratulangie (1914) berjudul “Het Minahassisch Ideaal”. Ratulangie memberi gambaran kemajuan pendidikan di tanah Minahasa serta berlombanya para pen-duduk pribumi, terutama kaum wanita untuk keluar daerah dalam rangka bekerja. Hingga akhirnya Sam terlihat mengeluh, karena kemajuan di tanah sendiri mungkin akan terhambat akibat para terpelajar yang dibutuhkan justru memilih bermigrasi dan bukan membangun tanah-airnya.

Dalam tingkat pendidikan lebih tinggi, didapati catatan, perempuan pribumi pertama dan kedua yang lulus dari sekolah dokter jaman Belanda, STOVIA dan merengkuh gelar dokter berasal dari Minahasa, berturut-turut: september 1912 Marie Thomas lulus; 1914 Ann Warouw juga lulus (Hesselink, 2011: 220). Bahkan sebagaimana dikutip kutip dari Barten dan Stolk (1987), Marie Thomas juga menjadi wanita pribumi pertama yang menjadi Dokter Spesialis dalam bidang Obstetri dan Ginekologi (Hesselink, 2011: 220).

20 Ujian untuk menempati pekerjaan pemerintahan tingkat “rendah”. Mungkin saat ini bisa disetarakan dengan lulusan APDN (Akademi Pemerintahan Dalam Negeri)

Ada dua hal penting yang bisa kita petik dari perolehan pendidikan yang memadai bagi wanita Minahasa. Ini diperoleh setelah penjelasan di atas dan dihubungkan dengan tema relasi antara pekerja migran dan wanita dalam studi kita ini. *Pertama*, capain tersebut telah memungkinkan para wanita dikerjakandisebar atau bermobilisasi dalam bidang-bidang yang membutuhkan keahlian pendidikan formal di seluruh Hindia Belanda. Ambil misal, sebagai-mana telah kami kutip pada sub-bab sebelumnya: bukan hanya pemuda tetapi juga pemudi yang dikirim ke pulau Jawa untuk dididik dan dipekerjakan menjadi paramedis pribumi atau *dokter djawa* (Schoute, 1936; Winter, 1974 dan De Clerq 1871 dalam Schouten, 1998: 116); juga kecenderungan wanita berpendidikan Minahasa untuk bekerja di luar tanah airnya (Ratulangie, 1914). *Kedua*, kita dapat mengambil pelajaran sebagai-mana ditulis Schouten (1998: 121), bahwa banyaknya wanita Minahasa mencapai gelar akademik setelah tahun 1900 telah mendorong pandangan baru di Hindia Belanda mengenai konstruksi gender dan membuka lebih banyak peluang pendidikan. Posisi pijak yang memberi kita masukan dalam menatap posisi strategis wanita sebagai pekerja produktif. Bukan sekedar pelengkap sebagaimana jamak pandangan orang Indonesia.

Beralih pada masa pasca-kemerdekaan. seperti kita ketahui bahwa orang Minahasa merupakan individu dengan gaya hidup paling kosmopolit (Tirtosudarmo, 2005: 110) dan kemudian terlanjur ditempelkan identitas negatif yang terlampau kebarat-baratan (Ulaen, 2002: 407-408), tentu kaum wanita juga terkena tempelan ini. Dalam bayangan identitas kebarat-baratan ini, wanita Minahasa digambarkan dan ditulis dalam banyak surat kabar identik dengan dunia pelacuran (Manoppo-Watupongoh, 1989: 44) serta cenderung diminati dalam pekerjaan di dunia hiburan karena wajah mereka yang cantik dan pembawaannya yang supel (Tempo, Agustus 2003 dalam Tirtosudarmo, 2005: 112). Ini, bagi beberapa

kelompok di Indonesia, secara peyoratif dihubung-hubungkan dengan moralitas Kristen dan barat yang mereka anggap rendah.

Kecenderungan tarikan untuk bekerja di dunia malam tersebut di atas, telah mendorong migrasi pekerja wanita terutama ke Jakarta, Bali, Papua dan Batam. Oleh pihak pemerintah dan kepolisian, ini dikategorikan kejahatan *Trafficking* atau penjualan manusia, tentu jika ada "penjualnya" (Tiwa-Rotinsulu dan Kapa-hang-Kaunang, 2005; Gandhi-Iapian dan Geru, 2006). Berita seperti ini dapat kita baca dalam media cetak lokal yang cukup ramai menyajikannya. Contohnya, pada bagian depan surat kabar harian Manado Post, Rabu 3 Oktober 2012, dapat dibaca reportase me-nge-nai Wanita Manado atau Minahasa yang kemudian menjadi terkenal lekat dengan pekerjaan dunia prostitusi, dimana artikel tersebut diberi judul "Dari Tari Telanjang Sampai Jual Perawan" (Manado Post, Rabu 3 Oktober 2012)

Pengalaman terlampau melekatnya identitas yang tidak baik ini pun pernah kami jumpai di Batam. Dalam sebuah seminar kecil mengenai kebudayaan Sulawesi Utara pada bulan Mei 2009, seorang peserta mempertanyakan identitas wanita Minahasa yang identik dengan pekerjaan dunia malam. Suatu preferensi, yang memang dapat kita lacak hingga masa Hindia Belanda, terutama di kota-kota pelabuhan-*rendezvous* (Hesselinck, 1987: 214). Ini menandakan bahwa identitas tersebut sudah demikian dikenal orang-orang bukan Minahasa. Sehingga mungkin, mendorong pemberian cap moral tertentu.

Bisa juga kita menengok kesaksian Tiwa-Rotinsulu (2005: 45) dalam tulisannya, ia menceritakan kisah seorang gadis Manado yang menggunakan pakaian mini di dalam pesawat yang dingin berAC dan ada seorang laki-laki dengan genit dan nada mengejek bertutur: perempuan Manado cantik-cantik ya bu?. Pengalaman itu meningkatkan kegelisahan penulisnya akan identitas dimaksud. Seolah, modal wajah cantik saja semakin menjustifikasi pandangan

populer dan negatif bagi "Menado" yang menjadi akronim dari "Menang Nampang Doang" (hanya menang wajah saja). Atau juga, semakin mengukuhkan cita rasa negatif pada bagian akhir akronim populer 4B yang metaforis itu, yaitu: belum lengkap jika mengunjungi Manado dan belum merasakan Bubur Manado; Boulevard; Bunaken; dan Bibir Manado.

Namun, terlampau terburu-buru rasanya jika menyimpulkan bahwa identitas di atas merupakan sebuah kebenaran absolut dan tak bisa dicari anti tesanya. Barangkali, hal itu hanya permainan antara *signified* dan *signifier* dan kita terjebak di dalamnya.

PENUTUP

Bertitik tolak dari penjelasan-penjelasan di atas adalah bagaimana kita memanfaatkan tulisan sederhana yang "tambal-sulam" ini un-tuk menjadi refleksi sebagai respon terhadap kenyataan-kenyataan yang melekat-beriringan dengan fenomena hidup wanita Minahasa. Fenomena mana kita berada disisinya dan hidup berdampingan dengannya. Individu, entitas sekaligus juga fenomena khas yang kesehariannya kemudian dikenal bukan hanya dalam tingkat kecerdasan dan pendidikannya yang tinggi, wajah-wajahnya yang rupawan atau nir-kekerasan saat menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (Pratiknjo, dkk., 2012). Tetapi sekaligus juga terlanjur melekat identitas yang cenderung negatif, chauvinistik, bahkan terkadang sarkastik-peyoratif.

Tentu itu tergantung bagaimana kita bersikap setelah membaca tulisan ini: mungkin kita akan kesal sejenak; atau sebagaimana kebiasaan kita di lembaga pendidikan, tulisan ini hanya jadi sekedar pemenuhan tanggung jawab akademik-administratif atau juga kita akan merenung seperti para ilmuwan yang haus ilmu pengetahuan dan mulai mencari-cari cara bagaimana kita akan bersikap pada fenomena ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Benson, Theodora, "Berkeliling Sulawesi Bersama Orang Belanda", di dalam George Miller (Penyusun), *Indonesia Timur Tempo Doeloe* [Terj.] (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012[1996]) hlm. 227-244
- Gandhi-Lapian, L. M. dan Hetty A. Geru, *Trafiking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif: Studi Kasus Sulawesi Utara* (Jakarta: YOI, 2006)
- _____, *Minahasa Negeri Rakyat dan Budayanya* [Terj.] (Jakarta: Grafiti, 1991 [1869])
- Hesselink, Liesbeth, "Prostitution: A necessary evil, particularly in the colonies: Views on prostitution in the Netherlands Indies", di dalam Elsbeth Locher-Scholten dan Anke Niehof (Eds.), *Indonesian Women in Focus* (Dordrecht: Foris Publication, 1987) hlm. 205-224
- _____, *Healers on The Colonial Market Native Doctors and Midwives in The Dutch East Indies* (Leiden: KITLV, 2011)
- Henley, David, "Nationalism and Regionalism in Colonial Indonesia: The Case of Minahasa", di dalam *Indonesia*, No. 55 (Ithaca: Southeast Asia Program Publications at Cornell University, 1993) hlm. 91-112
- _____, *Nationalism and Regionalism in Colonial Context Minahasa in the Dutch East Indies* (Leiden: KITLV, 1996)
- Kartini, Raden Adjeng, *Door Duisternis Tot Licht; Gedachten over en voor het javaansche volk* (Den Haag: Luctor et Emergo, 1912)
- Lapian, A. B., "Manusia Minahasa: Sejarah dan Adat Istiadatnya", di dalam E. K. M. Masinambow, et. al. (eds.), *Si Tou Timou Tumou Tou* (Jakarta: Kerukunan Keluarga Kawanua, 1991) hlm. 131-145

- Lundström-Burhoorn, Wil, *Minahasa Civilization A Tradition of Change* (Gothebörg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 1981)
- Manoppo-Watupongoh, "Wanita Minahasa", di dalam *Journal Research and Development Sam Ratulangi University*, Edisi Introductory Januari (Manado: Puslit Unsrat, 1989) hlm. 34-45
- _____, "Wanita Minahasa", di dalam E. K. M. Masinambow, et. al. (eds.), *Antropologi Indonesia, Majalah Antropologi Sosial dan Budaya*, Edisi Khusus No. 51 Thn. XVIII, Januari-April (Jakarta: Jurusan Antropologi FISIP UI, 1995) hlm. 64-74
- Miller, George (Penyusun), *Indonesia Timur Tempo Doeloe 1544-1992* [Terj.] (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012[1996])
- Okushima, Mika, "Churches and Indonesian Migrants in Japan: Institutional Background and Challenge" [tulisan dalam huruf kanji], di dalam *Intercultural Communication Studies*, No. 18 (Chiba: Kanda University of International Studies, 2006) hlm. 35-111
- Pratiknjo, Maria Heny, dkk., *Wanita Minahasa Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri* (Manado: MarIn CRC, 2012)
- Pudjiastuti, Tri Nuke, "The Dynamics of Indonesian Migrant Worker Under National and Local Policies: The Oarai Case", di dalam *Intercultural Communication Studies*, No. 17 (Chiba: Kanda University of International Studies, 2005) hlm. 79-104
- Ratag, Alvines, *Profil Perempuan Sulut Menuju Kesetaraan Gender* (Kerukunan Mahasiswa Manado di Jakarta, 2005)
- Ratulangie, G. S. S. J., "Het Minahassisch Ideaal", di dalam *Indische Vereeniging*, 3^e Bundel, No. 1., diterjemahkan Alva Supit

dan penambahan catatan kaki oleh W. J. Waworoentoe ('s Gravenhage, 1914)

Schouter, Mieke, "Wa'ilan and Bos: Status Seeking in Minahasa", di dalam Reimar Schefold (ed.), *Minahasa Past and Present Tradition and Transition in an Outer Island Region of Indonesia* (Leiden: Research School CNWS, 1995) hlm. 7-21

_____, *Leadership and Social Mobility in a Southeast Asian Society Minahasa in 1677-1983* (Leiden: KITLV, 1998)

Swazey, Kelli A., *Carrying Culture And Re(Creating) Nation Through Christianity: Minahasa Culture and Identity In Transnational Indonesian Churches In New England* (Master of Arts Thesis In University of Hawai'i, 2008)

Tirtosudarmo, Riwanto, "The Making of a Minahasan Community in Oarai: Preliminary Research on Social Institutions of Indonesian Migrant Workers in Japan", di dalam *Intercultural Communication Studies*, No. 17 (Chiba: Kanda University of International Studies, 2005) hlm. 105-138

_____, *Mencari Indonesia 2: Batas-batas Rekayasa Sosial* (Jakarta: YOI dan LIPI, 2010)

Tiwa-Rotinsulu, Deetje dan Augustien Kapahang-Kaunang (eds.), *Perempuan Minahasa Dalam Arus Globalisasi* (Jakarta: Meridian, 2005)

Tiwa-Rotinsulu, Deetje, "Pengaruh Glabalisasi Bagi Kehidupan Perempuan", di dalam Deetje Tiwa-Rotinsulu dan Augustien Kapahang-Kaunang (eds.), *Perempuan Minahasa Dalam Arus Globalisasi* (Jakarta: Meridian, 2005) hlm. 29-53

Ulaen, Alex, "Kembara Budaya dan Diaspora: Amatan (dari) Luar", di dalam Roy E. Mamengko (Ed.), *Etnik Minahasa Dalam Akselerasi Perubahan: Telaah Historis-Teologis-Antropologis* (Jakarta: Sinar Harapan, 2002) hlm. 400-411

Wallace, Alfred Russel, *The Malay Archipelago* (Singapore: Periplus, 2010[1869])

Sumber lain:

Manado Post, Rabu 3 Oktober 2012

BAGIAN 5

NILAI BUDAYA SUKU BANGSA MINAHASA

Minahasa, suku bangsa yang kemudian pandangan-pandangannya menjadi budaya dominan dalam pergaulan sehari-hari di lokasi penelitian, memberikan fondasi nilai dalam kehidupan sosial di Airmadidi. Nilai-nilai tersebut, akhirnya menempatkan masyarakat adaptif dan toleran dengan masyarakat pendatang. Kondisi ini terjadi karena pola sosial masyarakat setempat, mampu membentuk jaringan multikulturalisme dan toleransi akibat dari rasionalisasi kesadaran akan adanya hakekat interdependensi kultural dengan sesama.

Hasil observasi menunjukkan hubungan mendalam antar budaya berbagai masyarakat yang terjadi sebagai akibat adaptasi kultural dengan nilai budaya lokal. Dalam hal ini, suku bangsa "pemilik lahan" yang dominan kuantitas, yaitu Minahasa memiliki nilai budaya ideal yang adaptif dan berkembang secara alamiah seiring proses interaksi serta diterima dengan baik oleh masyarakat pendatang (bukan orang Minahasa). Pahlawan nasional asal Minahasa Dr. Sam Ratulangi berdasar pada kearifan hidup masyarakat Minahasa, menyimpulkan falsafah hidup yang dikenal dengan "Sitou Timou Tumou Tou" artinya "Manusia hidup memanusiaikan manusia lain". Eksistensi falsafah hidup yang menjadi nilai budaya Minahasa tersebut, saat ini tidak hanya

dihidupi oleh sang “pemilik lahan” namun juga oleh para “tamu” dan “pendatang”.

Berhubung dengan nilai budaya lokal yang berkembang sebagai pedoman kehidupan, penulis menggarisbawahi enam nilai budaya, yang berdasarkan fakta lapangan sangat segar di pikiran masyarakat Airmadidi secara keseluruhan dan menjadi kontekstual dalam kehidupan interaksi sehari-hari, yaitu :

1. *Falsafah Hidup :*

a. *Sitou Timou Tumou Tou*

Artinya, manusia hidup memanusiakkan manusia lain. Anggapan umum menilai, falsafah ini ditelorkan oleh Dr. Sam Ratulangi, yang tepat sebenarnya, beliau menyimpulkannya dari realitas kehidupan suku bangsa Minahasa yang toleran, saling membangun, akrab dengan sesama serta saling menghargai segala bentuk perbedaan yang melewati sekat-sekat perbedaan kronis sebagai penghambat berkembangnya multikulturalitas. Dahulu, falsafah ini sangat nampak muncul pada proses adaptasi antara pengungsi “Perang Jawa” (1825-1830) dan masyarakat Tondano, Minahasa, dalam masa pembuangan salah satu panglima perang Pangeran Diponegoro, Kyai Modjo bersama pengikutnya, dimana proses adaptasi tersebut terus berlangsung sampai saat ini. Rasa saling terbuka dan menerima perbedaan, membuat masyarakat Jawa yang tinggal dalam pembuangan tersebut dengan berani melabeli diri mereka dengan sebutan *Niyaku Toudano* (aku orang Tondano), yang kemudian dalam tahun-tahun berikutnya, keturunannya membangun pemukiman di wilayah Airmadidi, yang menambah kaya kualitas toleransi dengan sesama di wilayah tersebut.

Saat ini, falsafah hidup tersebut tidak hanya milik orang Minahasa, sebagai penduduk asli Airmadidi. Namun juga, oleh

semua penduduk kota dari berbagai latar belakang jenis kelamin, etnis, agama, pekerjaan dan sebagainya. Falsafah ini menjadi tameng utama penangkal konflik dan kemungkinan disintegrasi. Saling membantu, saling hidup menghidupi dalam berbagai bentuk tanpa memperdulikan perbedaan terlihat dari kehidupan masyarakat yang bisa saling mawas diri akan ancaman konflik. Berbagi dengan yang kekurangan, saling mendukung dalam kehidupan sosial serta mentoleransikan adat dan agama yang berbeda, jadi suasana sejuk yang terlihat dalam realitas kehidupan masyarakat.

b. Torang Samua Basudara (kita semua bersaudara)

Pada awalnya, slogan yang sekarang berubah menjadi nilai budaya ini, ditelorkan oleh mantan Gubernur Sulawesi Utara Letjen (Purn) E. E. Mangindaan untuk jadi senjata perekat dalam menghindari konflik SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan) yang meluas di Indonesia bagian Timur (1998-1999), agar rasa persatuan dan kesatuan masyarakat tetap merekat. Sejak ditelorkan, slogan ini menjadi ikon hidup masyarakat Sulawesi Utara dan Airmadidi pada khususnya. Wujud nyatanya, dalam bidang pendidikan, umat Islam sering sekolah di yayasan pendidikan Kristen dan tetap mampu berinteraksi secara sehat tanpa menghilangkan ciri identitas agamanya. Dalam bidang sosial lain, kita akan sangat terkesima karena kagum, melihat bagaimana masyarakat saling berinteraksi dan membantu untuk saling menjaga ketika hari raya besar keagamaan. Masyarakat Airmadidi menganggap tiap manusia sebagai saudara yang harus diakui keberadaannya serta tetap saling mendukung dalam kegiatan positif. Kaya, miskin, Islam, Kristen, Bugis, Jawa, Batak dan segala bentuk stratifikasi sosial serta identitas primordial tidak menjadi penghalang untuk tumbuh berkembangnya slogan ini menjadi kata-kata yang dihidupi masyarakat.

2. *Budaya Mapalus (kerjasama)*

Pada masyarakat Minahasa, *mapalus* dilakukan sebagai usaha saling membantu dalam mengerjakan ladang. Saat ini, pemerintah mengadopsinya terutama ke dalam organisasi BKSAUA (Badan Kerjasama Antar Umat Beragama) dan BAMAG (Badan Musyawarah Antar Umat Beragama) serta FKUB (Forum Komunikasi Antar Umat Beragama) yang bertugas bekerjasama membangun komunikasi dua arah antara pemimpin agama dengan umat. Ketiga organisasi ini dibangun dengan komposisi keterwakilan dari seluruh latar belakang agama yang ada. Secara khusus untuk BKSAUA, pengurusnya dibentuk hingga ke tingkat desa. Dengan begitu, organisasi ini memiliki massa pendukung yang notabene berlainan agama dan tentu saja berlainan etnis. Organisasi masyarakat yang turut menjadi bagian dari usaha membangun komunikasi ini adalah GP Ansor, Brigade Manguni, Legiun Christum, Paguyuban Kekeluargaan Tionghoa dan organisasi yang membawa etnis serta agama sebagai identitas. Hasilnya, timbul persepsi yang sama mengenai pentingnya harmoni yang dibangun atas dasar toleransi dan kedamaian. Aksi simpatik yang sering dilakukan oleh para pemeluk beda agama adalah saling menjaga keamanan dan kelancaran sekaligus membagikan bunga pada saat ibadah Natal di gereja dan pelaksanaan Sholat Ied ketika Idul Fitri. Pemandangan "indah" tersebut telah berlangsung sejak lama, sebelum konsep tentang toleransi, kedamaian, identitas dan multikulturalisme mulai hangat dibicarakan di Indonesia ketika konflik horzontal mulai pecah pada akhir masa pemerintahan Orde Baru.

3. *Budaya Demokrasi.*

Jauh sebelum Indonesia merdeka dan menjalankan sistem demokrasi modern dalam pemerintahannya. Minahasa telah

mbangun fondasi demokrasi yang kokoh. Hal ini, nampak dari k adanya raja dalam pemerintahan lokal masyarakat Minahasa sa lampau. Tiap kelompok masyarakat, dipimpin oleh "kepala ak" yang merupakan perpanjangan lidah dari warganya. Dalam agambilan keputusan strategis, seperti pembagian wilayah, a kepala walak melaksanakan musyawarah yang merupakan del demokrasi ideal dan paling dihargai oleh masyarakat ahahasa. Bahkan, bangunan fondasi tersebut telah ada ketika ahasaan Raad (Dewan Rakyat Minahasa) menjadi dewan rakyat ama di Indonesia yang akhirnya merupakan cikal bakal ks Raad (DPR Indonesia jaman Hindia Belanda). Mknanya am pembangunan toleransi di Airmadidi, hal ini adalah alat emodasi antar masyarakat terhadap kebutuhan untuk bebas ekspresi sesuai model kebudayaan yang dianutnya, tanpa perlu rasa tersisih dari kelompok masyarakat yang lain. Dengan itu, warga "pendatang" akan merasa nyaman, sebab diapresiasi n dihargai. Apalagi, kebutuhan akan kedamaian yang didasari ngangat toleransi menjadi tersalurkan dan tidak perlu dengan oses homogenisasi dari kebudayaan mayoritas pada minoritas. rena, melalui proses demokrasi yang sehat perbedaan justru naklumkan untuk hidup dan dipahami sebagai keselarasan ta kebijaksanaan dalam bermasyarakat.

Budaya Anti Diskriminasi

Pada tatanan sosial masyarakat Minahasa, diskriminasi, apapun tuktunya adalah haram. Dalam kehidupana bermasyarakat, warga emadidi tidak terlalu memperhitungkan masalah mayoritas- noritas, orang asli dan pendatang, semua mendapatkan posisi n peluang yang sama untuk berkembang dan berekspresi. Bukti nihnya saat ini, para pendatang mendapat tempat dan merasa an serta nyaman berjualan di pasar Airmadidi tanpa merasa anya diskriminasi, karena masyarakat pendatangnya yang

justru “menguasai” pasar. Intinya, keterbukaan yang menimbulkan pengakuan terhadap perbedaan, dengan sendirinya akan terimbangi oleh pengakuan terhadap kualitas hidup tiap manusia bukan karena identitas primordial yang alami melekat, namun, oleh usaha dan kerja keras. Sehingga, keterbukaan berekspresi menjadi salah satu pintu gerbang utama dalam membangun kerukunan.

5. *Budaya Silaturahmi*

Budaya ini menjadi salah satu perekat kerukunan hidup dalam perbedaan. Tiap orang merasa dihormati dan diakui keberadaannya sebagai manusia. Selain itu, kebiasaan yang menjadi budaya ini, mematahkan eksklusivisme etnis dan religi. Tidak hanya berlaku untuk hari besar keagamaan, kebiasaan saling mengunjungi nampak juga dalam kegiatan adat seperti Cap Go Meh, Tulude, hari raya *Ba'do* Ketupat (hari raya ketupat), Pengucapan Syukur dan lain-lain. Gambaran betapa pentingnya komunikasi harus dijalankan dalam kerjasama dan silaturahmi, menunjukkan betapa indahnyanya hidup rukun dalam kedamaian.

6. *Nilai Rasionalitas*

Sebelum pemberlakuan politik etis di Indonesia, dengan didirikannya sekolah-sekolah, pendidikan formal hingga ke tingkat SMP (MULU) telah dicecep oleh masyarakat Minahasa sejak pertengahan abad ke-19. Bahkan hingga saat ini, masyarakat yang tidak pernah mencecap bangku pendidikan hampir tidak ada di Minahasa. Dan berdasarkan penjelasan nilai-nilai budaya di atas, kita dapat melihat bagaimana rasionalitas dijunjung tinggi, sehingga masyarakat mampu memilah untuk kapan bersikap pada domain privat dan domain publik. Apalagi, masyarakat secara logis sadar, bahwa konflik dapat berakibat buruk dan melahirkan kerugian material-ekonomi dan psikologis serta membangkitkan

prasangka buruk pada anggota masyarakat yang berbeda etnis dan agama.

Keenam nilai budaya tersebut, memperlihatkan toleransi di Airmadidi sebagai suatu kenyataan sosial di tengah kemelut konflik yang melanda Indonesia dan menitikberatkan pada isu SARA. Pada tataran aplikasi, nilai-nilai toleransi, persaudaraan dan multikulturalisme tidak bercerita tentang inklusivisme absolut. Melainkan inklusivisme relatif, sehingga masyarakat mampu memberi batasan yang antara domain privat dan domain publik. Pengakuan eksistensi, pemakluman, pemberian kebebasan berkembang bagi hak-hak primordial, ajaran dogmatis sebagai domain privat menjadi keyakinan masyarakat Airmadidi. Seiring sejalan dengan itu, atmosfer keterbukaan, saling menerima perbedaan serta hidup damai dalam interaksi dengan sesama adalah sesuatu yang terus diusahakan dan dijaga keberlangsungannya.

BAGIAN 6

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MINAHASA DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM

PENDAHULUAN

Persoalan lingkungan adalah isu masa kini yang ngetren ketika masyarakat dunia menghadapi berbagai bencana yang berkesinambungan yang tak bisa dihalangi oleh manusia. Isu utama saat ini adalah konsidi pemanasan global yang terus melaju menimbulkan perubahan situasi iklim yang kian tidak menentu sehingga membahayakan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Situasi negative lingkungan bumi ini merupakan efek yang ditimbulkan akibat ketidakseimbangan ekologis dimana manusia sebagai faktor utama penyebabnya. Berkaitan dengan pemanfaatan hutan yang tidak terkendali, lahan pertanian, teknologi, dan lainnya yang kesemuanya tidak ramah lagi terhadap lingkungan. Pengeksploitasi Lingkungan karena terakumulasinya kebutuhan manusia dan kompromi politik berakibat pada terjadi ketidakseimbangan ekologis.

Beberapa tahun terakhir ini penjarahan hutan atau penebangan liar di kawasan hutan makin marak terjadi dimana-mana seakan-akan tidak terkendali. Ancaman kerusakan hutan ini jelas akan menimbulkan dampak negatif yang luar biasa besarnya karena adanya efek domino dari hilangnya hutan, terutama pada kawasan-

kawasan yang mempunyai nilai fungsi ekologis dan biodiversitas besar. Akibat dari kejadian ini tidak saja hilangnya suatu kawasan hutan yang tadinya dapat mendukung kehidupan manusia dalam berbagai aspek misal kebutuhan akan air, oksigen, kenyamanan (iklim mikro), keindahan (wisata), penghasilan (hasil hutan non kayu dan kayu), penyerapan carbon (*carbon sink*), pangan dan obat-obatan akan tetapi juga hilanglah biodiversity titipan generasi mendatang.

Saat ini di dunia internasional telah berkembang trend baru melalui perdagangan karbon (CO₂). Perdagangan karbon diawali dengan disepakatinya *Kyoto Protocol* bahwa Negara-negara penghasil emisi karbon harus menurunkan tingkat emisinya dengan menerapkan teknologi tinggi dan juga menyalurkan dana kepada negara-negara yang memiliki potensi sumberdaya alam untuk mampu menyerap emisi karbon secara alami misalnya melalui vegetasi (hutan). Indonesia dengan luas hutan tersebar ketiga di dunia, bisa berperan penting untuk mengurangi emisi dunia melalui *carbon sink*. Hal ini bisa terjadi jika hutan yang ada dijaga kelestariannya dan melakukan penanaman (*afforestasi*) pada kawasan bukan hutan (*degraded land*). Serta melakukan perbaikan kawasan hutan yang rusak (*degraded forest*) dengan cara penghutanan kembali (*reforestasi*).

Hutan dengan penyebarannya yang luas, dengan struktur dan komposisinya yang beragam diharapkan mampu menyediakan manfaat lingkungan yang amat besar bagi kehidupan manusia antara lain jasa peredaman terhadap banjir, erosi dan sedimentasi serta jasa pengendalian daur air.

Satu lagi bahwa berkaitan dengan hutan keanekaragaman hayati merupakan bagian dari komponen yang secara ekologis berperan sebagai penentu keseimbangan ekosistem yang penting bagi kehidupan, terutama dalam penyediaan kebutuhan keanekaan bahan hayati dan penyediaan jasa lainnya. Dengan demikian

keanekaragaman hayati merupakan salah satu penopang utama kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Keanekaragaman hayati adalah keadaan beragamnya ekosistem, jenis dan variabilitas genetika binatang, tumbuh-tumbuhan dan mikroorganisme yang hidup. Setiap individu organisme mengandung ribuan gen dengan kombinasi yang unik, sementara jenis atau spesies terdiri dari banyak organisme. Ekosistem merupakan kumpulan dari banyak spesies yang berinteraksi satu sama lainnya dan dengan lingkungan fisik.

Pelestarian keanekaragaman hayati menjadi sangat penting demi termanfaatkannya secara benar dan berkelanjutan. Kenyataannya sekarang pelestarian tersebut masih belum terlaksana dengan baik. Ancaman yang paling utama dalam pelestarian ekosistem hutan adalah pemerosotan dan kerusakan ekosistem hutan akibat penebangan ilegal, fragmentasi, dan konversi hutan untuk pemanfaatan lain.

Indonesia merupakan negara pengeksport terbesar dalam perdagangan spesies liar di Asia Tenggara dan merupakan salah satu pengeksport terpenting di dunia. Oleh karena itu, peranan Indonesia dalam penanganan perdagangan spesies liar menjadi perhatian dunia internasional. Indonesia berkepentingan terhadap Konvensi CITES dengan meratifikasi Konvensi tersebut pada tanggal 15 Desember 1978 melalui Keppres No. 43/1978. Pada tanggal 14 Januari 1987, Indonesia juga meratifikasi Amandemen 1979 atas *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973* (CITES) melalui Keppres No. 1 Tahun 1987.

Dalam hal pertanian, turut juga menyumbang efek negatif terhadap kerusakan lingkungan. Dimana pengelolaan pertanian dengan teknologi yang tidak ramah lingkungan sangat membahayakan, penggunaan pupuk kimia berlebihan, pestisida, sampai eksploitasi pertanian yang menguras kesuburan tanah. Praktik

ini karena mengejar kuantitas produksi hingga mengabaikan keseimbangan ekologis. Lebih parah ketika revolusi hijau digalakkan di seluruh dunia, yang mengupayakan sebesar-besarnya lahan-lahan untuk ditanam padi dalam sistem monokultur yang sebenarnya berefek negatif kepada pemanfaatan unsur hara berlebihan, dan ekosistem yang terganggu.

Kebijakan pembangunan yang baik seharusnya mengandung 3 unsur yaitu *ecological security*, *livelihood security*, dan *food security*. Suatu *sustainable agriculture* adalah suatu sistem pertanian yang mendasarkan dirinya pada pemanfaatan sumber alam (tanah, air dan keanekaragaman hayati) secara lestari. Konsep Pertanian Berkelanjutan ini sesuai TAC/CGIAR 1998 menyatakan pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Keanekaragaman hayati merupakan kekuatan petani dalam upaya melestarikan ketahanan pangan. Keanekaragaman hayati dapat menjadi sumber alternatif dalam penganeekaragaman jenis-jenis tanaman budidaya.

Namun di bawah pengelolaan negara, pertanian tidak memberikan kebebasan kepada para petani, seperti ketika pemerintah memaksa petani untuk menanam padi, demi keberhasilan program swasembada pangan. Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, ketika negara tidak lagi mencampuri urusan pengembangan sector pertanian, negara tidak mengembalikan kekuasaan dan fungsi petani untuk mengatur usaha pertanian mereka, tetapi justru memfasilitasi penyerahan kekuasaan sumber-sumber alam, sistem produksi, serta sistem pemasaran dan perdagangan kepada perusahaan agribisnis global.

Suatu masalah yang dihadapi oleh para petani di nagara-negara yang sedang berkembang adalah usaha lain mereka

semakin tergantung kepada teknologi pertanian modern yang tidak ramah lingkungan. Perubahan yang cepat dan meningkat dalam kondisi ekonomi, teknologi, dan demografi memerlukan perubahan yang meningkat dan cepat pula dalam sistem pertanian petani kecil. Peluang pasar baru, promosi *input* kimia, dan kendala keuntungan bias mengakibatkan atau memaksa petani mengupayakan keuntungan jangka pendek dan sedikit memberikan perhatian untuk menjaga pertanian mereka tetap seimbang dengan kondisi ekologi.

Hal utama yang menjadi sumber masalah adalah hilangnya pengetahuan dan kearifan lokal yang telah teuji sejak jaman dahulu dimana masyarakat mengembangkan sistem pertanian yang selaras dengan alam. Dalam masyarakat tradisional menyeimbangkan antara manusia dengan lingkungannya karena dalam keyakinannya lingkungan alam sekitar merupakan bagian tak terpisahkan dari dirinya, malahan alam diyakini sebagai kedimana sang pencipta. Tingginya kearifan lokal dan kreatifitas lokal masyarakat telah terabaikan dengan input luar yang diterima secara mentah, tidak melewati proses yang menjadikannya input dari dalam masyarakat.

Sehingga, nampaknya pertanian organik menjadi pertanian alternatif saat ini. Pertanian organik mengembalikan keanekaragaman hayati lingkungan pertanian, produksi yang terjangkau secara ekonomis, menghasilkan kualitas tanaman yang baik, tidak mengeksploitasi alam, dan mengembalikan kearifan tradisional masyarakat.

Kearifan tradisional adalah pengetahuan secara turun-temurun yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengelola lingkungan hidupnya, yaitu pengetahuan yang melahirkan perilaku sebagai hasil dari adaptasi mereka terhadap lingkungan yang mempunyai implikasi positif terhadap kelestarian lingkungan, Purnomohadi (1985). Bagi masyarakat adat, kearifan tradisional merupakan

peraturan yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi. Kepatuhan ini ada karena kearifan tradisional berakar kuat dalam kebudayaan mereka dan mendarah daging dalam keseharian hidup mereka.

Masyarakat lokal yang hidup seimbang berdampingan dengan alam memiliki pengetahuan yang diwariskan turun-temurun tentang bagaimana memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa merusak alam. Hal ini didukung oleh pendapat Nygrin (1999) dalam Shohibuddin *"A local community who lives in ecological balance with nature, is regarded as an environmental expert and the keeper of the wisdom of an equitable and sustainable traditional resource management sistem"*. Berdasarkan hal itu akan dicari tahu secara mendalam khususnya pada masyarakat adat Toro yakni apakah masyarakat adat Toro, apa dan bagaimana kearifan lokal dalam pengelolaan hutan dan pemanfaatan sumberdaya alam? Bagaimanakah kearifan lokal tersebut bisa bertahan?

ASAL USUL SUKU MINAHASA

Asal usul orang Minahasa masih misteri saja, namun beberapa penyelidikan telah memaparkan berbagai versi asalnya. Beberapa pendapat para ahli diantaranya A. L. C Baekman dan M. B Van Der Jack bahwa orang Minahasa berasal dari ras Mongolscheplooi yang sama dengan pertalian Jepang dan Mongol ialah memiliki lipit Mongolia. Bangsa Mongol terkenal dengan dengan gaya hidup berperang sampai dapat menguasai setengah wilayah dunia pada saat dipimpin oleh Genghis Khan, dan bangsa Mongol menyebar tidak terkecuali pergi ke Tanah Minahasa. Ada persamaan Minahasa dengan Mongol dalam sistem kepercayaan dapat dilihat pada agama asli Minahasa Alifuru dalam praktek Shamanisme sama seperti Mongol. Dan mengenal juga pemimpin agama Walian. Agama Shamanisme ini memang dipegang teguh secara turun temurun oleh suku Mongol.

Cerita turun temurun legenda Toar Lumimuut lebih memperkuat tesis diatas, bahwasannya Lumimuut sebagai putri kaisar Tiongkok yang menjalin hubungan dengan panglima perang dari Mongol. Karena hubungan tersebut tidak direstui, maka sang putri diusir menuju tanah Minahasa, anaknya yang bernama Toar, lambat laun ketika dewasa, mereka dalam keadaan terpisah sampai kembali bertemu, akhirnya di nikahkan oleh Karema seorang pendamping Lumimuut yang dikirim pihak kerajaan. Turunan Toar Lumimuut ini yang menjadi orang Minahasa sekarang ini. Nenek moyang orang Minahasa dalam perkembangan telah bercampur atau kawin mawin dengan bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugis, dan Belanda yang diketahui berketurunan Yahudi. Belanda Yahudi yang masuk ke Indonesia hanya mendirikan satu tempat ibadah di Indonesia yakni Sinagog di Tondano. Jadi asalnya suku Minahasa dari Mongol yang terkenal dengan kehebatan perang, dan Yahudi yang terkenal dengan kecerdasannya.

Dahulunya Minahasa dikenal dengan nama Malesung, dan kata Minahasa sendiri berasal dari kata Minaesa yang berarti menjadi satu, ini merujuk dari musyawarah-musyawarah tertinggi di Minahasa dulu dalam rangka menyelesaikan perselisian atau konflik antar mereka, membagi batas-batas wilayah sub etnik, dan membicarakan persatuan menghadapi musuh dari luar. Tapi untuk pertama kali nama Minahasa muncul dalam laporan Residen J. D Schierstein, tanggal 8 Oktober 1789, yaitu tentang perdamaian yang telah dilakukan oleh kelompok sub-etnik Bantik dan Tombulu (Tateli); demikian pula antara kelompok sub-etnik Tondano dan Tonsawang (Godee Molsbergen, 1928 : 53).

Sewaktu pemerintahan Belanda di wilayah nusantara, mereka melakukan pendekatannya dengan memasuki musyawarah para pemimpin anak suku, menghasilkan kesepakatan atau perjanjian persahabatan 10 Januari 1969. Momen ini menjadi awal hubungan Belanda dengan Minahasa bukan dalam hubungan menjajah

tetapi hubungan antar sahabat dan hubungan dagang. Ketika belanda mau melanggarnya, sang imperialis tersebut harus terjerumus dalam perang panjang yakni perang Tondano yang terjadi sampai tiga kali. Lepas dari ini, pengambil keputusan tertinggi di Minahasa adalah musyawarah seperti musyawarah watu pinawetengan (diperkirakan sekitar 670, musyawarah yang pertama), karenanya pihak belanda sendiri selalu menyebut Minhasa (persatuan/musyawarah) kepada masyarakat Malesung yang memiliki delapan sub etnis.

Jauh sebelumnya nenek moyang orang Minahasa bermukim awalnya di sekitar pegunungan Wulur Mahatus, dari sini mereka berkembang dan berpindah ke Mieutakan di sekitar gunung Tonderukan (daerah sekitar tompaso baru saat ini), dan menyebar lagi keseluruh wilayah tanah Minahasa saat ini. Berdasarkan cerita rakyatnya orang minahasa yang dikenal berasal dari keturunan pasangan Toar dan Lumimuut, yang dipercaya berasal dari turunan Mongolia dan Tiongkok. Pada waktu itu masyarakat dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu : Makarua Siow : para pengatur Ibadah dan Adat Makatelu Pitu : yang mengatur pemerintahan Pasiowan Telu : Rakyat. Pasiowan Telu melakukan pemberontakan, dan pada akhirnya seorang dari kelompok Makatelu Pitu yakni Muntuuntu menyatukan kembali seluruh komponen masyarakat dalam suatu musyawarah Watu Pinawetengan. Kisah Muntuuntu membuat pimpinan utama dari yang dihasilkan oleh musyawarah Minahasa dikemudian hari diberi gelar Muntuuntu

Wilayah minahasa hasil dari yang dikukuhkan dalam musyawarah Watu Pinawetengan dibagi dalam beberapa anak suku, yaitu: Anak suku Tontewoh (Tonsea) : wilayahnya ke timur laut. Anak suku Tombulu : wilayahnya menuju utara Anak suku Toulour : menuju timur (atep) Anak suku Tompekawa : ke barat laut, menempati sebelah timur tombasian besar. Pada saat itu belum semua daratan minahasa ditempati, baru sampai di garis

Sungai Kanoyapo, Gunung Soputan, Gunung Kawatak, Sungai Rumbia. nanti setelah permulaan abad XV dengan semakin berkembangnya keturunan Toar Lumimuut, dan terjadinya perang dengan Bolaang Mongondow. Perkembangannya anak suku Minahasa menjadi delapan yakni Tonsea, Tombulu, Toulour, Tountemboan, Tonsawang, Pasan, Ponosakan dan Bantik. Perkembangan anak suku ini dikukuhkan lagi dalam musyawarah adat Watu Pinawetengan.

Anak suku Minahasa menjadi pakasaan-pakasaan, sampai pada abad 19 dalam lembaran Negara Nomor 64 Tahun 1919, minahasa di jadikan daerah otonom. Pada saat itu minahasa terbagi dalam 16 distrik : distrik tonsea, manado, bantik, maumbi, tondano, touliang, tomohon, sarongsong, tombariri, sonder, kawangkoan, rumoong, tombasian, pineleng, tonsawang, dan tompaso. Tahun 1925, 16 distrik tersebut dirubah menjadi 6 distrik yaitu distrik Manado, Tonsea, Tomohon, Kawangkoan, Ratahan, dan Amurang. Sejalan dengan perkembangan otonomi maka tahun 1919, kota Manado yang berada di tanah Minahasa, diberikan pula otonom menjadi Wilayah Kota Manado.

Kemudian status kecamatan Bitung, berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 4 Tahun 1975 Tanggal 10 April 1975 telah ditetapkan menjadi Kota Administratif Bitung, dan selanjutnya pada tahun 1982 ditetapkan menjadi Kota Bitung, Usulan pembentukan kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon diproses bersama-sama dengan 25 calon Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia, dan setelah melalui proses persetujuan DPR-RI, maka Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon ditetapkan menjadi Kabupaten dan Kota Otonom di Indonesia melalui UU Nomor 10 tahun 2003 tertanggal 25 Pebruari 2003. Pada tanggal 21 Nopember 2003 dengan UU Nomor 33 Tahun 2003, Kabupaten Minahasa Utara ditetapkan menjadi daerah otonom yang baru. Dengan adanya Pemekaran tersebut maka wilayah minahasa

menjadi 3 (tiga) Kabupaten (Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Utara) dan 3 (dua) Kota (Kota Manado, Bitung dan Tomohon)

SISTEM PEMERINTAHAN

Sejak awal bangsa Minahasa tiada pernah terbentuk kerajaan atau mengangkat seorang raja sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintah adalah kepala keluarga yang gelarnya adalah Paedon Tu'a atau Patu'an yang sekarang kita kenal dengan sebutan Hukum Tua. Kata ini berasal dari Ukung Tua yang berarti Orang tua yang melindungi. Ukung artinya kungkung = lindung - jaga. Tua : dewasa dalam usia, berpikir, serta didalam mengambil Kehidupan demokrasi dan kerakyatan terjamin Ukung Tua tidak boleh memerintah rakyat dengan sewenang-wenang karena rakyat itu adalah anak-anak dan cucu-cucunya, keluarganya sendiri.

Di Minahasa tidak dikenal sistim perbudakan, sebagaimana lasimnya di daerah lain pada saman itu, seperti di kerajaan Bolaang, Sangir, Tobelo, Tidore dll. Hal ini membuat beberapa dari golongan Walian Makarua Siyow. Setelah cara tersebut dicoba diterapkan dimasyarakat Minahasa oleh beberapa walian/hukum tua timbul perlawanan yang memicu terjadinya pemberontakan serentak di seluruh Minahasa oleh golongan rakyat /Pasiyowan Telu, Alasannya karena, bukanlah adat pemerintahan yang diturunkan Opo Toar Lumimuut, dimana kekuasaan dijalankan dengan sewenang-wenang.

Akibat pemberontakan itu, talanan kehidupan di Minahasa menjadi tidak menentu, peraturan tidak diindahkan Adat istiadat rusak, Perebutan tanah pertanian antar keluarga Hal ini membuat golongan makarua/ makadua siow (tonaas) merasa perlu mengambil tindakan pencegahan dengan mengupayakan musyawarah raya yang dimotori oleh Tonaas-tonaas senior dari seluruh Minahasa di Watu Pinabetengan.

Bentuk masyarakat Minahasa pada zaman dahulu adalah bentuk Tribe. Bentuk masyarakat demikian dirinci oleh George Foster dkk dalam "Peasant Society" (1967) sebagai "Tribal System" atau kelompok masyarakat pedalaman yang pokok kehidupannya adalah ladang pertanian. Unit politiknya yang tertinggi adalah Walak. Pada zaman dahulu dapat saja seorang walak kepala sub-etriuk menjadi seorang Walian (pendeta religi pribumi) dan dalam fungsi seperti itu, kekuasaannya menjadi lebih mutlak.

Ia akan merupakan seorang yang dekat dengan alam, karena dia harus dapat dengan cepat menangkap gejala-gejala alam untuk mengatasi persoalan yang mungkin terdapat di wilayahnya. Jadi dia harus seorang yang dapat membaca gejala-gejala alam yang diberikan alam sekitarnya, dan seorang yang mengerti akan batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya. Seorang pimpinan dianggap seseorang yang memiliki "kete" atau kekuatan. Karena memiliki kekuatan ini, maka ia dapat diangkat menjadi pemimpin. Ia dapat dianggap yang terbaik diantara warga sederajatnya yang terdapat dalam wilayahnya. Oleh sebab itu ia menjadi unsur "primus inter pares" desanya. Dalam peran ini dia juga tidak boleh sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya, terutama dalam soal pembagian tanah, karena dia juga bisa dikenakan sanksi dari "Opo" atau semacam sanksi Ilahi. Ia dapat menjadi "wales" maka akibatnya berat. Ia akan mendapat nama jelek dan dikucilkan dari masyarakat, sebagai hukuman bagi si pemimpin (J. A. T. Schwrz, Tontemboancher Teksten : 1907:133,381). Dalam istilah moderen disebut "character assassination".

J. G. F Riedel sebagai seorang ahli pemerintahan pada tahun 1870 menilai pengangkatan kepala walak sebagai suatu yang khas di Minahasa. Riedel menulis sebagai berikut, "walaupun siapa saja di dalam wilayah itu, dapat dipanggil untuk memimpin pemerintahan yang dipilih oleh wakil-wakil/"ngaran" untuk menjadi

kepala (abakai oem banoea), tetapi dalam cara memilih mereka tidak sembarangan”.

BATU PINABETENGAN

Batu ini terdapat di daerah Tompaso, Minahasa Tengah, kira-kira 10 km masuk dari jalan raya Tompaso, dan terletak di lereng gunung Tonderukan, dekat gunung Soputan. Di pegunungan Tonderukan terdapat banyak batu. Menurut para ahli arkeologi batu-batu tersebut termasuk jenis “menhir”, yang dikenal sejak zaman pra sejarah dan termasuk tradisi “megalitik”.

Batu-batu seperti itu yang terdapat di lereng gunung Tonderukan menjadi tempat duduk untuk orang-orang mendengar bunyi burung. Salah satu batu yang letaknya lebih ke puncak dari batu pinabetengan dinamakan “kekeretan”, penduduk percaya bahwa itulah tempat duduk Opo Muntu Untu, bila ia turun maka disertai gemuruh yang dahsyat, dan biasanya turun ke gunung soputan sesudah itu baru ke gunung Tonderukan.

Bila dia hadir maka manguni akan memberitakannya. Terdapat pula batu yang lain yang dikatakan tempat duduk Opo Kopero. Opo Muntu Untu adalah utusan Yang Maha Tinggi, atau Kasuruan (Tuhan). Kasuruan akan menyuarakan pesannya melalui Manguni yang dilambangkan sebagai burung yang bijaksana.

Bunyi yang bagus disebut Maapi. Manguni dipelihara oleh Opo khusus yaitu Opo Mamarimbing. Oleh sebab itu Manguni disebut juga se kokok se Mamarimbing atau burungnya Opo Mamarimbing yang dalam religi pribumi adalah juru bicara Kasuruan. Batu Pinabetengan merupakan suatu bukti bahwa Minahasa tegah-lah dahulu menjadi pusat kebudayaan nenek moyang. Dari sini, kita melihat bahwa cerita “lumimuut dan Toar” memiliki keterkaitan yang erat hubungannya dengan cerita Batu Pinabetengan atau Batu pembagian wilayah untuk para sub-etnik. Setiap suku

atau sub-sub yang datang kemudian seperti Tonsawang, Pasan, Ratahan, dan Bantik harus mengakui ikrar yang dilakukan di batu Pinabetengan yaitu mereka adalah satu keturunan, dari Lumiuut dan Toar, akibatnya versi mitos Lumimuut dan Toar menjadi banyak, mencapai lebih dari 90 versi. Tetapi terdapat versi yang sama dalam setiap cerita yaitu terdapatnya tanah, air dan batu.

Dari seluruh cerita Batu Pinabetengan dapat disimpulkan bahwa, disitu adalah pusat dari religi pribumi. Kemudian batu itu menjadi simbol dari keseimbangan dari para sub-etnik yang datang kemudian. Jadi percampuran etnik untuk "Orang Minahasa" bukanlah sesuatu yang baru. Menerima etnik lain adalah suatu yang lumrah. Perlu dicatat bahwa Batu Pinabetengan itu diketahui pertamakali sebagai tempat pemujaan dari religi pribumi "Orang Minahasa" oleh J. G. Schwarz, penginjil *Nederlandsche Zendeling Genootschap (NZG)* yang bertugas di daerah Langouwan dan sekitarnya di tahun 1832.

4. Geografis

Minahasa adalah semenanjung yang terletak di bagian paling utara dari semenanjung pulau Sulawesi, yaitu antara 0 derajat 51' dan 1 derajat 51' 40" lintang utara dan antara 123 derajat 21' 30" dan 125 derajat 10' bujur Timur. Luas semenanjung adalah 5373 kilometer persegi. Iklim daerah Minahasa terpegaruh oleh angin muson. Pada bulan September sampai April, bertiup angin pembawa hujan lebat. Bulan Mei sampai November bertiup angin selatan ke barat laut. Curah hujan di daerah pedalaman Minahasa terhitung tinggi yaitu 4188mm pertahun dan jumlah curah hujan mencapai 195 hari. Suhu pesisir pantai agak tinggi, namun daerah pegunungan temperatur menunjukkan 26-27 derajat celsius pada musim hujan.

Jenis vegetasi yang paling dominan sekarang adalah pohon kelapa (*cocos nucifera*) yang terdapat sejak Zaman Portugis,

sedangkan sejak dahulu kala telah ada pohon scho (aranga sachariferum) sebagai pohon yang serba guna, dan sekarang yang menjadi tanaman favorit adalah Cengkih dan Vanili. Kuda (kawalo) telah dikenal penduduk sejak zaman Spanyol sedangkan sapi didatangkan dari Benggala, India sejak zaman V. O. C (Tjahaja Siang, Januari 1870).

Topografi dan iklim

Minahasa dengan luas 4.167.87 km² adalah daerah yang paling padat penduduknya dan yang paling maju di propinsi Sulawesi Utara. Hanya 20% tanahnya yang masih berhutan, dan kepadatan penduduknya sudah mencapai 300 orang per km² - kurang dari setengah kepadatan penduduk di Pulau Jawa, tapi tetap masih sangat tinggi. Daerah Minahasa bergunung-gunung, dengan pesisir pantai yang sempit, dan dataran tinggi, dimana sawah irigasi memberikan hasil yang berlimpah. Minahasa mendapat curah hujan yang tinggi dan pohon cengkeh tumbuh subur di tanah perbukitan, demikian pula sayur-sayuran seperti kentang, wortel dan kol.

Mata Pencaharian

Pertanian

Pertanian masih merupakan sumber kesejahteraan bagi penduduk Minahasa. Padi adalah tanaman pokok yang menarik bagi orang di luar Minahasa. Kopi merupakan tanaman yang penting di abad ke 19, tapi kopra, minyak kelapa, dan hasil-hasil tambahannya adalah sumber mata pencaharian yang utama saat ini.

Sebagian besar petani menanam pohon kelapa, tapi pohonnya sudah tua dan kurang dirawat secara maksimal, serta membutuhkan peremajaan. Belakangan ini, cengkeh banyak menguntungkan. Istilah "demam cengkeh" menggambarkan suasana

di tahun 1970-an, ketika setiap orang menanam, memanen dan memperdagangkannya. Cengkeh banyak di ekspor ke Jawa untuk digunakan sebagai bahan pelengkap di dalam rokok kretek. Pohon cengkeh yang tinggi, diambil daunnya untuk diperas menjadi minyak cengkeh dan digunakan sebagai obat untuk menghilangkan penyakit gigi, dll.

Tanaman rempah-rempah juga merupakan tanaman yang penting, misalnya pala dan vanili. Kangkung, sayuran yang banyak digemari orang dan harganya murah juga tumbuh subur. Jagung, ubi kayu dan beras adalah tanaman penting lainnya di Minahasa.

Laut di seputar Minahasa sangat kaya akan spesies ikan tuna. Sebuah pelabuhan yang dilengkapi dengan fasilitas modern telah dikembangkan di pantai timur laut, tapi masih banyak penangkapan ikan dilakukan dengan perahu kecil. Ikan air tawar banyak yang diperoleh dari danau Tondano atau dikembangbiakkan di tambak-tambak ikan. Usaha pabrik kecil, yang sebagian besar memproses hasil-hasil produksi pertanian seperti kelapa, banyak ditemukan di daerah ini, khususnya di wilayah Manado - Bitung.

Peternakan

Minahasa memiliki potensi peternakan yang bagus dengan jumlah ternak babi 102,851 ekor, ayam 4,365,085 ekor 46,986 ekor, itik 141,141 ekor, kuda 9,532 ekor dan kambing 9,446 ekor.

Sapi

Sapi Ongole dan Bali banyak dipelihara di Minahasa dengan tiga tujuan, yaitu: sebagai tenaga tarik, termasuk untuk membajak dan alat angkutan; urusan sosial dan adat -karena dapat diuangkan untuk membayar biaya rumah sakit atau dimanfaatkan dagingnya untuk acara perkawinan, pemakaman, atau acara lainnya; dan sebagian kecil dipelihara untuk tujuan ekspor. Sapi pedaging biasanya dibiarkan

mencari makan di bawah pohon kelapa, sementara sapi untuk tenaga tarik biasanya dibiarkan mencari makan di sekitar jalanan atau disawah setelah panen dan kemudian dibawa masuk ke kandang pada malam hari.

Babi

Daging babi banyak dikonsumsi oleh penduduk di Minahasa yang sebagian besar memelihara sekurang-kurangnya satu ekor per keluarga. Babi lokal biasanya mendapat makanan di sekitar rumah dan diberi makan sisa-sisa dapur dan tanaman seperti jagung, jerami, dll. Beberapa petani yang lebih berpengalaman memelihara babi, biasanya memelihara antara 10 sampai 20 ekor babi dari bibit yang lebih unggul dan memberi makanan konsentrat dan sisa-sisa pengolahan jagung dan padi. Kedua jenis babi ini dijual, dipotong atau dikonsumsi sendiri. Sejak tahun 1995/1996, jumlah babi menurun secara drastis, setelah terjangkitnya penyakit 'swine fever', dan petani takut memelihara babi lagi.

Kuda

Kuda banyak dipelihara di Minahasa, untuk digunakan sebagai alat angkutan barang dan manusia. Pemilik bendi biasanya memiliki dua ekor kuda, agar dapat dipertukarkan satu sama lain jika dibutuhkan. Kuda-kuda ini dipelihara di udara terbuka, diberi makan rumput dan daun jagung dan ditambatkan sebelum dan sesudah bekerja. Setelah panen padi, kuda merumput di ladang / sawah.

Pacuan kuda juga populer di Minahasa, tapi kebanyakan digemari hanya oleh orang-orang kaya, sebagai hobi.

Ayam

Sebagian besar keluarga dan petani di Minahasa memelihara beberapa ekor ayam. Tapi ada juga yang memelihara dalam

jumlah yang banyak untuk dimanfaatkan daging dan telurnya; mayoritas ayam-ayam ini dibiarkan berkeliaran di alam terbuka (tidak dimasukkan ke dalam kandang). Tapi ada juga yang dimasukkan ke dalam kandang pada malam hari dan dilepas pada siang hari untuk mendapatkan makanan dari tempat-tempat di sekitarnya, atau mengambil sisa-sisa makanan dari dapur dan dari sawah setelah panen. Ayam dipotong untuk konsumsi sendiri atau dijual ke pasar atau ke orang yang membutuhkannya.

Itik

Itik juga dipelihara di alam terbuka. Ada petani yang khusus memelihara itik sampai lebih dari 500 ekor. Itik pada umumnya dipelihara hanya untuk mendapatkan telurnya. Pada malam hari itik dimasukkan ke dalam kandang, tapi pada siang hari mereka dipindahkan ke sawah / ladang yang sudah dipanen. Itik biasanya mencari makanan sendiri, apa saja yang mereka dapatkan serta tambahan lain seperti jagung dan beras. Di Minahasa, ada beberapa petani yang membawa itik mereka ke tempat dimana padi baru saja dipanen, agar itik dapat memperoleh makanan.

Kambing

Kambing tidak banyak dipelihara di Minahasa. Beberapa petani memelihara kambing dengan membiarkannya mencari makanan dimana saja ada hijauan dan membawanya ke tempat lain jika hijauannya sudah habis. Kambing dijual di pasar lokal atau dipotong untuk suatu kebutuhan tertentu.

Ikan

Ikan dipelihara kebanyakan hanya untuk dikonsumsi. Baik ikan mas maupun ikan mujair dipelihara di tambak di Danau Tondano. Kebanyakan petani ikan membeli anak ikan

kemudian diberi makan sampai cukup besar untuk dijual di pasar atau restoran. Laut di sekitar Minahasa kaya akan spesies ikan Tuna.

AGAMA

Agama Kristen pertama di Minahasa adalah Katolik yang diajarkan oleh rohaniawan ordo Jesuit Portugis dan kemudian oleh ordo Fransiskan Spanyol. Karena persaingan antara Portugis dan Ternate untuk menguasai wilayah Sulawesi Utara, maka pada nulan Mei 1563 panglima Portugis Henrique de sa mengirim Pater Jesuit Diego de Magelhaens ke Sulawesi Utara. Pater ini pada tanggal 28 Juli 1563 menulis surat ke Ternate bahwa ia telah mempermandikan Raja Manado (raja Mongondow yang berpusat di Manado Tua) dengan pengikutnya. Kemudian pada bulan Oktober 1568 Pater Mascarenhas mempermandikan raja Kolongan di Sangihe beserta pengikutnya. Tahun 1571 Spanyol keluar dari Ternate berpindah ke Manila Filipinan.

10 tahun kemudian Spanyol dan Portugis diperintah 1 raja yakni Raja Philip II, kendati demikian, di Sulawesi Utara butuh waktu lama kemudian mereka bias bekerja sama. Saat itu Portugis berkedudukan di Tidore Maluku dan Spanyol di Manila Filipina. Mereka mendapat ancaman dari Kompeni VOC Belanda berhasil menduduki Ternate dan Tidore. Mereka kembali mulai menggalakan misi Katolik di Manado dan Minahasa pada tahun 1610, karena tenaga pater Fransiskan Spanyol sangat kurang, maka minta bantuan pater Jesuit Portugis. Tahun 1617 Pater Batista Scalamonti dan Cosmas Pinto tiba di Manado. Di pantai Wenang Manado didirikan salib besar, dan arena penduduk masih ingat akan ajaran Kristen Katolik yang diajarkan Pater Diego Magelhaens tahun 1563, maka mereka kembali masuk Kristen.

Tetapi di daerah pedalaman Minahasa yang masih beragama asli belum dapat dijangkau agama Kristen, hingga para pater Fransiskan yang terkenal berani berkorban nyawa. Tahun 1615 Pater Blas Palamino dari Ternate datang ke Minahasa dan diantar serdadu Spanyol berhasilo masuk pedalaman tapi usahanya gagal. Ketika Pater Plamino memaksakan diri embali ke Minahasa tahun 1622, ia malah terbunuh di pantai Batu Nona Kema Tonsca. Kedatangan Pater Yuan Iranzo tahun 1640 mempelajari bahasa asli dan menetap dipedalaman, lalu datanglah Pater Lorenzo Garralda, pusat kegiatan rumah pastoran terletak di negeri Kali dekat Pineleng. Cara member pelajaran yang dilanjutkan dengan pembaptisan sangat berhasil hingga 740 orang menjadi Kristen Katolik.

Kristenisasi oleh para pater Katolik Fransiskan sebenarnya sudah berhasil masuk sampai pedalaman, akan tetapi tingkah laku serdadu Spanyol membangkitkan amarah penduduk Tombulu, sehingga pada tahun 1643 terjadilah kerusuhan yang mengakibatkan terbunuhnya 40 serdadu Spanyol. Tanggal 10 Agustus 1644 seluruh pasukan gabungan sub-etnik Minahasa mulai memerangi garisungamisun Spanyol yang tersebar diseluruh Minahasa. Banyak Pater Spanyol meninggalkan Minahasa menuju Siauw, Pater Lorenzo Garralda memutuskan untuk tidak meninggalkan rumah Pastoran, ia akhirnya ditangkap dan dikorbankan dalam upacara *Rumages*. Berita pengusiran serdadu Spanyol dan terbunuhnya Pater Lorenzo ditulis Pater Yuan Iranzo.

Tahun 1663 pedeta Protestan Belanda Burum mulai membaptis penduduk Wenang Manado umumnya disekitar Benteng Belanda. Tahun 1677 komperi Belanda menempatkan pendeta Zacharias Kahaeng di Manado. Masyarakat Kristen Protestan yang berembang tahun 1789 adalah masyarakat Borgo di Manado, Tanawangko, Amurang, Belang, Kema, Tondano, da Likupang. Organisasi pendeta Protestan Belanda NZG (Nederlandsche Zendeling

Genootschap) baru beroperasi di Minahasa mulai tahun 1822. Pendeta Belanda pertama yang datang adalah Lenting dan Kam, masing-masing tahun 1817 dan 1818 di Amurang dan Tondano, keduanya bertugas sementara karena tahun 1827 pemerintah Belanda mengirim Pendeta G. Hellendoorn yang bertugas di Manado tapi lebih banyak melayani pegawai Hindia Belanda.

Tahun 1829 organisasi misi Belanda NZG memutuskan untuk secara penuh mengkristenkan Minahasa dan Sulawesi Utara. Maka tanggal 12 Juni 1831 dua pendeta keturunan Jerman Johann F. Riedel dan Johann G. Schwarz tiba di Manado. Riedel ke Tondano dan Schwarz ke Langowan. 1835 pendeta Adam Mattern ke Minahasa dan memilih Tomohon sebagai tempat pelayanannya, usahanya dilanjutkan pendeta N. Ph. Wilken bertugas di Tomohon 1842-1878. Akhirnya Kristen menyebar ke seluruh pelosok Minahasa sampai seluruh Sulawesi Utara.

Berbagai upaya tokoh-tokoh masyarakat Minahasa seperti GSSJ Ratulangi, F Laoh, mulai tahun 1942 akhirnya GMIM dipimpin oleh putra Minahasa, kemudian berdiri KGPM, muncul juga aliran-aliran lainnya seperti Pantekosta (GPDI)

PENDIDIKAN

Sekolah Kristen pertama di Minahasa didirikan pada tahun 1617 oleh pater Jesuit Ktolik Bautista Scalamonte dan Cosmas Pinto. Kemudian tahun 1827 Gubernemen Hindia Belanda mengirim pendeta Hellendoorn yang kemudian mendirikan 7 sekolah di Minahasa yang pada tahun 1832 bertambah menjadi 12 sekolah Gubernemen. Tahun 1825 pendeta D. Muller mendirikan sekolah untuk Gubernemen di Manado, Tanwangko, Likupang, Kema dan pada tahun 1826 di Kakas, Langowan, Paniki Bawah, Tateli, dan Kapataran. Sekolah ini gratis untuk anak-anak kepala walak Minahasa, namun tidak ada pelajaran agama protestan. Kemudian

organisasi partikular Belanda NZG mulai menugaskan para pendetanya di Minahasa untuk mendirikan sekolah sendiri pada tahun 1831. Selama periode 1830-1870 pendeta-pendeta Zending Protestan berhasil membangun lebih dari seratus sekolah di Minahasa. Tahun 1854 kepala-kepala walak Minahasa mintapada Gubernur agar mendirikan sekolah-sekolah negeri yang kemudian disebut sekolah *gemeente*.

Pendidikan terus berkembang, istilah-istilah sekolah juga berubah, misalnya tahun 1901 Manado School untuk orang Minahasa berubah menjadi Hollandsch-Inlandsche School atau HIS, sekolah-sekolah Gubernur menjadi Meer Uitgebred Lager Onderwijs atau MULO. Lalu berdiri pula sekolah lanjutan/ tinggi di Tondano Shaker School. Sejak Hindia Belanda mendirikan Sekolah Dokter Jawa di Batavia 1851, maka lahirlah kaum intelektual Minahasa mulai sarjana kedokteran, teologia, pelayaran, pemerintahan, ilmu pasti, perwira militer, hokum dsb. Jumlah sekolah di Minahasa saat itu menjadi yang terbanyak diseluruh pelosok nusantara.

Tiga dokter pertama di seluruh wilayah Hindia Belanda asal Minahasa, Doktor Ilmu Pasti pertama GSSJ Ratulangi, Mrs. Annie Manopo, sarjana hokum pertama. Lainnya menjadi tokoh terkemuka di Indonesia pada awal-awal kelahiran negeri ini seperti LN Palar duta besar Indonesia untuk PBB pertama, Ir. H. Laoh menjabat menteri pekerjaan umum pertama, AA Maramis, menteri keuangan pertama, Arnold Mononutu, menteri penerangan.

KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM

Objek sumber daya alam terutama yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh manusia adalah tanah, dan akan berkait di dalamnya termasuk air dan udara sebagai bagian lengkap dari objek sumber daya alam. Penguasaan sumber daya alam di

Minahasa dimana struktur masyarakatnya tidak mengenal adanya system raja sebagaimana etnis lain di Indonesia oleh sebab itu tidak ada asal usul penguasaan tanah oleh raja. Penduduk percaya, bahwa yang berkuasa sepenuhnya atas tanah dan alam sekitar adalah *Empung Walian* (roh penguasa yang besar). Penduduk tidak menguasai tanah dan untuk mengambil hasil dari tanah perlu mendapat izin penguasa. Demikian pula asal usul penguasaan tanah mula-mula di daerah Tombulu sub etnis Minahasa, salah satu lokasi penelitian ini.

Permulaan berkembangnya penduduk di Minahasa, kelompok penduduk yang termasuk Walak Kakaskasen dalam Pakasaan Tombulu mendatangi wilayah di tengah Minahasa. Banyak peristiwa alam yang dialami, banyak tantangan alam yang harus dihadapi. Hal ini menjadi dorongan dan alasan utama kelompok primitif ini meyakini bahwa seluruh kehidupan dan seluruh alam semesta berada dalam kekuasaan *Empung Walian Wangko*. Untuk mendapatkan hak mendiami dan mengolah tanah, tidaklah diminta pada raja atau tonaas, melalui Tonaas permintaan diarahkan pada Opo Empung.

Kepercayaan ini melakat pada segenap penduduk Minahasa, sehingga dalam membuka kampung, lahan pertanian, dan lainnya selalu dilakukan dengan ritual atau upacara kepada *opo empung*. Seperti dalam ritual "*mangelei*" sebagai awal atau pembuka dari setiap kegiatan yang berhubungan dengan usaha melanjutkan dan mempertahankan hidup, berate juga memohon perkenan Yang Maha Kuasa untuk memanfaatkan sesuatu, sejak pada usaha berburu sampai pada usaha *rumokrok* dan *mahuwendu*. Dua konsekwensinya yakni kinelongan artinya diperkenankan Tuhan dan ni enean artinya diperkenankan Tuhan.

Proses penguasaan tanah diawali dengan pertemuan nunuwuan lalu diadakan upacara *mangelei*, menunjuk lokasi, menunjuk batas-batas areal dengan tanda-tandanya serta batas dan areal

dari setiap kelompok. Bahwa tanah tersebut sudah dikuasai diberi berbagai tanda tertentu. Sebagaimana forum *nunuwuaan* besar di watu pinawetengan yang membagi batas tanah Tombulu, Tonsea, Tountemboan, dan Toulour. Sistem peladangan atau pertanian kuno dengan berpindah-pindah juga tetap melakukan ritual-ritualnya, meski harus berhadapan dengan penduduk lain yang salingbentrok untuk menguasai lahan tertentu.

Kepercayaan yang kuat ini tergambar dalam sikap dan tindakan yang militan dalam memelihara, mengusahakan serta mempertahankan pemberian Tuhan. Watak ini juga yang kemudian berakibat benturan-benturan sosial yang tinggi antar keluarga, antar wanua, kemudian antar suku manakala wewenang menguasai tanah yang diberikan Empung terasa dilanggar. Penyelesaian masalah yang timbul seperti ini pada tingkat pertama, orang berusaha lewat *Nunuwuaan*, forum taraf berikut yang paling ditakuti adalah jika orang telah sampai pada sumpah berbunyi *Timowoan No Ni Empung* (Tuhan tidak mungkin berdusta). Forum musyawarah *Nunuwuaan* besar seperti Musyawarah Watu Pinawetengan yang menyelesaikan konflik antar walak dan membagi wilayah tanah antar pakasaan.

Penguasaan atas tanah atau sumber daya alam lainnya dipandang sebagai atas nama Tuhan yang diwakilkan berturut-turut kepada walian tonaas sebagai pemimpin wanua untuk keseluruhan tanah yang menjadi wilayah wanua, *Tua 'in Taranak* sebagai kepala keluarga untuk kalakeran in taranak. Tanah yang harus digunakan atau dimanfaatkan adalah :

1. *Tanu 'um banua* atau *tana 'ne sana wanua* yang berarti tanah negeri atau tanah yang dimiliki oleh seluruh warga negeri termasuk dalamnya hutan.
2. *Tana' kalakeran um banua* yakni tanah yang dikuasai oleh penduduk yang dibuka dan diolah bersama.

3. *Tana' kalakeran ne taranak* yakni tanah yang dikuasai oleh satu keluarga besar yang dibuka dan diolah oleh keluarga bersangkutan.
4. *Tana' kasasaan* ialah tanah yang dikuasai sendiri dibuka dan diolah secara perorangan.

Pandangan penguasaan atas tanah pada dasarnya berpangkal pada tindak penguasaan tanah-tanah secara terus-menerus. Penguasaan ini dengan sendirinya berakhir disaat tanah itu tidak diolah atau dibiarkan dan ditumbuhi kayu-kayuan, oleh penduduk hal ini disebut "*kakaien*". Penelusuran penguasaan tanah dalam forum *nunuwuaan* selalu pertamanya ditanyai "*sei si rumo-krok*" artinya siapa yang merombak atau membuka hutan dan memanfaatkannya menjadi ladang. Sejauh yang *merombak*(*si rumo-krok*) telah meninggal dan atau tidak dapat dibuktikan maka penguasaan atas tanah dipandang berada pada yang mengerjakan *si mahwendu*.

Pengaturan pertama soal tanah di Minahasa adalah terjadi saat musyawarah wata pinawetengan, peristiwa ini merupakan hukum adat pertama dimana para sub etnis menempati tanah atau wilayah yang ditunjuk dengan batas alam puncak-puncak gunung. Misalnya Tombulu mendapati wilayah utara barat laut Minahasa. Disini walak kakaskasen sebagai yang tertua lahir dari pakasaan Tombulu sekitar abad XII-XIV, tanah tombulu turut dipecah atas 7 walak. Masing-masing walak mendapatkan tanah untuk digunakan, tanah untuk perburuan, tanah untuk mendapatkan makanan dan hasil hutan, tanah untuk mendaptan bahan ramuan obat-obat, tanah untuk pemukiman, tanah untuk tempat pemujaan dan untuk arwah (tanah yang disakralkan). Seluruh tanah ini dikuasai secara komunal dan diginakan secara komunal. Ketujuh walak tersebut adalah Sarongsong, Tombariri, Tou Muung (Tomohon), Kakaskasen, Ares, Kalawat Atas, Kalawat Bawah.

Walak kakaskasen menguasai antara gunung Lokon dan Gunung Mahawu samapai ke utara berbatasan sungai Malalayang, sebelah selatan sungai Ranowangko. Kemudian walak kakaskasen pecah lagi menjadi walak Kakaskasen, Kinilow, dan Kali. Hutan dataran tinggi dan lereng gunung adalah daerah perburuan, dan tanah datar antara kaki gunung mahawu dan gunung lokon adalah hutan rokrok, hutan dijadikan peladangan.

Kepala walak tonaas mengatur dan memimpin pemanfaatan seluruh wilayah. Namun kemudian dalam musyawarah Kakaskasen, sebagian wilayah diberikan kepada keluarga-keluarga besar. Masyarakat kakaskasen dewasa ini masih menyebutkan 11 orang dotu atau tonaas yang menguasai tanah, diantaranya Dotu Rumondor menguasai bagian utara Kakaskasen, Dotu Pumpun bagian selatan berbatasan dengan walak Muung, Dotu Wongkar dibagian selatan daerah gunung Mahawu, Dotu Mongdong di bagian utara timur laut, Dotu Polii dibagian tengah dan Dotu Sulu di daerah bagian tengah. Sekarang ini seluruh tanah diwilayah kakaskasen telah didaftarkan. Sebagian kecil tanah dikuasai desa, letaknya terpencar. Tanah kalakeran keluarga masih didapat disebelah timur kakaskasen.

Ketika tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan (*rumokrok*) yang awalnya dilakukan bersama, maka terjadi kepemilikan bersama. Sistem pemilikan dan pengolahan bersama perlahan-lahan ditinggalkan dan meningkat pada membagi tanah bersama ke pemilikan tingkat keluarga batih. Perombakan hutan dilakukan keluarga batih atau satu keluarga besar, juga ntuk menghindari masalah dan hambatan yang timbul karena terikat pada sistem "*kalakeran sana wanua*", penguasaan dan pemilikan dalam tingkat awuan dan sana rengkom, praktis lebih mudah pengaturannya daripada kalakeran sana wanua.

Ketika penduduk Kakaskasen makin bertambah dan tanah rokrok serta hutan perburuan makin jauh dari wanua kakaskasen,

maka beberapa *awuan* dan *taranak* dalam satu rengkom memisahkan diri dan membentuk pemukiman baru. Peristiwa ini disebut "*tumani*", dan mereka mendapat tanah dari walak kakaskasen untuk digunakan. Demikianlah tumbuh perkampungan baru yakni Walian dan Kayawu. Tiap-tiap kelompok keluarga, sana taranak, dipemukiman baru itu mendapat kekuasaan dari tonaas in walak Kakaskasen, wilayah untuk dikuasai dan diolah.

Sebagaimana pada tahun 1830 kepala walak Langowan Mayor Sigar menunjuk Tonaas Tandap Cs, sebagai *tumani* Desa Koyawas. Pada waktu itu mereka mulai merintis pembukaan kampung, saat mereka menemukan suatu tanaman yang enak rasanya yakni koyawas atau jambu air, sehingga nama ini disepakati untuk pemberian nama perkampungan dan akhirnya menjadi nama Desa Koyawas yang secara resmi menjadi desa pada tahun 1877.

Pada perkembangannya, karena sistem pencatatan belum dikenal maka sulit mengidentifikasi dengan tuntas mereka yang turut dalam pembukaan rokrok. Rokrok tersebut berada radius 1-5 km dari lokasi pemukiman. Sengeta-sengketanya akhirnya terjadi, tanah kalakeran disengketakan. Pada era Belanda kemudian ditentukan sistem pengukuran dan pencatatan atas tanah yang dimiliki atau tanah yang dikuasai secara komunal atau secara keluarga batih. Pencatatan dilakukan pada tingkat desa maupun distrik.

Pada tahun 1877 pemerintah Belanda menyatakan seluruh tanah adalah milik pemerintah dan dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah (*domein-verklaring*). Peraturan tersebut sangat mengejutkan masyarakat dan dirasa bahwa hukum adat telah dilanggar. Untuk menyatakan keberatan pada pemerintah, pemimpin adat dan para kepala walak mengajukan surat keberatan pada Gubernur Jendral Hindia Belanda di Batavia untuk diteruskan pada pemerintah Belanda, peristiwa ini disebut petisi 31 Maret 1877. Pada dasarnya *domein verklering* ini tidak dicabut atau dirobah, hanya dalam

pelaksanaannya agak dilemahkan dengan berapa ketentuan residen atau gubernur. Gubernur Jeneral Belanda J. Ch Band mengakui bahwa tindakan Belanda telah melanggar hak-hak rakyat atas tanah yang telah berabad-abad dianutnya. Sehingga ia menyatakan bahwa hak-hak rakyat pribadi terhadap tanah adalah kuat.

Jaman belanda, jika anggota masyarakat membuka hutan harus memberitahukan kepada kepala distrik atau sepengatuannya tidak dipungut biaya, dan izin tersebut diberikan juga bagi orang lain yang berasal dari daerah lain. Kemudian tanah yang tidak didaftarkan dianggap tanah liar dan menjadi milik pemerintah belanda, dimana semuanya diadakan pemetaan baik tanah kalakeran maupun pasini. Tanah milik yang sudah didaftarkan bias diambil sewaktu-waktu apabila untuk dijadikan kepentingan umum seperti jalan, bendungan, dll. Pada masa Jepang peraturan ini tidak berubah jauh, hanya pembayaran pajaknya dinaikan.

Tanah diwariskan kepada turunannya atau yang dikuasakan, sehingga tanah warisan ini disebut juga tanah pasini, yang dapat dimanfaatkan untuk rumah, kebun, tanah pertanian, dll. Tanah warisan ini adalah tanah dari dotu-dotu atayu tonaas dari keluarga-keluarga besar tersebut. Namun akhirnya warisan tersebut dibagi-bagi menjadi sangat kecil. Sehingga banyak kali seseorang hanya mendapat tanah seluas mendirikan bangunan rumah. Mewariskan tanah biasanya dilaksanakan apabila anak keturunan yang bersangkutan sudah berkeluarga. Memiliki tanah karena pemberian masyarakat atau oleh pemerintah sudah tidak ada lagi, dimasa lalu masih memungkinkan. Seseorang yang banyak berjasa dalam kampung, maka melalui nunuwuan ia diberi sebidang tanah, tanah itu biasanya disebut tanah kalakeran un wanua.

Sebagai lanjutan *domein verklaring*, pemerintah menetapkan peraturan agrarian 1879. Undang-undang ini memberikan

kesempatan memiliki tanah untuk usaha pertanian besar dan memberikan kesempatan memiliki tanah bagi bukan penduduk asli. Didaerah lain Minahasa dikenal tanah "*eigendom*" yakni tanah pemerintah yang dikuasakan dan dipakai oleh pihak swasta. Di kakaskasen tidak ada tanah *eigendom*, karena semua tanah adalah milik para dotu yang diturunkan pada keturunan sebagai ahli waris. Namun ketentuan itu memberikan kesempatan pada orang luar untuk memiliki tanah di kakaskasen. Perkembangan selanjutnya sudah dikenal adanya jual beli tanah, dan banyak orang luar jug seperti cina menyewa tanah untuk ditanami tapi selanjutnya dibeli oleh mereka

PRANATA SOSIAL DALAM PENGUASAAN TANAH

Masyarakat kakaskasen sebagai bagian sub etnik Tombulu, bagian etnik besar Minahasa, mereka diam dan tinggal dalam satu perkampungan yang disebut wanua. Orang yang diam didalamnya disebut sana taranak. Sana taranak adalah satu keluarga besar berdiam dalam satu rumah satu keluarga yang telolah memisahkan diri dari sana taranak disebut awuan. Awuan adalah satu keluarga batih yang terdiri dari ayah, ibu, anak (kata *awuan* berasal dari kata *awu* yang berarti dapur). Kelompok masyarakat yang menguasai tanah adalah :

1. *Pakasaan*. Adalah kelompok penduduk yang besar dalam satu dialek bahasa. Tanah yang dikuasai oleh satu pakasaan sangat luas dan batas-batas tanah tidak dapat diidentifikasi. Batas tanah satu pakasaan selalu saja berubah.
2. *Walak*. Merupakan bagian pakasaan. Pakasaan member kekuasaan pada walak atas satu wilayah tertentu. Tanah walak atau kekuasaan walak atas tanah, lebih berfungsi dan lebih berarti bagi masyarakat karena tanah walaklah yang diolah.

3. *Wanua*. Berarti desa (negeri), wanua juga menguasai satu areal tanah. Dalam banyak hal wanua diidentikan dengan walak. Wanua sebenarnya melaksanakan penguasaan atas tanah dari walak, karena wanua (dengans eluruh penduduknya) menggunakan dan memanfaatkan tanah. Namun kekuasaa wanua atas tanah lebih terbatas.
4. *Rengkom*. Adalah keluarga-keluarga besar dalam wanua. Keluarga menguasai tanah karena turut membuka hutan dan direstui oleh tonaas um banua. Keluarga besar ini terdiri dari keluarga-keluarga batih.
5. *Lukaz*. Kelompok ini adalah kelompok persekutuan sosial ekonomis dan pertahanan, sebagai bagian dari wanua dan terdiri dari beberapa keluarga besar. Lukaz menguasai tanah hanya dalam satu periode saja. Tanah didapat dari wanua atau rengkom.
6. *Taranak dan awuan*. Ini adalah kelompok dalam satu kerabat tertentu. Tanah yang dikuasai diperoleh melalui proses dure dan adat yang berlaku dalam wanua atau walak. Taranak dan awuan menguasai tanah untuk pertanian, tanah yang dikuasai awuan pada mulanya hanya periodik

Beberapa perinsip-perinsip dasar penggunaan tanah yang berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam penggunaan tanah :

1. *Ni Nuwumo* : penguasaan tanah karena telah dibicarakan dan karenanya telah disepakati, dank arena itu wajib dipertahankan dan wajib dilaksanakan
2. *Nei rokrok* : penguasaan tanah karena sudah dikerjakan dan dirombak oleh seseorang, sudah dirokrok. Dalamnya tersirat makna legalitas dan kelayakan atau kewajaran untuk menguasai sesudah upacara manglelei.

3. *Nei palow* : penguasaan tanah karena tanah tersebut menjadi bagiannya telah dibagi-bagi. Penunjukan ini adalah hasil suatu kosesnsus diantara para penguasa tanah. Pwerinsip nei palow masih perlu diikuti lagi dengan pengesahan forum musyawarah dan upacara/ritual
4. *Neiweteng* : dikuasai karena dibahagi. Penguasaan karena pola ini biasanya karena diwariskan diantara beberpa orang dan lebih banyak terjadi kemudian.
5. *Tinu'uz* atau *kimatare* : penguasaan karena yang mula-mula, yang terlebih dahulu. Seseorang yang lebih dahulu masuk dan merombak atau yag lebih dahulu menanam, yang lebih dahulu menggunakan tanah ialah penguasa tanah. Bukti untuk hal ini hanya tanaman yang ditanam dan sudah tumbuh.
6. *Winendu* : penguasaan karena diolah dan dikerjakan. Jika hutan yang telah dirombak tidak dimanfaatkan seterusnya, dapat saja diolah orang lain dan seterusnya dikuasai yang mengerjakan. Penguasaan tanah karena winendu dapat ditarik kembali sesudah pemungutan hasil, namun harus melalui forum musyawarah wanua.
7. *Nei wehe* : penguasaan karena tanah itu telah diberi, oleh sebab itu ia yag menguasai.
8. *Nei likuz* : apabila anak dalam keluarga sakit-sakitan harus diberikan pada orang lain untuk diasuh. Orang tua dari anak yang diasuh diwajibkan member mehe lilikuz berupa tanah pada orang tua asuh.
9. *Wendu* : lelah, usaha, kerja. Tanah rokrok yang telah lama di-biarkan apalagi telah menghutan kemali jika dikelola kembali bernilai sama dengan usaha membuka kembali

Penguasaan tanah terdapat juga bentuk-bentuknya sehubungan dengan pola penguasaan tanah dalam sifat atau jenisnya :

1. *Tana'kasasaan* : tanah ini didapat, dirombak, diolah dan dikuasai oleh seseorang/ penduduk wanua. Biasanya tanah ini dikuasai oleh awuan , tua' in awuan atau ayah
2. *Tana'kalakeran in taranak* : tanah ini dikuasai bersama, karena dirombak bersama dan diolah bersama. Pemegang kuasa yakni tua in taranak atau yang dituakan, mengatur penggunaan tanah ini.
3. *Tana' kalakeran un wanua* : pemegang kuasa atas tanah ini adalah walian. Tanah ini dibuka bersama dan diusahakan bersama oleh masyarakat dalam wanua. Walian mengatur penggunaan dan pembagian hasil.
4. *Tana'e sana wanua* : tanah yang secara territorial termasuk dalam kelompok kekuasaan masyarakat wanua tertentu. Termasuk disini seluruh areal, hutan, sungai, lereng, atau gunung.
5. *Tana' palow* : tanah seengketa dalam kekuasaan walian.
6. *Tana' nei sanapa* : tanah yang dikhususkan karena sifat, keadaan tertentu atau untuk satu tujuan tertentu.
 - a. Karena sifat/keadaan tertentu dari tanah tersebut lalu dianggap tabu. Terlarang untuk didekati atau diolah. Kenyataan tanah tersebut umumnya merupakan sumber air, jurang dan rawa yang didiami ular, biawak, buaya, ditumbuhi tumbuhan beracun.
 - b. Untuk satu tujuan/kebutuhan tertentu misalnya untuk *lalawihan* (tempat tinggal darurat), *wawannuan* (pemukiman), *kapelian* (angker dan agung, biasanya tanah yang ada batu besar untuk ritual)
 - c. *Tana' nei sanapa* dapat juga berupa tanah yang dipersiapkan oleh pihak yang menguasai kepada seseorang anggota keluarga atau orang lain dipandang berjasa.
7. *Tana' pakasaan*: tanah yang diakui dan disepakati sejak nunuwuan pinawetengan sebagai wilayah yang dikuasai satu sub etnik tertentu. Pakasaan ini meruoakan persekutuan sosial

- a. Tanah *kesasan um walak* : tanah walak yang dikuasakan untuk walak yang terbentuk baru
- b. *Tana'pasini*, status tanah dengan hak milik penuh

Dalam hal pengalihan tanah, pada dasarnya tanah yang dikuasai secara komunal tidak dapat dialihkan kepada kelompok lain, penggantian penguasaan tanah hanya terjadi apabila kelompok penduduk meninggalkan tanah itu dan kemudian datang kelompok lain. Pengalihan inipun harus melalui forum *nunuwaan*. Penduduk *kakaskasen* meninggalkan tanah di *kinilow* lalu pindah dan mendiami wilayah *kinaskas*. Mereka pindah karena gangguan alam yang berkepanjangan, namun kemudian datang kelompok penduduk lain mendiami dan menguasai tanah *kinilow* sampai sekarang.

Pengalihan penguasaan atas tana berlaku secara otomatis pada saat :

- a. Penguasa atas tanah meninggal dunia. Untuk tanah *kalakeran wanua*, pengalihan berlaku pada saat ditetapkannya *tonaas walian baru* dalam *muasyawah/ nunuwuaan wanua*
- b. Jika sekelompok penduduk melepaskan diri dari *wanua* dan pergi *tumani* mendirikan *wanua baru*
- c. Disaat tanah dalam keadaan *nei kawaya*, tidak diolah dan digunakan dalam jangka waktu cukup lama, atau ditinggalkan penduduk karena pindah ke tempat lain

Pengalihan kekuasaan atas tanah terjadi pada masa pemerintah Belanda. Tahun 1824 Belanda menyusun pemerintahan dan ada 27 walak dan tahun 1856 diadakan reorganisasi pemerintahan dan dijadikan 25 walak. Penetapan batas walak dilakukan dengan sebutan *tana' kalakeran in walak*. Namun dalam prakteknya tanah demikian menjadi milik Belanda

PRANATA RELIGI DALAM PENGUASAAN TANAH

Masyarakat tradisional kakaskasen mengakui bahwa tanah dan semua yang ada diatas tanah dikuasai oleh Maha Kuasa, penguasa alam itu disebut "*Empung Walian Wangko*". Menguasai tanah untuk dikelola adalah usaha melanjutkan kehidupan. Oleh sebab itu penduduk mengharapkan mendapat kekuasaan itu. Berbagai usaha kelompok masyarakat untuk menguasai tanah kemudian mengkadi suatu kegiatan ritual. Dalam masyarakat Minahasa ini disebut "*mengalei*".

Semua kegiatan harus didahulukan dengan mengalei yakni suatu usaha komunikasi penduduk dengan dengan Empung Walian Wangko. Manglei diadakan pada waktu awuan hendak menguasai dan mendapatkan tanah untuk mendirikan rumah, (*tunoo'z wale*)*mengalei* dilaksanakan pada waktu kelompok penduduk sana wanua hendak menguasai tanah hutan rokrok menjadi ladang pertanian (*rumokrok*). Disini forum nunuwuan berperan penting dalam menguatkan penguasaan tanah dan dalam mempersiapkan upacara tradisional tersebut.

Langkah-langkah mengalei adalah sebagai berikut :

1. Dihadiri oleh perangkat wanua dan *tua-tua in taranak* atau *para'ahka in wanua*. Upacaranya dipimpin oleh tonaas fungsional untuk hal tersebut.
2. Dimulai dengan "*meteng*" atau "*momper*" atau "*rumetak*" yakni member sesajen, kadang-kadang berupa makanan, daun-daunan tertentu atau akar-akar khusus. Meteng dilaksanakan diatas batu besar atau dibawah pohon besar. Meteng dapat dilaksanakan satu kali, dapat dua kali dan dapat tiga kali.
3. Kemudian diteruskan dengan "*tumalinga*". Para tonaas berada dalam keadaan untuk mendengar pesa, yang akan datang lewat buyi burung manguni. Kadang-kadang pesan itu datang sesudah lewat semalam suntuk. Bunyi burung yang lemah,

panjang dan kurang merdu adalah penanda "*kinelongan*" yakni tidak diperkenankan. Bunyi burung demikian dikatakan oleh para tonaas "*rawoi*". Bunyi yang bersemangat merdu, penuh, berbunyi 3x3 atau 3x9 berarti "*ni enean*" yaitu diperkenankan, tonaas tahu bunyi itu memperkenankan tujuan mengalei, yakni menguasai tanah untuk diolah.

4. Bunyi *kinelongan* ini, dapat berarti sebagian dari *mengalei* yang ditolak atau keseluruhannya. Penolakan ini hanya menyangkut waktu yang tepat, ataupun lokasi yang mungkin akan dikuasakan pada kelompok lain. Upacara mengalei perlu dilaksanakan kembali.
5. Dalam hal "*ni enean*", maka upacara mengalei diteruskan dengan "*rumeges*", yakni semacam acara syukuran atau persembahan. Acara rumages ini dapat berbentuk makan bersama atau tarian masal. Pada acara rumages inipun dipersiapkan pelaksanaan untuk rumokrok dipimpin para tonaas. Bersamaan dengan rumeges ini, diawali rumokrok dengan *wentas* yani membuat jalan setapak keliling areal tanah rokrok. Biasanya para tonaas langsung memasang "*sambeang*" yakni tanda arah, dan "*tawaang*" yakni tiang batas, dan "*tawaang*" yakni tiang batas. *Sambeang* dan *tawaang* menjadi batas dari tanah hutan yang oleh dibongkar. *Meteng* dan *tumalinga*, adalah kegiatan-kegiatan pokok dalam *mengalei* dan setelah hal ini lengkap maa kukuhlah kekuasaan orang atas tanah.
6. Ketika agama Kristen masuk sampai akhir abad 18, upacara mengalei masih dilakukan namun kemudian oleh pemuka agama disiasati dan dilaksanakan dengan ajaran agama.

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM

Masyarakat Minahasa awalnya hidup dari berburu dan menangkap ikan, setelah penduduk makin banyak dan berkurangnya hewan buruan, maka mereka mencari sumber pencaharian sendiri. Mulailah mereka meramu hasil hutan, juga mendapatkan tanaman-tanaman makanan dan obat dari hutan. Lambat laun mereka mengenal pola pertanian ladang, meski masih berpindah-pindah dan lama kelamahanpun karena jumlah makin besar, maka mereka lebih selektif sehingga tidak serig berpindah-pindah. Ladang-ladang berubah menjadi sawah, maka merekapun tinggal menetap membentuk kampung. Tanah telah dimanfaatkan sepenuhnya apalagi sudah dilakukan penanaman buah-buahan, sayuran

PENGGORGANISASIAN

Bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat harus melewati forum *nunuwan*, pada tahap pertama *nunuwan* mengingatkan dan menegaskan kembali hal-hal yang mutlak diperlukan agar tindakan menggunakan dan memanfaatkan tanah akan erhasil. Hal-hal yang harus dipatuhi disebut *keketa*, hal yang dipandang sebagai atura yang harus didingat terus oleh generasi berikutnya sebagai hukum adat, *Tutuzu* atau *kikiitan* yaitu petunjuk dan pedoman dalam kerja, dan *taar wo sense* yaitu sesuatu yang merupakan pesan dan sekaligus ikatan tanggung jawab moral untuk dipatuhi.

Bertolak dari adat dan kepatuhan ini, pada tahap berikutnya dari produk *nunuwan* itu adalah penjabarannya, menyangkut waktu, tempat dan organisasi.

- a. Waktu pelaksanaan kegiatan yang umum dikenal dengan istilah *i sempu* atau *i zakzak leos* yang artinya disesuaikan

dengan waktu yang tepat dan musim yang cocok. Misalnya kegiatan *rumokrok* biasanya pada bula September dan oktober disaat puncak kemarau, kemudian menanam pada bulan januari, february disaat puncaknya penghujan.

- b. Penentuan tempat dan lokasi pelaksanaan kegiatan misalnya pada *rumokrok*, diadakan pemusatan seluruh angkatan kerja pada tempat yang telah ditetapkan lebih dulu dalam *nunuwuan*, atau juga menanam sawah atau ladang dikaitkan dengan topografis dan hidografis tanah. Sumber mata air pada umumnya dibagian timur kampung dibagian yang agak tinggi, maka diatur melereka yng memiliki sawah disebelah timur lebih dahulu menanam daripada mereka yang disebelah barat.
- c. Pengorganisasian kerja. Pembagian kerja telah dikenal pada masyarakat tradisional yang langsung dilembagakan dalam teknik dan sistem menggunakan tanah. Juga pembagian dalam sturktur pemerintahan mulai dari tonaas walian sebagai penguasa utama sampai kepada pemimpin kelompok organisasi pembagian kerja sudah melembaga. Pelaksananya :
 - *Tua'a in lukaz*, yakni mereka yang mengorganisasi kelompok atau satuan kerja *mapalus* atau *sumawang* dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
 - *Tutu'uzan* atau *tu'a in taranak* yang mengatur serta member teladan dan semangat kerja dalam kemompok atau keluarga besar.
 - Disamping itu berperan pula tonaas-tonaas fungsional lainnya yang mempunyai keahlian tertentu; yang mengatur pembagian air, yang meramal cuaca, yang menunjukan tempat-tempat tabu, angker dsb.

Semua produk *nunuwuan* harus diumumkan. Bila tiba waktunya, hasil pembicaraan dan perumusan akan diinformasikan

lokasi tertentu ada *tanada-tanda* untuk tempat bertemu dengan kelompok masyarakat lain. Tanah *um' wanua* adalah suatu daerah territorial dari suatu kempompok masyarakat.

- *Wawanua'an*, adalah bagian tanah yang dikhususkan untuk pemukiman dan tempat pendirian rumah tinggal. Tidak sembarang tempat dijadikan *wawanua'an*. Proses untuk mendapatkan lokasi ini kadang-kadang berlangsung satu musim. Dibeberapa tempat di wilayah Tombulu seperti kakaskasen, rurukan, muung, walian didapati pola pemukiman berbentuk segi empat dan memanjang mengarah ke guung lokon
- *Wawelean* adalah lokasi-lokasi kecil dalam *wanua'an* atau kaveling tanah untuk rumah-rumah penduduk. Tanah ini dikuasai oleh satu keluarga besar dan tanah ini cukup luas menambah bangunan jika keluarga ertambah esar. Satu *wawanua'an* dibagi sampai tujuh atau Sembilan petak untuk *wawalwan* dengan kata lain hanya untuk tujuh keluarga besar.
- *Lezar* merupakan bagian tanah didepan atau disamping rumah yang agak luas atau sebuah pekarangan rumah. *Lezar* berfungsi sebagai tempat berkumpul atau tempat menumpuk hasil dari ladang atau sawah dan dikemudian hari menjadi tempat pertemuan beberapa tarana atau rekreasi, atau tempat pertandingan.
- Sebagian besar *tana'um wanua* adalah *tana'umaan*, yakni tanah untuk pertanian. *Tana'uumaan* adalah tanah yang sudah dirokrok, tanah yang sudah diminta melalui *mengalei* untuk ditanami, jadi proses ritual sudah dilaksanakan sehingga penduduk tidak usah khawatir menanaminya. Selama belum ada perintah untuk *rumokrok* tempat lain penduduk tidak akan membuka hutan baru, sangatlah berbahaya untuk *rumokrok* kalau tidak melalui proses ritual.

Daya dukung tanah *umaan* selalu tetap, apabila hasil sudah kurang maka direncanakan untuk *rumokrok*. Lokasi

uumaan selalu berpindah-pindah diseluruh areal *tana'um wanua*, biasanya bergerak sekeliling *wawanua'an*. Tana'uumaan yang ditinggalkan disebut *rekat*, bila seseorang mengambil hasil sekadarnya maka ia pergi *rumekat*. *Rumekat* adalah mengerjakan tanah bekas kebun dan hanya bekerja sekadarnya.

Tana'uumaan dibagi beberapa jenis menurut pemakaiannya :

- a. *Uma*, tanah yang sudah diolah
- b. *Rekat*, tanah yang sudah diolah dan ditinggalkan
- c. *Sawukow*, tanah rekat yang sudah ditumbuhi pohon-pohon besar
- d. *Kakai-en*, tanah yang sudah menghutan kembali. Untuk menggunakan tanah' *kakai-en* harus melalui proses *rokrok* kembali
 - *Tana' neuisanapa* adalah bagian *tana'um wanua* yang penggunaannya adalah sangat khusus. Biasanya tanah ini agak terbiar. Pada keperluan yang tiba-tiba para *tua um wanua* dan para *tua in taranak* bermusyawarah untuk mendapatkan *tana nei sanapa*. *Tana' nei sanapa* dapat digunakan untuk para roh dan mejadi tempat keramat (*kapelien*). Juga dapat digunakan untuk pemukiman sementara, dapat juga menjadi tempat melaksanakan ritual khusus. *Tana'nei sanapa* dapat dikatakan sebagai tanah cadangan dari walak

SISTEM RELIGI

Penggunaan dan pemanfaatan tanah terletak pada kemampuan dan caranya manusia baik individu maupun komunal mengolah dan menggunakan tanah, tujuan utama adalah agar mendapatkan hasil untuk kelangsungan hidup. Resiko utama dalam masyarakat tradisional datangnya dari alamnya yang menantanginya. Untuk menangkal dan menantang resiko itu mereka menemukan cara

menyembah kepada kekuasaan yang tinggi itu. Usaha ini adalah suatu upacara ritual dalam menusahakan tanah.

Pertemuan dalam membahas proses ini dihadiri oleh para tonaas dan akha im wanua atau mereka yang melindungi desa dari bahaya. Para tonaas yang hadir dalam pertemuan memiliki berbagai keahlian tertentu yakni

- *Tonaas ma'uwa*
- *Tonaas lele'an*
- *Tonaas kumokomba*
- *Tonaas menanangseng*
- *Tonaas manembo*

Dari pertemuan ini lahir berbagai upacara ritual yang berpola dan dilaksanakan terus-menerus, para tonaas melaksanakan fungsinya terutama sebagai pengantara antara manusia dan Empung Walian sesuai dengan keahlian masing-masing. Kegiatan dan upacara ritual itu dilaknaskan dalam berbagai peristiwa.

Upacara tersebut adalah :

- a. *Mengulei*, yakni memohon perkenan dari Empung Walian
- b. *Sumaru*, enghadapi atau mengerjakan
- c. *Rumages*, yakni mempersembahkan syukur
- d. *Kumawus*, upacara akhir pada kematian

Hubungan upacara tersebut dalam pemanfaatan tanah, maka akan dilihat pada kegiatan-kegiatan pengolahan tanah yakni :

1. *Rumokrok*, yakni tahap merombak dan membuka hutan untuk dijadikan ladang mulai dengan mentas sampai sumaha. Pada saat syumaha berarti areal yang dorokrok sudah siap untuk ditanami
2. *Tumanem*, yakni enanami, rangkaian kegiatan ini adalah kumeros sampai dengan rumambus yakni menyiangi dan menjaga

3. *Mupu'* yaitu memetik atau mengambil hasil pertama, kegiatan ini diikuti dengan panen keseluruhan

Pada kegiatan *rumokrok*, mula-mula para tonaas dengan *tua'in taranak* berkumpul dan bermusyawarah dan menyampaikan sebab dan alasan untuk *rumokrok*. Para tonaas pergi ketempat atau bukit yang disakralkan untuk *rumetak*, meletakkan persembahan karena akan mengadakan upacara *mengelai*.

Setelah lokasi dan waktu disepakati berangkatlah para tonaas ke lokasi rok-rok, dipimpin oleh tonaas walian untuk melaksanakan upacara *mengelai*. Pengantar dan petunjuk jalan adalah tonaas *tumalun* dan tonaas *lelean*, karena mereka mengenal hutan (*talun*) dan mengenal binatang buas. Mereka dipandang paham situasi dan kondisi, syarat dan pandangan jangan menengok ke belakang, ditempat yang sudah ditemui, kegiatan pertama adalah *meteng*, yakni meletakkan semacam persembahan atau sesajen. Orang yang layak melaksanakan hanyalah tonaas walian sebagai pemimpin kelompok dan pemimpin upacara, ia menyediakan seperangkat makanan yang diambil dari makanan yang disediakan rombongan *mengelai*. Perangkat makanan ini diletakan pada suatu tempat, biasanya dibawah pohon besar atau batu besar, kemudian diucapkan mantra beriraa, kadang-kadang dibarengi gerakan tertentu. Berikutnya adalah *tumalinga*, yakni mendengar berita. Hal ini dilaksanakan pada malam harinya atau pada malam-malam tertentu. Media berita yang digunakan disini adalah bunyi burung manguni.

Tonaas dapat memanggil burung manguni dengan bersiul yang dibunyikan sama dengan bunyi burung manguni itu. Jawaban atau berita yang disampaikan oleh burung adalah dengan memperhatikan sifat dan bentuk bunyi burung yang didengarnya.

Setelah mendapat penanda diperkenankan, maka diteruskan dengan upacara *sumaru* atau *saruen*. Pada upacara *sumaru* ini

sebenarnya sudah dimulai kegiatan *rumokrok* yang sesungguhnya. Kembali lagi dilaksanakan kegiatan *meteng* atau *rumetak* seperangkat makanan ditempat tertentu yang dikhususkan. *Rumetak* inipun diiringi dengan permohonan izin dari penguasa lokasi.

Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, mulailah pekerjaan merombak yang diawali dengan *mentas*. Kegiatan ini adalah menebang pohon atau membat kayuyang pertama oleh tonaas walian. Bersamaan dengan itu pula tonaas manangsang memasang *sambeang*, yakni tanda-tanda arah dan batas jalur kerja.

Sesuatu yang khas dalam *sumaru* ini adalah *zazani-en* yaitu nyanyian yang berisi doa dan pujaan yang diucapkan pada saat bekerja, dinyanyikan bersahut-sahutan. Hal ini dimaksudkan sebagai penolak bala disamping menyemarakkan suasana dan pemberi semangat. Rentetan kegiatan ini dilakukan pada kegiatan *sumaha*, yakni tahap dimana hutan yang sudah dirombak itu siap untuk ditanami.

Pada kegiatan *tumanem*, pula upacara *mengalei* dilakukan. Pada upacara ini berperan tonaas khusus yakni tonaas *kamokomba* dan *manenembo*, yang menentapkan waktu dan saat yang tepat untuk menanam. Dalam hal cuaca yang tepat untuk menanam maka upacara *mengalei* dilangkahi dan langsung dengan *sumaru*. Jika cuaca untuk menanam belum membolehkan, musim kemarau maka *mengalei* mutlak harus dilakukan.

Selesai dengan upacara *mengalei*, dilangsungkan upacara *saru-en*. Upacara *sumaru* disini dimaksudkan untuk menangkal bahaya, resiko kerja dan resiko alam. Pada upacara inipun ditandai dengan *rumetak* seperangkat sesajen atau seperangkat obat-obatan atau juga dengan menanam tumbuhan tertentu. Member batas daerah perladangan juga dilaksanakan dalam upacara *rumetak*, hal ini dimaksudkan untuk menangkal hama dan binatang buas.

Pada kegiatan *mupu*. Sesudah kegiatan *rumambus*, menyiangi, berakhir menjelang padi atau tanaman member hasil, kembali

lagi diadakan upacara mengalei dan sumaru. Mengalei disini bermaksud untuk memohon agar padi diberi isi, lebih umum upacara ini disebut mengalei wene. Doa *mengalei wene* dalam bentuk *zazani en*, yakni himne dibarengi dengan gerakan-gerakan tertentu mengeskpresikan doa. Setelah *mengalei wene* disusul pula dengan sumaru. *Sumau* disini dilakukan dalam bentuk mengorbankan binatang yang memiliki cirri khusus, misalnya ayam putih polos.

Sumau dilaksanakan oleh *tonaas ma uwa* atau *tonaas mangundam*. Kemudian sesudah panen, upacara yang dilakukan serentak oleh seluruh warga wanua adalah *rumages* yang berarti syukuran, hal ini ditandai dengan mempersembahkan sejempit hasil terbaik dari keseluruhan panen kepada walian serta *tonaas-tonaas* lainnya. Bersamaan dengan itu pula dikhususkan sejumlah tertentu untuk bibit.

Pesta syukuran ini di warnai dengan mempersiapkan makanan sambil mengundang warga wanua lainnya dalam hubungan kekerabatan atau seketurunan. Menjamu orang dari wanua lain dikenal penduduk dengan *sumakei*. Pesta syukuran ini diakhiri dengan pertemuan dan diramaikan dengan *zazani en*, maengket dan kabasaran. Pesta ini dilaksanakan di *lesar*. Peristiwa *rummages* ini pula merupakan forum pemberian informasi atau nasehat atau pengalaman dan petunjuk untuk kegiutan kerja berikutnya. *Rummages* di *lesar* ini diorganisir dan dipimpin oleh *tua in taranak*.

PENGOLAHAN TANAH

Masyarakat tradisional Tombulu memandang bahwa pemanfaatan dan penggunaan tanah terletak pada *wendu*. *Wendu* secara harafiah berarti lelah, tersirat lebih jauh mengandung arti usaha, kerja, sebagai pengorbanan yang diberikan seseorang terhadap tanah yang dimaksud memperoleh manfaatnya daripadanya.

Pemanfaatan dan penggunaan tanah berdasar kepada perbedaan relief tanah, struktur tanah, kesuburan, iklim dan cuaca, perbedaan-perbedaannya sekaligus mewarnai cara mengolah dan menanam dengan tanaman yang cocok. Bagian-bagian tanah yang dikerjakan disebut :

- a. *Likuzna* yakni bagian punggung bukit dan sapa yakni bagian kaki bukit yang umumnya merupakan jalan air, dijadikan batas alamiah penguasaan tanah
- b. *Ri'ping* yakni bagian yang terjal biasanya dibiarkan seperti apa adanya. Jika bagian ini dimanfaatkan juga, biasanya ditanami dengan wulu, teling, tahaki, tembelang yakni jenis-jenis bambu yang ada. Tanaman ini juga dimanfaatkan untuk bahan kerajinan, bangunan atau untuk tempat makanan
- c. *Siri* yakni bagian miring/ landai biasanya ditanami tanaman tahunan
- d. Rata yakni bagian yang rata yang umumnya memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Biasanya ditanami makanan pokok; wene' atau padi dan tandey atau jagung, didamping tanaman sebagai bahan makanan sampingan umbi-umbian, kacang-kacangan dan rempah-rempah.

Sekarang ini petani sudah menyiapkan sebagian tanah untuk padang rumput ternak atau dibuat kolam untuk peternakan ikan. Dahulu bagian tanah yang digenangi atau dialiri sungai dijadikan tempat memperoleh ikan, tempat demikian ini kebanyakan dibiarkan seperti apa adanya dan orang menyebutnya pemongkoran. Dibeberapa tempat tertentu adanya berbagai satwa liar seperti spesies dalam ekosistem dari lingkungan itu antara lain ; ular dari berbagai jenis, biawak dll. Oleh karena itu tempat tersebut dianggap angker, banyak pantangan dan tabu diberikan pada tempat itu. Hal ini melahirkan berbagai upacara dilaksanakan orang untuk menolak atau mengatasi bahaya dan resiko, baik

pada waktu sekedar melewati atau waktu melakukan kegiatan *mentongkor* (menangkap ikan).

Sewaktu pemerintahan belanda mengatur pemerintahan di Minahasa menurut pola mereka, ternyata memerlukan banyak biaya, biaya dari pemerintah pusat tidak mencukupi. Untuk mendapatkan biaya tambahan harus diusahakan masing-masing wilayah sendiri, karena itu dibentuk distrik, usaha untuk hal tersebut adalah memanfaatkan tanah kalakeran dengan ditanami yang hasilnya untuk pemerintah distrik. Hasilnya menguntungkan, sehingga mulailah tanah yang sudah lama terbiar, rekat, dan tanah kalakeran yang belum dikelola, dimanfaatkan oleh distrik yang disebut *walak*. Tanah milik pemerintah dalam hal ini dikuasai ataupun dimiliki oleh distrik, dikerjakan secara gotong royong, masing-masing desa atau *wanua* mendapat giliran dua hari setahun untuk bekerja di tanah kalakeran.

a. *katanaan berate ladang atau huma dimulai dengan rumokrok sampai dengan menanam dapat digambarkan sebagai berikut:*

- *rumimbas* yakni kegiatan menebang untuk menyingkirkan kayu-kayuan atau semak-semak
- *matez* yakni mengumpul pada tempat-tempat tertentu sambil memisahkan bahan-bahan yang dianggap bermanfaat misalnya untuk bangunan rumah
- *sumuweng* yakni pekerjaan ini dilakukan setelah beberapa lama sampai sisa-sisa yang tidak bermanfaat menjadi kering lalu dibakar
- *sumaha*, adalah tindakan berikutnya sesudah *sumuweng* dengan menggunakan batangan kayu ulet yang ujungnya bercabang yang disebut *sasaha* berfungsi sebagai sapu pencungkil sekaligus pengumpul sisa-sisa. Sisa-sisa ini kemudian diobakar lagi.

- Tahap berikutnya adalah kegiatan menanam yang disebut *kumeroz* khusus untuk padi yang secara umum dapat diartikan menghambur padi. Berbarengan dengan itu jagung pada baris-baris yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu pertumbuhan padi. Bagian-bagian tertentu yang karena keadaan tidak mungkin ditanami padi, orang menanam dengan jenis sayur-sayuran, Lombok, dan obat-obatan.

b. *Lepo* (sawah) dan *tambu* (tambak) budaya pengolahan sawah dan tambak ini menyusul kemudian.

Bermula dari usaha membendung saluran yang mengalir antara dua ketinggian untuk memelihara ikan-ikan setempat. Penduduk menyebut hal itu *sumeper*, namun kemudian airnya membasahi areal yang lebih luas. Setelah datangnya jenis padi yang dapat ditanam ditempat yang berair mulailah orang membuat sawah/ rawa-rawa yang dulunya dibiarkan saja, kini mendapat giliran untuk diusahakan.

Penggalian pembuatan pematang inipun selalu dikerjakan secara bersama. Penduduk mulai diperkenankan dengan cara pertanian yang lebih maju yakni dengan mulai digunakannya bajak dan sisir sekaligus dengan penggunaan lembu atau kerbau sebagai tenaga bantuan. Cara bertani sawah seperti ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan berpindah pindah. Pada tempat-tempat tertentu diusahakan pengairan dalam bentuk-bentuk sederhana dengan cara membendung (*sumeper*) saluran-saluran air yang ada. Pada tempat-tempat yang usaha membendung air tidak dibuat, penduduk menggali bagian yang lebih tinggi (*tumeras*). Sistem bersawah ini semakin disenangi sebab disamping padi dapat juga dipelihara ikan.

c. Rekat.

Kesuburan tanah yang semakin menurun adalah suatu keadaan yang dialami. Hal ini merupakan kebiasaan turun temurun yang berakibat cara bertani yang selalu berpindah-pindah tempat. Begitu ladang yang ada tidak lagi member hasil yang memadai lalu ditinggalkan. Ladang yang ditinggalkan ini perlahan-lahan ditumbuhi tumbuhan semak dan ladang. Tanah demikian disebut rekat, dengan kata lain keadaan ladang dalam proses menghutun kembali.

Rekat yang ditinggalkan dapat saja diolah orang lain. Kebiasaan yang demikian merupakan *keketa*, yakni aturan main yang diterima semua pihak. Orang lain dapat memanfaatkan rekat tersebut selama orang yang membukanya sebagai ladang belum berkesempatan untuk mengolahnya.

Teknik Pengolahan

Perombakan hutan dilakukan dengan menggunakan pati (kapak), pisow (parang), tu'il (pintuas), koho' (parang yang lebih besar) dan sebagainya. Petunjuk-petunjuk kerja yang diberikan selalu diungkapkan dalam berbagai kesempatan bekerja dalam bahasa; "*pah ki itlah kukua e tua*" artinya ikutlah petunjuk orang tua hal ini dipandang sebagai *keketa*.

Disamping pelaksanaan secara serentak dan bersama-sama, gotong royong, pekerjaan inipun dilakukan sambil menyesuaikan pada iklim dan cuaca yang cocok yang disebut orang saksak in tagas. Berhubung dengan jenis, volume pekerjaan, luas areal kerja, pekerjaan yang dilaksanakan penduduk dalam mengolah lahan berturut-turut dapat disebut :

1. *Pangesaan*, artinya pekerjaan yang dilaksanakan sendiri
2. *Kinariaan*, artinya ditemani orang lain, untuk pekerjaan yang pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan sendiri dan yang

sifat-sifat insidental. Pada pekerjaan seperti ini seseorang ditemani oleh orang ya dipandang terdekat dalam hubungan sosial maupun kekeluargaan.

3. *Mahwali-wali*, yang berarti bersama-sama untuk pekerjaan yang dipandang berat dan seharusnya dilakukan oleh banyak orang. Misalnya menyingkirkan/ mengangkat pohon besar dari ladang atau pada saat membangun rumah. Pokoknya untuk pekerjaan yang besar dan memerlukan banyak tenaga. Cara mahwali-wali juga umum dilakukan pada waktu rumokrok, tumanem.
4. *Sumawang* atau *sinawangan*, pekerjaan membantu/ menolong orang lain. Berbeda dengan mahwali-wali dimana seseorang tidak terikat memberikan sesuatu artinya pihak yang menawarkan pekerjaan tidak ada ikatan sedangkan pada sumawang pihak yang empunya berkewajiban menyediakan seperangkat makanan bagi mereka yang datang sumawang.
5. *Mapalus*, kelompok kerja yang terorganisir yang pelaksanaannya bergilir pada setiap anggota. Walaupun pada masyarakat tradisional ikatan hukum belum dikenal tetapi kewajiban palus (membalas giliran mapalus) pada rekan sekelompok dipandang sesuatu yang tidak boleh tidak harus dipenuhi. Dari mapalus ini menurut waktu kerja berkembang dan diturunkan bentuk-bentuk seperti :
 - *Mapalus mah-endoan* : seharian penuh
 - *Mapalus mah-woondoan* : setiap pagi
 - *Mapalus mah-jaman* : perjam
6. *Mahezam*, cara pengolahan ini dilaksanakan karena penggarap sama sekali tidak mempunyai tanah sendiri. Atau jika ia mempunyai tanah hasilnya tidak mencukupi kebutuhan. Pada prinsipnya cara ini adalah suatu konsensus antara pemilik dan penggarap dengan imbalan berdasarkan kerelaan. Lama kelamaan cara ini berkembang menjadi sistem bagi hasil

antara pemilik tanah dan penggarap. Bentuk ini sekarang dikenal dengan istilah *tumoyo*.

d. Membagikan Hasil Panen.

Hasil panen selalu dilakukan pembagiannya sebelum dinikmati oleh pemilik tanaman atau lahan pertanian tersebut. Petamanya dibagikan kepada yang menggarap lahannya dalam sistem bagi hasil, seperti di langowan, lahan satu *waleleng* (ukuran lahan sekitar 1,2 ha) di bagi tiga yaitu satu karung yang punya tanah, satu karung ongkos kerja, satu karung yang menggarap.

Setelah itu pemilik lahan mendapati hasil panen untuk dinikmati sebagai makanan sehari-hari, dibagikan kepada anggota keluarga yang berada ditempat lain sampai semua anggota keluarga merasakan hasil panen. Kebiasaan orang di desa Tara-tara masih mengikuti tradisi nenek moyangnya, untuk tidak menjual seluruh hasil panen, sehingga sistem ijonpun tidak mendapat tempat di masyarakat desa Tara-tara. Hasil panen terlebih dahulu disimpan di lumbung padinya, kalau mau akan dijual maka dijual sedikit-demi sedikit (*poti-poti*), menjual keseluruhannya atau di jual sekaligus dianggap tabu.

Masyarakat masih membudayakan pemanfaatan hasil panen dengan menyisahkan sebagian padi yang bagus untuk dijadikan bibit. Bagian padi ini disendirikan dan tidak untuk dijual, karenanya jarang masyarakat membeli bibit dari toko-toko atau yang menjual bibit padi. Kalaupun ada orang lain yang membutuhkan bibit padi, bisa saja sebagian bibit akan diberikan secara gratis jika berlebihan atau dengan saling tukar bibit. Bibit padi yang terseleksi, terutama mendapati bibit yang unggul, maka bisa jadi bibit tersebut akan diberi nama. Prosesnya adalah tanaman padi yang sudah waktunya dipetik atau dipanen, tanaman-tanaman padi yang terlihat bagus dipetik sampai satu ikat. Dilakukan juga perkawinan silang misalnya padi jenis leter

D dan diambil juga padi jenis *wesel*, setelah itu dikocok dan disemaikan, maka hasilnya akan mendapat bibit yang baru saat panen

Di Langowan, dari hasil penelusuran terdapat beberapa nama atau jenis padi unggul yang lokal atau ditemukan sendiri oleh petani setempat. Nama-nama padi tersebut adalah *wesel*, ditemukan oleh Welly Sembel warga Desa Karondoran pada era 80-an, *seka*, ditemukan oleh Surentu Kalangi warga Desa Winebetan pada era 80-an, *roma*, ditemukan Rorong-Manaroinsong warga Desa Winebetan pada era 80-an, *padi 100 hari* yang ditemukan piter dan goan kemudian bibit lokal lainnya yakni *superwin*, *64*, *sadane*, *nurdin*, *leter D*, *surya*, *sultan*, *LM*, *tampa nama*. Yang sekarang lagi menonjol atau paling banyak ditanam adalah *64*, *surya*, *wesel*, *leter d*, dan *superwin*. Padi-padi jenis ini sangat digemari oleh masyarakat karena rasanya yang enak, sehingga harga dipasaran lebih tinggi dari jenis beras yang lain.

Pembagian lainnya, sebagaimana ditulis Antropolog Renwarin (2007), bahwa para roh juga mendapatkan bagiannya bahkan sebelum buah itu dipetik, kebiasaan ini disebut *weteng*, membagikan dan juga mekan. Misalnya bibit jagung saat menanam, petani menanamkan bibit pada tiga lubang pertama dengan menutup mata dengan harapan bahwa ayam tidak akan dapat melihat pucuk buah yang muda dan memakannya. Sebelum memanen, petani harus mengambil tiga buah yang besar dan menempatkannya disuatu sudut, sambil berkata "inilah bagianmu, bantulah saya menjaga kebun ini", tanpa menyebut nama suatu roh.

Praktek ini diyakini untuk menjaga tanaman dari serangan tikus atau pencuri, dan masih dijalankan diam-diam oleh petani. Dikalangan jemaat beragama saat ini seperti umat Katolik dan Protestan praktek ini sudah mendapatkan bentuk baru yakni *kase making pastor* atau *pendeta*, mengantarkan makanan bagi imam, beberapa orang membawa bagian itu sebagai bahan persembahan

dalam ibadah minggu, kalau umat katolik dalam ibadah Ekaristi Minggu.

Pada saat menikmati makanan setiap hari, tetangga sering diajak ikut makan bersama, makanya, sikap saling member makan ini sepertinya susah untuk mendapatkan orang kekurangan makanan atau kelaparan di wilayah Minahasa. Karena semua hasil usaha akan dinikmati oleh kebanyakan orang atau berbagai pihak yang terkait dengan keluarga tersebut. Apalagi kebiasaan menjamu tamu dengan sajian makanan dengan berbagai macam menu masakan. Kalau ada tamu mereka dijamu bahkan seakan "dipaksa" untuk makan, menurut sang tuan rumah tidak baik tamu pulang atau keluar meninggalkan rumah tanpa mencicipi makanan atau hasil panen keluarga.

Setiap tahun selalu diadakan acara pengucapan syukur dalam bentuk pesta rakyat di tiap-tiap desa yang biasa berlangsung bulan Juni, Juli, atau Agustus saat panen raya. Acara pengucapan syukur ini diorganisir oleh pihak gereja, pelaksanaannya pada hari minggu, saat itu masyarakat aka membawa sebagian hasil panen atau dalam bentuk masakan kedalam ibadah minggu untuk didoakan pendeta dan para jemaat. Selesai acara makan bersama atau ramah tamah dilakukan kemudian akan menjamu tamu-tamu di rumah masing-masing, masyarakat desa yang lain langsung menyelenggarakan makan bersama atau ramah tamah di rumah masing-masing dengan mengundang semua anggota keluarga, tetangga, diikuti para tamu yang datang dari luar desa.

Seharian pengucapan syukur, masyarakat desa setempat akan kedatangan tamu yang begitu banyak dari luar desa, sampai tamu dari tempat yang jauh. Setiap mereka yang datang dijamu dengan hidangan makanan yang selalu siap sedia ruang makan. Kalau para tamu sudah mau pulang, diperkanankan juga membawa pulang sebagian makanan.

Dahulu pesta pengucapan syukur tahunan ini adalah suatu bentuk upacara bernama *manempo* atau pesta panen padi baru yang biasa diselenggarakan pada bulan Mei. Upacara ini berlangsung selama beberapa hari dan semua warga desa berpartisipasi dalam tari-tarian ritual, yang disebut *mahatuturon*, *lumaes*, *maengket*, *ahtambulelen*. Sisanya masih dapat dijumpai dalam tarian *maengket mahkamberu*.

e. Pemupukan dan Pengendalian Hama Terpadu

Di era modern saat ini, praktek pemanfaatan lahan pertanian sedikitnya telah mengalami perubahan, praktek-praktek tradisional yang membudaya sejak nenek moyang sebenarnya berefek ramah terhadap keseimbangan alam sehingga resiko kerusakan lingkungan bisa terjaga. Namun dengan beralihnya ke sistem modern, pemanfaatan bahan-bahan kimia dalam mempercepat pertumbuhan tanaman dan mengendalikan hama sangat berdampak kuat bagi kerusakan lingkungan. Penggunaan pupuk kimia telah menggantikan pupuk organik dan pengaturan jarak tanam, kemudian pestisida telah menggantikan musuh-musuh alami yang dulunya digunakan untuk mengendalikan hama tanaman.

Beberapa tempat masih mempertahankan praktek tradisional ramah lingkungan tersebut dan beberapa tempat lagi menggabungkan praktek tradisional dan praktek modern. Pada masyarakat desa Rurukan memiliki komposisi mata pencaharian yang 85% petani, sejak tahun 1973 mulai mengenali pupuk kimia sehingga terjadi ketergantungan terhadap pupuk tersebut, ketika masuk pupuk semua kebun dibuka. "Kalau tidak ada pupuk susah, disini sayur kubis, wortel, kol semua tetap pakai pupuk" tutur seorang Petani Desa Rurukan.

Meski demikian ada tanaman yang tidak menggunakan pupuk kimia tetapi masih menggunakan pupuk organik seperti Wortel

tidak pakai pupuk kimia. Kalau wortel Cuma pergantian masa tanam dengan tanaman yang lain. Petani Desa Rurukan menanam dua kali tanaman Pitsai atau Kol yang pakai pupuk kimia. Sesudah itu mereka menanam Tanaman wortel. Wortel memakai sisa-sisa pengerjaan panen tanaman Kol atau Pitsai, tanah sisa atau bekas tersebut diolah lagi dan menjadi sumber makanan dari Wortel.

Tanaman Wortelpun tidak disemprot pestisida karena sangat sedikit atau tidak adanya hama yang menggagu tanaman ini, berbeda sekali dengan dengan tanaman kol dan pitsai yang harus menggunakan pestisida dalam memerangi hamanya. Ketika terlambat sedikit hama akan segera menyerang dan tanaman bisa sampai gagal panen. Apalagi pada musim penghujan, perkembangan hama sangat cepat, kecuali kalau musim panas yang panjang maka ada sedikit hama. Pada akhirnya Wortel menjadi tanaman pengganti sesudah menanam Kol dan Pitsai. Waktu penanaman.

Cara menanam Wortel, Pitsai, dan Kol hanya dibuat teras atau *bedengan* yaitu semacam baris-baris timbunan tanah. Kalau bedengan itu berada pada lahan yang miring, maka pembedengan dimulai dari atas atau lahan yang paling tinggi, lahan tanah berkontur rata tetap juga dimulai pada bagian atas, ini dimaksudkan supaya hasil pembedengan tidak diinjak atau terbongkar. Kol bunga dan Pitsai mesti dibuatkan lubang untuk pengisian bibit dan pupuk. Untuk Wortel sesudah dibuat bedengan maka bedengan tersebut akan digaris-garis dengan sebilah kayu secara teratur dan berjejer diatas bedengan tersebut. Pada garis-garis itu, bibit wortel akan ditebar menurut garis tersebut, sehingga tanaman wortel akan teratur dan rapih dan masing-masing bibit memiliki jarak tanam. Tanaman Wortel dalam pertumbuhannya sebentar akan menyerap sisa-sisa dari daun-daun yang busuk dari pengolahan tanaman sebelumnya. Pada waktu 3 minggu tanaman dibersihkan, setelah satu setengah bulan tanaman dijarangkan, bibit tersebut akan

tumbuh sampai 40 buah, 1 garis akan tertinggal paling tinggi 10 buah.

Pada tahun 1973 masyarakat kebanyakan menanam Jagung, dulunya belum menggunakan pupuk kimia masih berharap kepada kandungan pupuk organik yang disediakan oleh tanah secara alamiah, dan pemanfaatan pupuk organik dari ternak yang dipelihara penduduk dan serta -sisa tanaman sebelumnya. Tahun tersebut pupuk kimia mulai digalakan. Adanya peningkatan hasil-hasil pertanian akibat penggunaan pupuk kimia ini membuat masyarakat petani setempat menjadi percaya, dan sampai petani menjadi tergantung pada pupuk kimia.

Namun seiring dengan hal itu usaha pertanian organik digalakan juga dari pemerintah, kelompok-kelompok tani, PKK. Masyarakat menilai akibat penggunaan pupuk kimia yang telah menurunkan kualitas tanah, kesuburan tanah sudah tidak seperti dulu lagi. Penggalakan pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya telah lambat laun mengembalikan kebiasaan petani kepada pemanfaatan sumber daya alam yang akan bermanfaat bagi kualitas lingkungan.

Yang terjadi sekarang kebiasaan menanam tanaman Kol, Pitsai dll pada petani Desa Rurukan pertama-tama memakai pupuk kandang lalu dicampur dengan pupuk TSP. Bagi tanaman Wortel, pupuk kandang tersebut diambur di tiap bedengan. Pada tanaman Pitsai, disetiap bedengan dibuat lubang-lubang dan masing-masing lubang diisi 1 butir bibit pitsai dan diberi pupuk kandang. Pupuk organik dalam bentuk pupuk kandang ini diambil dari kotoran kandang ayam. Kebiasaan menggunakan pupuk organik telah berlangsung sekitar 10 tahun. Menurut petani Desa Rurukan banyak juga peternakan babi, tapi pupuk organiknya bisa dipakai kalau kotorannya sudah lama, sampai baik menjadi pupuk organik. Dahulu juga pernah memakai pupuk organik dari kotoran WC sewaktu dimulai pertama sebelum tahun 1973, sudah dipakai

pupuk organik tersebut, tapi beriringan waktu masyarakat petani beralih pada pada pupuk kimia

Disetiap lubang diberi 1 genggam pupuk kandang kemudian ditaruh sedikit pupuk TSP, dan juga diberi pupuk Ponska yang bermerek. Pertama dengan hitam atau sedikit merah dan digunakan pula pupuk kandang. Dalam pertumbuhan tanaman selanjutnya digunakan pupuk Urea untuk memancing pertumbuhannya lebih cepat, daunnya akan tumbuh banyak. Pupuk Urea ini sebagai pelapis, digunakan pada saat 2-3 minggu masa tanam maka sudah harus dilapisi atau diberi Urea (pupuk putih) sampai panen kurang urea.

Proses perkembangan tanaman Kol, Pitsai dan Wortel, pada awalnya dengan 2-3 biji, selanjutnya kalau tumbuh beberapa biji yang lain harus dibuang, dipilih bibit yang sangat bagus dari lainnya, tinggalah 1 lubang 1 buah yang terpilih. Kalau tanaman Kol buah atau bibit tersebut masih boleh dipindahkan, sementara Pitsai tidak bisa. Pola tanam antara Kol, Pitsai, dan Wortel yakni; 2 kali menanam Pitsai atau Kol, baru ditanam Wortel. Waktu penanaman semuanya dilakuakn setiap saat, abis panen tanam lagi

Kalau di Rurukan sebagian telah memperhatikan kearifan tradisional dalam pengendalian hama, maka di Desa Tara-tara telah berupaya kuat belajar kembali praktek pengendalian hama secara tradisional yang ramah lingkungan. Dini ada sekolah sekolah lapang dimana kelompok tani belajar mengenal musuh-musuh alami, yaitu hewan atau tumbuhan yang akan memakan atau mengusir hama dari tanaman pertanian. Mengikuti prinsip ekosistem alam yang saling makan-memakan dalam satu rantai makanan serta tumbuhan yang dijauhi atai bisa membunuh hama. Petani belajar secara bersama untuk mengenal musuh alami tersebut. Petani menggali pengetahuan lokal mereka terhadap pengetahuan musuh alami dimana pengetahuan tersebut diwariskan secara turun temurun pada masyarakat. Seperti adanya tumbuhan

balakama merah (wowowi) menjadi musuh pembasmi hama yang efektif. *Wowowi* ini ditumbuk, dicampur air lalu diperas. Meskipun sekarang orang suka yang cepat maka diambil pestisida kimia seperti turex dari toko-toko dipusat kota.

Kelompok tani Imanuel desa Tara-tara yang memiliki sekolah lapang pengendalian hama terpadu, sudah berjalan selama 7 tahun, dianggap telah berhasil melakukan proses belajar bersama untuk mengendalikan hama terpadu, menggunakan musuh alami dan pembiasaan pupuk organik dan kearifan lokal lainnya yang ramah lingkungan. Mereka melakukan pertemuan setiap minggu pada Sabtu pagi, pertemuan diisi dengan belajar bersama dan berdiskusi mengenai pertanian yang arif atau ramah terhadap lingkungan. Disamping itu dilakukan juga percobaan demi percobaan demi menemukan atau mencoba kembali pengetahuan rakyat soal pertanian ramah lingkungan tersebut. Pada setiap harinya pekerjaan pengolahan tanaman pertanian, sistem mapalaus digunakan oleh kelompok tani ini, sebagaimana dilakukan juga oleh semua kelompok tani di desa tara-tara yang berjumlah puluhan di desa ini.

Beberapa praktek pengendalian hama tradisional yang masih dipahami masyarakat seperti cerita para kelompok tani setempat "kalau batranam kong makan ikan mantah, nimooleh batanam, mo banyak ulat" kata Golung. Ternyata kalau dilihat lebih jauh ada benarnya. Kemudian dalam menanam ada yang *masani/manyanyi* dan lain diam, kalau dilihat lebih jauh sebenarnya *masani* atau *bernyanyi* sambil menanam bias mengusir hama. Tanam padi atau jagung mereka suka pagi-pagi sekali, maksudnya supaya hama tidak ada juga hama tikus. Menanam yang baik kalau bulan tidak kelihatan atau bulan baru. Bulan baru berarti bulan baru keluar, kalau jam 7 keluar, berarti paginya tidak ada bulan. Kalau ada bulan sementara tanam berarti tidak *horas* (hari yang tepat), bilamana bulan sementara ada maka hama perusak tanaman

mulai bergerak atau mulai bertelur, sehingga begitu tanam tanaman bertepatan dengan pecah telurnya dan menjadi ulat, dan akan makan tanamannya. Sehingga ada pengalaman-pengalaman seperti potong pohon *bulu* (bambu) Jawa dimana dipotong tidak *horas* (waktunya) maka akan dimakan rayap. Karena pada waktu itu semantara bertepatan dengan *horas* (waktu) makan, ulat itu pecah menyebar ke *bulu* (bambu) yang ditanam.

Pengendalian hama juga dilakukan dengan pengaturan jarak tanam dimana 1 tahun hanya 2 kali penen, dan hanya pupuk alami seperti jerami sisa panen yang dijadikan pupuk. Ditempat lain ketika panen tidak mengikuti aturan jarak tanam dimana panen sekarang kemudian bulan depan langsung diolah lagi, maka hama belum sempat pergi, tetapi masih dalam proses berkembang biak. Kebiasaan tradisional setengah tahun baru diolah, hama sudah masuk ke rumput-rumput yang lain, kemudian sisa-sisa tanaman akan menjadi pupuk alamiah sampai tanah menjadi subur kembali. Namun kebiasaan tradisional meski jarak tanam 6 bulan tetapi menurut petani padinya jarang gosong ditengahnya. padat isinya, rasanya enak, simpan sampe berbulan-bulan, tetapi ketika waktu tanam setahun 3 kali tanam dan menggunakan pupuk kimia serta pestisida, ujung sudah masak tapi lain tidak masak.

Kelompok tani mempelajari kembali musuh alami dan mendapatkan beberapa penemuan pestisida nabati seperti *tali pahit* (*akar tuba*) gunanya untuk membasmi *ulat graya*, ulat ini menggigit buah sampai jatuh. Tanaman pembasmi hama lainnya digunakan biji *sajur pungi*. Pemberantasan juga dengan rumput 3 macam yang dihancurkan baru dicampur, rumput-rumput tersebut adalah rumput macan, siri. Setelah rumput itu di tumbuk dan dicampur 1 ember air, lalu disebar, itu hama *bia* dapat dibasmi. Rumput macan ini kalau orang kena luka diberi rumput ini.

Saat sekarang mereka mengembangkan teknologi "pestisida" musuh alami yakni musuh alami parasit yang amat murah

pembiayaannya, dengan beberapa waktu untuk menumbuhkan parasit tersebut. "Walau memakan waktu dan membutuhkan ketabahan, kami menggunakan parasit sebagai pengganti pestisida ini dikarenakan biaya murah, hasilnya bagus, dan tidak merusak lingkungan, padi juga berkualitas" kata Golung, ketua kelompok tani Imanuel Tara-tara. Dibuatkannya *parasitoid* dari binatang juga untuk hama penggerek batang, parasit ini dilepas dikebun dan dia makan semua telur-telur hama.

Dengan sendirinya penggerek batang ini berkurang dengan beberapa kali panan, kelompok tani Imanuel menganjurkan kepada petani lain sudah tidak menggunakan lagi pestisida dimana hasilnya sangat berbeda jauh dengan menggunakan pestisida karena tidak mengeluarkan banyak biaya. Parasit ini sebagai musuh alami, ditenak sendiri. Telur-telurnya diambil dari hama gudang beras (yang akan jadi kupu-kupu), parasit ini yang memakan hama gudang. Parasit dibawah ke kebun masih dalam bentuk telur, dalam jangka waktu 20 hari akan menetas, masa hidup parasit 3 hari tapi bertelur sampai 100, dia cari makan telur-telur penggerek batang dan ternyata bukan cuma penggerek batang, banyak ulat-ulat lain dimakan.

Di langowan, menurut Maxi Lumingkewas seorang petani Desa Tounalet, salah satu yang membuat Langowan terhindar dari hama tikus dan lainnya yang pada tahun 2007 hama ini menyerang sebagian besar wilayah Minahasa terutama daerah Tondano dan Kakas. Disini Padi ditanam secara serentak, di tondano tidak lagi mengikuti kebiasaan sehingga tidak teratur, tidak serentak mengakibatkan hama sampai burung mengahntam habis, jadi gemuk burung-burungnya karena berpindah dan padi tidak habis dalam waktu yang panjang. Karena serentak disini, meski padi hanya dibiarkan masih tetap bagus, dan tikus ditangkap pake anjing dan lain utk dimakan atau dijual. Belum lama ini ada hama ulat atau *gai* yang makan daun, yang diguntingnya sampai padi

jatuh ke air. Cara tradisionalnya dikasih masuk *bebek* atau Itik dan hewan ini memakan ulat sampai habis. Pake bebek ulat bias habis tetapi memakai racun ulat tersebut tidak mati-mati juga.

f. Mengolah Hutan

Hutan sebagai suatu sumber daya alam yang menyiapkan kayu untuk bahan bangunan, daging binatang buruan seperti monyet, tikus ekor putih, ular babi hutan. Berburu di hutan meupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Minahasa, hasil-hasil buruan dijual ke penduduk setempat tempat tinggal para pemburu dan lainnya akan dijual, yang mana dapat di lihat hasil buruan tersebut pada pasar-pasar tradisional Minahasa. Beberapa pasar tradisional yang tergolong besar dan menjadi pusat penjualan hasil-hasil buruan tadi, yakni pasar Langowan, pasar Tomohon, pasar Tondano, pasar Amurang, dan Pasar Airmadidi.

Dalam kepercayaan tradisional, hutan memiliki roh-rohnya sendiri sebagaimana gunung yang diliputi hutan belantara memiliki rohnya juga sebagai penjaga gunung, seperti opo Rumengan di gunung Mahawu, opo Pinontoan di Gunung Lokon, dan opo Soputan di gunung Soputan. Dalam legenda Minahasa konflik antar roh gunung ini pernah terjadi yakni antara Pinontoan dan Rumengan karena memperebutkan putri Soputan bernama Ambilingan yang menyebabkan terpotongnya badan gunung Mahawu berpindah ke gunung Manado Tua, sehingga Mahawu yang dulunya lebih tinggi dari gunung klabat telah menjadi lebih rendah dari gunung lokon.

Roh hutan sendiri dalam ritual lama orang harus mendengarkan bunyi baik dari burung manguni sebelum berangkat ke hutan untuk memotong kayu, dan untuk membuat persembahan bagi roh hutan bernama *Tingkulendeng*, roh ini hidup di pusat bumi (*tu'ur in tana*). Suatu lubang harus dibuat pada pangkal tiang pertama tempat untuk roh *otokton*. Roh bawah tanah lainnya

adalah *lololiung*, *totokai*, dan ada juga *makawalang* sebagai roh yang hidup dibawah tanah sebagai penyebab gempa bumi secara khusus di Mahawu bagian selatan

Binatang-binatang hutan juga dianggap memiliki roh, sehingga dengan kepercayaan adanya roh hutan, roh gunung makanya ritual diberlakukan juga, misalnya pemburu harus meletakkan hasil buruan pertamanya diatas batu untyuk mempersembahkan kepada roh hutan tersebut. Setelah itu perburuannya diyakni akan berhasil. Schefold (2001) sebagaimana diceritakan lagi oleh Renwarin (2007) memeberi penjelasan tetentang ritual berburu; pada awal berburu ritual persembahan diberikan kepada para roh hutan agar supaya diberikan ijin untuk tinggal dalam kawasan mereka.

Peneliti pernah berada dalam hutan gunung Klabat berbincang dengan seorang pemburu yang sendirian berburu pada malam hari tersebut. Ia mengakui adanya roh-roh hutan dan gunung itu, tetapi supaya tidak terjadi sesuatu maka ia wajib untuk memiliki niat berburu, menghormati alam sekitar, tidak berteriak-teriak yang akan mengganggu alam dan roh itu. Penuturannya ini menjelaskan bahwa hutan dengan para roh didalamnya saling menjaga keseimbangan alam sehigga manusia tidak bisa sembarangan memanfaatkan hutan. Mengganggu roh-roh hutan bias menyebabkan si pengganggu mendapatkan kecelakaan atau akan hilang di belantara hutan.

Karena itu hutan bagi masyarakat Minahasa di ketahui batasan-batasannya dan pemanfaatan hutan harus secara baik dan selalu dilakukan ritual. Pemahaman tradisional Minahasa akan sangat menjaga kelestarian alam, penataan ruang untuk hutan, pemukiman, lahan pertanian, tanah kalakeran, tanah pasini dan lainnya ditentukan dalam ritual adat sehingga semua serba teratur. Apalagi pada saat pemerintahan Belanda, sudah diberlakukan register atau pendaftaran tanah dengan batas-batasnya, sampai pemerintah Indonesia sekarang ini diberlakukan kepemilikan

dalam bentuk sertifikat tanah. Aturan kepemilikan tanah tidak bertentangan tetapi sama dengan aturan main secara tradisional orang Minahasa

Disamping hasil buruan, terdapat juga dua tanaman penting yang tumbuh di pinggir hutan yaitu bambu dan aren, keduanya dianggap sebagai milik bersama (*kalakeran*), walaupun bisa tumbuh pada lahan seseorang. Terdapat beberapa jenis bambu yang dipakai untuk pelbagai kebutuhan seperti bahan bangunan rumah, perabot, alat untuk menimba air, tabung sadapan air nira, memasak di kebun, cangkir dsb. Bambu juga sebagai salah satu jenis tanaman yang dipakai untuk menandai perbatasan suatu desa yang baru.

Tumbuhan penting lainnya ialah pohon aren (*seho*). Air niranya (*saguer*) disadap untuk dijadikan minuman keseharian atau untuk minuman pesta. *Saguer* atau *tuak* (nama yang digunakan oleh etnis lain) merupakan alkohol berkadar ringan tapi digemari oleh masyarakat untuk menghangatkan badan atau membawa semangat untuk bekerja. Pengembangan dari *saguer* adalah menyulingnya secara tradisional menjadi minuman berkadar alkohol tinggi yang dinamakan *captikus*. Penggunaan *captikus*, juga untuk menghangatkan badan, menambah tenaga untuk bekerja, dan dalam pesta. Tapi minuman ini kalau berlebihan akan memabukan, dan potensi kriminal seperti perkelahian dan kekerasan dapat saja terjadi. *Saguer* dan *captikus* dianggap sebagai minuman para dewa, dalam pelbagai ritual tradisional Minahasa, jenis minuman ini sering digunakan sebagai pelengkap dari sesajen

Aktivitas dalam hutan, terdapat juga pencaharian madu hutan, pemburu akan mencari-cari lokasi sarang lebah, setelah didapat biasanya mereka akan mengasapi sarang tersebut hingga kerumunan lebah akan menyingkir tanpa menggigit pemburu. Setelah tinggal sarangnya maka diambilah sarang tersebut untuk diperas menjadi madu.

BAGIAN 7

NILAI BUDAYA BEKERJA DALAM KEHIDUPAN ORANG MANADO

PENDAHULUAN

Definisi tentang kebudayaan sangat beragam, oleh karena itu untuk memahami perilaku atau kebiasaan manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat. Secara garis besar kebudayaan dapat di definisikan sebagai hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang dilakukan secara sadar dalam rangka kehidupan bermasyarakat.

Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan cara belajar (1990:180). Secara spesifik James Spradley mengatakan bahwasanya kebudayaan merupakan sistem pengetahuan yang diperoleh manusia melalui proses belajar, yang mereka gunakan untuk menginterpretasikan lingkungan sekeliling dan sekaligus menyusun strategi perilaku dalam menghadapi lingkungan

E. B. Tylor menjelaskan, kebudayaan adalah suatu kesatuan kompleks yang terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, hukum, moralitas dan adat istiadat. Clifford Geertz, kebudayaan adalah suatu sistem yang tertata dari simbol-simbol dan makna, dimana dari tatanan tersebut terdapat kerangka dari berbagai kepercayaan, lambang-lambang ekspresif yang memungkinkan manusia menafsirkan pengalamannya serta menuntun perilakunya.

Sangat beragamnya definisi kebudayaan dari berbagai ahli, sehingga dua orang ahli antropologi bernama A. L. Kroeber dan C. Kluckhohn pernah mengumpulkan definisi kebudayaan hingga berjumlah 160 yang kemudian mereka analisis, diklasifikasi ke dalam beberapa tipe definisi yang ditulis dalam buku berjudul *A Critical Review of Concepts and Definitions*.

Namun yang perlu dicermati disini, dalam perbedaan definisi, kebudayaan dapat dikategorikan berdasarkan wujud sebagai berikut:

- Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan dan sebagainya.
- Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Kebudayaan sebagai suatu sistem pengetahuan yang diperoleh manusia melalui proses belajar, yang mereka gunakan untuk menginterpretasikan dunia sekeliling mereka dan sekaligus untuk menyusun strategi perilaku dalam menghadapi dunia sekeliling mereka. Proses belajar ini menghasilkan kebudayaan dan juga perubahan kebudayaannya. Bagi Parsudi Suparlan, perubahan kebudayaan adalah proses belajar atau adaptasi manusia pada lingkungannya, sehingga perubahan diluar dirinya akan mempengaruhi perubahan kebudayaan masyarakat tersebut.

Nilai Budaya adalah suatu falsafah dengan tentang pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam pola pikir, pola sikap dan pola perilaku masyarakat sebagai satu kesatuan. cita-cita, pendapat, pandangan serta tindakan yang terwujud sebagai kerja. Budaya kerja memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga perilaku Sumber Daya Manusia yang ada agar dapat meningkatkan produktivitas kerja

untuk menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang. Keberhasilan pelaksanaan program budaya kerja antara lain dapat dilihat dari peningkatan tanggung jawab, peningkatan kedisiplinan dan kepatuhan pada norma/aturan, terjalannya komunikasi dan hubungan yang harmonis dengan semua tingkatan, peningkatan partisipasi dan kepedulian, peningkatan kesempatan untuk pemecahan masalah serta berkurangnya tingkat kemangkiran dan keluhan.

Definisi tentang bekerja bagi orang Manado adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang yang sudah tamat sekolah (sudah menyelesaikan pendidikan) dan melakukan pekerjaan di kantor secara emic orang Manado menyebutkan *da kerja kantor*.

Nilai budaya tentang bekerja bagi orang Manado adalah orang yang secara rutin keluar rumah pagi dengan pakaian yang rapih atau menggunakan seragam, keluar rumah menuju kantor dan pulang rumah juga dalam keadaan rapih sebagai tanda orang kantoran (bekerja di kantor). Adapun pekerjaan yang diminati untuk digeluti yakni pekerjaan formal yang sifatnya profesional antara lain PNS, pegawai BUMN, pegawai swasta (perbankan, dll). Pekerjaan yang sangat kurang diminati adalah pekerjaan dalam sektor informal antara lain: Pelayan restoran/rumah makan, Pelayan Bandara, pedagang kaki lima, pelayan tokoh, buruh bangunan, pedagang keliling dan jenis pekerjaan lain yang sifatnya tidak profesional.

Menurut pengamatan penulis, kurangnya minat angkatan kerja orang Manado untuk bekerja di sektor kerja informal maka bidang-bidang pekerjaan tersebut mayoritas digeluti oleh angkatan kerja yang nota bene bukan orang-orang manado, yakni orang yang berasal dari Makasar, Gorontalo, Jawa, Ternate dll.

Budaya pilih-pilih kerja karena gengsi telah menyebabkan ruang publik dalam bekerja telah diambil alih oleh pekerja2 luar Manado, Angkatan kerja yang tidak memiliki keahlian atau kurang

kompeten untuk kerja kantoran kalah bersaing dan menjadi angkatan kerja yang tidak bekerja "*nyandak da hambuk*".

Pengangguran di Sulut gawat. Ini memicu kriminalitas. Data menunjukkan angka pengangguran mencapai 7% atau sekira 80 ribu. Persentase ini tertinggi se-Sulawesi dan di atas rata-rata nasional 5%.

"Sungguh ironi. Lowongan pekerjaan banyak. Tapi orang Sulut dewasa ini umumnya ingin kerja langsung enak. Malas namanya," kata sejumlah pimpinan perusahaan. Padahal lapangan pekerjaan di Sulut terbilang banyak. Bahkan mulai tahun ini akan berlimpah seiring masuknya investasi dan dibukanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Diprediksi, jumlah tenaga kerja yang bisa diserap di atas 50 ribu tenaga kerja (*naker*).

Sekadar referensi, khusus KEK saja diprediksi bisa menyerap 37 ribu *naker*. Namun, dikhawatirkan *naker* Sulut akan kalah bersaing. Buktinya sudah terlihat. Untuk kelas kuli bangunan *naker* Sulut kalah dengan Jawa. Jika tidak diseriusi, warga Sulut bisa jadi penonton di tengah pesatnya industrialisasi.

Berdasar data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, angka pengangguran di Nyiur Melambai mencapai 7,54 persen per Agustus 2014 lalu. Jumlah ini mengalami kenaikan dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya hanya 6,79 persen. Sementara pengangguran nasional persentasenya hanya sebesar 5,90 persen.

Kepala Bidang (Kabid) Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut Dadang Hardiwan mengatakan, jumlah pengangguran Sulut 2014 lalu mencapai 80 ribu orang. Naik 9. 700 orang dari 2013 lalu. "Tingkat pengangguran terbuka Sulut selama tiga tahun terakhir ini fluktuatif, yaitu 7,91 persen pada Agustus 2012, kemudian turun menjadi 6,79 persen pada Agustus 2013 dan naik 7,54 persen pada Agustus 2014," ujar Dadang.

Kata dia, dilihat perbandingan kota dan desa, tingkat pengangguran di Sulut lebih tinggi terjadi di wilayah perkotaan.

Tercatat sebanyak 10,11 persen angkatan kerja di perkotaan berstatus sebagai penganggur terbuka (pencari kerja) yang setara dengan 49,1 ribu orang. Sedangkan di pedesaan tingkat pengangguran hanya 5,37 persen atau 30,9 ribu orang. "Dibandingkan Agustus 2013 maka jumlah pengangguran di daerah pedesaan dan perkotaan di Sulut mengalami peningkatan," ungkap Dadang.

Menariknya, lulusan sarjana (S1) dan diploma (D2 dan D3) di Sulut banyak nganggur. Tercatat, jumlah sarjana sampai dengan Agustus 2014 di Sulut sekira 85.460 dan Diploma 23.290 sedangkan angka pengangguran sarjana 11.350 dan Diploma 6.290 jiwa.

Sementara itu, ekonom Sulut Dr Magdalena Wulur menuturkan, sekarang di Sulut memiliki bursa tenaga kerja yang tidak kompeten. "Tenaga kerja di Sulut, memang tidak semuanya, namun sebagian besar kurang berdaya saing," katanya. "Kemudian, orang Sulut cenderung pilih-pilih pekerjaan. Mau gaji tinggi, tapi kerjaan yang ringan," ungkapnya.

Secara ekonomi bisa dilihat, saat ini tenaga kerja lokal tidak ada sertifikasi. Padahal pasar meminta orang yang bisa digaji dengan keahlian yang tinggi. "Saat ini kita harusnya berkaca, jika kita mau jadi tuan di rumah sendiri berarti kita harus punya skill. Kalau tidak punya. Bisa-bisa orang luar yang akan menguasai pekerjaan di daerah kita," papar dosen FEB Unsrat ini.

Berlakunya MEA, lanjut Wulur, mungkin adalah sebuah tanda awas bagi warga lokal Sulut. Pasalnya, SDM yang dimiliki Sulut masih banyak yang belum mampu bersaing. "Contohnya saja para pedagang. Tidak bisa dipungkiri mereka tidak siap untuk MEA. Kita belum bisa bersaing dengan luar negeri, terutama dari segi SDM. Untuk bahasa saja kita masih belum mampu menyesuaikan," ungkapnya.

Senada, pengamat ekonomi Sulut Dr Vicky Masinambow menjelaskan, untuk memasuki MEA keadaan ini akan menjadi

biasa, sebab itu harus bersiap. "Untuk naker dengan tingkat pendidikan sarjana mungkin kita cukup banyak, bahkan surplus. Namun jika dikaitkan dengan keahlian spesifik industri yang bakalan berkembang, tentunya masih perlu berbenah. Pemerintah dengan program pelatihan perlu segera bersinergi dengan perguruan tinggi dan pendidikan lainnya," ungkapnya.

"Jangan sampai warga lokal jadi tamu di daerah sendiri. Dan untuk peluang pekerjaan dibabat semua oleh tenaga kerja asing. Ini harus jadi PR pemerintah agar bisa terus mendayagunakan SDM lokal," pungkasnya. (***)

Menurut data yang diambil dari kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Manado jumlah angkatan kerja yang terlibat secara aktif dalam kegiatan perekonomian hanya 64%. Berdasarkan data tersebut di atas maka terlihat bahwasanya perekonomian di kota Manado dilihat dari aspek ketenagakerjaan belum stabil, karena tenaga kerja yang tidak terserap relative melebihi standard Nasional.

Penduduk yang tinggal di kota Manado terdiri atas penduduk yang berasal dari Propinsi Sulawesi Utara yakni Minahasa, Sangihe Talaud, Bolaang Mongondow dan dari luar provinsi Sulawesi Utara antara lain Jawa, Sumatera, Ambon, Gorontalo, Ternate, Kalimantan Papua dan kota-kota lainnya di Indonesia dan Manca Negara. Kedatangan penduduk dari berbagai latar belakang suku bangsa di Indonesia di kota Manado didorong oleh motivasi ekonomi yakni mencari pekerjaan dan penghidupan yang lebih layak, hal ini disebabkan karena kota Manado sebagai ibu kota bisa membuka lapangan pekerjaan dan menjadi impian untuk para pencari kerja, sedangkan mereka yang berasal dari kota Manado dan sekitarnya dengan latar belakang etnis Minahasa akan memutuskan untuk tidak bekerja dan tinggal di rumah saja jika tidak terserap dalam lapangan kerja disektor formal.

Beberapa hasil survey antara lain diuraikan sebagai berikut, seperti yang dikatakan Jeffrey Y Mentu, SH, MSc:

sangat-sangat gundah hatinya ketika menyusuri jalan raya Boulevard di pantai Manado Sulawesi Utara, di sana dia tidak menemukan pedagang kaki lima yang asli orang Manado, tapi betapa sedih hatinya ketika memasuki bar dan club malam mulai dari Tanjung Priok di Jakarta Utara hingga Wamena di Papua ia menemukan tak sedikit nona Manado di sana. Mereka menjadi pramuria dan bahkan Pekerja Seks Komersial. Sebagai Panglima Milisi Waraney Minahasa Sulawesi Utara, hati nurani Jeffrey tentu saja merana. Betapa tidak ia merasa ada yang salah dalam sistem pendidikan bahkan budaya Manado sehingga menyebabkan terjadi hal seperti itu. Jeffrey menyebutkan ada lima budaya Manado dalam catatannya yang menghambat kemajuan orang dan bahkan daerah Manado "Lihat aja tidak ada lagi pejabat dari tingkat menteri hingga Kapolda Sulut yang orang Manado sekarang ini. Ada apa ini? Mengapa pamor orang Manado memudar?" tanyanya penuhsesal.

Beberapan Nilai Budaya Orang Manado Dalam Bekerja

1. Lebe Bae Kala Nasi Asal Jang Kala Aksi

Falsafah ini, arti harfiahnya kira-kira: *Lebih baik kalah nasi asal jangan kalah aksi. Atau, lebih baik tidak makan asal tetap gaya.*

Ya. Bagi sebagian (besar?) orang Manado, penampilan itu penting. Gaya itu nomor satu. Makanya, banyak orang yang menganggapnya sebagai hal paling utama, yang bahkan lebih penting dari makanan di rumah. Orang Manado banyak yang memilih tidak makan sepanjang tetap tampil gaya. Jika ada uang 20 ribu dan pilihannya beras atau pulsa, maka pilihannya adalah pulsa!!

Di sejumlah mall di Manado anda akan menemukan banyak opa-opa berusia 60-an tahun yang tampil gaya: sepatu fantovel, kemeja rapi, rambut disemir dan wangi. Oma-oma juga tak mau kalah. Rambut dicat warna-warni dengan busana termutakhir.

Di Kota Tondano yang menjadi ibukota Kabupaten Minahasa, banyak preman yang berpenampilan modis. Sepatu kets merek N*ke atau Adid*as, celana jeans merek L*vis, kemeja hingga kacamata hitam Rayb*an. Dan jangan berpikir kalau yang mereka pakai itu aspal. Tidak. Mereknya asli. Banyak orang Manado yang alergi dan 'gatal-gatal' jika memakai busana merek aspal, hehehe.

Karena mementingkan gaya, banyak orang Manado yang gengsian selalu mementingkan penampilan. Kini, di Minahasa, banyak sawah yang terlantar. Sejumlah petani mulai merasa bekerja di sawah tidak gaya. Mereka kini memilih profesi yang dianggap lebih keren: tukang ojek. Tentu tidak semua orang Manado itu lebih mementingkan gaya. Banyak juga yang suka berpenampilan seadanya. Namun jumlah mereka tidak sebanyak yang suka bergaya. Yang lebih memilih gak makan asal tetap tampil gaya.

2. Baku Cungkel

Cungkel, adalah istilah untuk menyebut kegiatan 'memetik buah' menggunakan galah, seperti yang dilakukan pada pepaya (istilah bahasa Indonesianya apa ya? Menjolok?). Mencungkel adalah upaya yang dilakukan supaya buah yang di atas bisa jatuh.

Baku cungkel adalah upaya yang dilakukan orang Manado ketika melihat sesamanya sudah sukses. Ketika sesamanya sudah berada di atas. Baku cungkel adalah upaya menjatuhkan pihak lain yang berada di atas. Baku cungkel adalah upaya supaya yang berada di atas bisa jatuh.

Kini, falsafah Baku Cungkel mulai terkikis. Namun bukan berarti sudah lenyap. Masih banyak orang Manado yang 'tidak rela' melihat sesamanya berhasil. Berbagai upaya lalu dilakukan supaya sesamanya itu jatuh. Dengan men'cungkel'nya.

Ungkapan ini biasa diucapkan pihak yang berseteru atau ketika terjadi perkelahian antar kampung. *Baku abis jo* arti harfiahnya

kira-kira: mari saling menghabisi. Atau dengan kalimat lain: Jika kami habis, kalian juga habis. Atau, kami mungkin akan habis. Namun kalian juga pasti habis.

Orang Manado dikenal sebagai sahabat yang sangat menyenangkan. Ramah, terbuka, murah senyum dan suka bergurau. Namun eiiittss, jangan sekali-kali menyakiti orang Manado. Jika disakiti, orang Manado akan melawan. Bukan sekedar melawan. Namun akan berjuang hingga habis. *Abis kalu abis.*

Kini, falsafah *Baku abis jo* diarahkan ke hal yang positif. Misalnya pertandingan olah raga. Jika ada pertandingan bola voli, atau basket, ungkapan 'baku abis jo' biasa diucap para penonton. Untuk memberi semangat kepada pihak yang bertanding. Supaya mereka berjuang hingga penghabisan.

I Yayat U Santi merupakan semboyan resmi Kabupaten Minahasa yang tersemat dalam lambang daerah Minahasa, sama seperti Bhinneka Tunggal Ika pada lambang Garuda. Arti harfiahnya adalah: Angkatlah Pedangmu.

I yayat u santi adalah ungkapan yang biasa diucapkan Teterusan (panglima perang kuno) ketika hendak bertempur. Biasanya ungkapan ini disambut para waraney (prajurit Minahasa kuno) dengan *kumukuk*, pekikan uhuuuuu.

Kini, ungkapan itu masih sering diucapkan di Minahasa, terutama karena masih banyak musuh yang harus dihadapi. Yakni kebodohan, kemalasan dan kesombongan.

3. Baku Beking Pande

Falsafah ini awalnya hanya populer di kalangan akademisi. Belakangan, ungkapan ini juga populer di masyarakat. Ari harfiahnya adalah: saling membuat pandai. Yakni upaya membagi ilmu agar pihak lain menjadi lebih pandai.

Metode *baku beking pande* adalah, jika si A pandai memasak dan si B pintar menulis, maka si A mengajarkan kepandaian

memasak kepada si B, dan sebaliknya si B mengajarkan teknik menulis kepada si A. Hasil akhirnya adalah si A jadi pintar masak dan menulis, dan si B jadi pintar menulis dan memasak. Kedua belah pihak menjadi lebih pandai.

4. Si Tou Timou Tumou Tou

Falsafah ini dipopulerkan Dr Sam Ratulangi, pahlawan nasional sekaligus Gubernur Sulawesi yang pertama. Arti harfiahnya adalah: Manusia menjadi manusia untuk memanusiaikan manusia lain. Atau bisa juga: Manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Falsafah ini mengajarkan pentingnya memanusiaikan orang lain. Bahwa hidup itu bukan hanya untuk diri sendiri namun juga untuk sesama. Di Manado, falsafah ini kadang-kadang diplesetkan dengan: Si Tou Timou Tumongko Tou. Manusia menjadi Manusia untuk memangsa manusia lain.

5. Torang Samua Basudara

Falsafah ini dipopulerkan EE Mangindaan ketika menjabat Gubernur Sulawesi Utara (kini Mangindaan menjadi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu). Arti harfiahnya adalah: Kita Semua Bersaudara. Falsafah ini menekankan bahwa semua warga Manado (atau Sulut) adalah saudara. Tak peduli apa etnisnya, apa latar belakang ekonomi, apa agama, semua pada hakekatnya adalah saudara.

Falsafah inilah yang antara lain menjadi benteng sehingga Manado kini menjadi salah satu wilayah dengan tingkat konflik horisontal yang sangat rendah. Falsafah ini yang membuat berbagai upaya provokasi seperti pelemparan gereja, pemboman kantor Sinode GMIM atau pelemparan mesjid tidak melebar.

Falsafah ini diresapi masyarakat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesama saudara akan saling menjaga. Sesama saudara akan saling mengingatkan. Sesama saudara akan saling melindungi. Sesama saudara tak akan saling menyakiti.

Karena itu, di Manado, bukan pemandangan yang luar biasa jika Anda melihat remaja putri yang mengenakan jilbab tertawa cekikikan dengan rekannya remaja putri yang mengenakan kalung salib. Di Manado, semua yang berbeda keyakinan adalah saudara.

Sekalipun cukup populer, ada saja pihak yang mencoba memplesetkan falsafah ini. Dengan menyebut: Torang Samua Basudara Tiri.

Manado adalah bagian dari Indonesia yang penduduknya unik, dengan falsafah hidup yang juga unik. Hanya di Manado semua pihak dianggap sebagai saudara, yang diupayakan untuk menjadi manusia dengan baku beking pande. Orang Manado siap sedia mengangkat pedang untuk melawan kebodohan, dan tidak akan menyerah jika ditindas. Hanya di Manado, penduduknya lebih memilih kalah nasi asal jangan kalah aksi.

6. Budaya Sei Ko "siapa anda"

Ini merupakan manifestasi dari sikap pandang enteng atau meremehkan orang lain. Orang Manado apabila bertemu orang yang lebih dari dia akan bilang begini, "Siapa so dia?" suatu manifestasi dari perasaan yang tidak mau tersaingi, sombong dan tinggi hati. Padahal Alkitab mengajarkan untuk kita menjadi orang yang rendah hati. Artinya mau belajar dari siapapun bahkan dari orang yang paling muda sekalipun. Budaya yang meremehkan orang lain seperti tersebut diatas, membuat orang manado merasa lebih tau dan tidak mau berada di posisi yang lebih rendah.

7. Budaya Jual Kobong

Kebiasaan orang Manado apabila memerlukan konsekwensi pengeluaran yang relatif besar seperti melaksanakan pesta pernikahan, akan menjual tanah atau kebun dibanding mengusahakan dan menggarapnya dengan menanam tanaman produktif. Perilaku seperti ini terus berulang dari generasi ke generasi. Sikap seperti ini merupakan cermin dari malas, gengsi, dan suka mendapatkan

uang lebih tapi tidak mau mengeluarkan keringat (bekerja keras). Ini membuat tanah orang Manado jatuh ke tangan tuan tanah yang bukan asli orang Manado. Sehingga mereka menjadi petani penggarap saja ditanah sendiri.

8. Budaya Hidup jalan pintas

Orang Manado sebenarnya adalah tipe pekerja keras, maju dalam pendidikan dan selalu ingin tampil serba hebat. dari beberapa cerita historis kultural antara lain dokter wanita pertama di Indonesia adalah wanita Manado. Pramugari pertama yang mencapai jenjang kepangkatan tertinggi di PT. GIA adalah wanita Manado. dan beberapa hasil penelitian lainnya yang mengangkat prestasi orang Manado lainnya. Dibalik itu terdapat cerita yang jauh dari prestasi yakni orang Manado akan menempuh jalan pintas apabila dalam bekerja atau berusaha mereka menemukan jalan buntu. Sehingga tidak heran banyak yang rela menjual diri untuk uang yang banyak, menjadi penipu/rampok (kasus BNI bpk. Adrian dll.).

9. Raai Paar Katilau dan Raai Paar Makiit Kiit Weren

Dalam masyarakat Minahasa dikenal Nilai Budaya *Raai Paar Katilau dan Raai Paar Makiit Kiit Weren*, secara harafiah dapat diterjemahkan dalam hidup ini kita jangan mau ketinggalan jika seseorang berhasil dalam hidupnya maka kita harus bisa mencapai keberhasilan yang sama bahkan harus lebih berhasil dari orang lain. Nilai ini diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak dan senantiasa menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Bagi masyarakat Manado etnis Minahasa Kedua nilai budaya tersebut di atas hidup dan berkembang dengan istilah *jangan iko mata* (Pratiknjo 1995:63).

Nilai budaya ini dianggap sebagai pendorong orang Manado untuk kerja keras, rajin berusaha sehingga berhasil dan menikmati hidup dengan nyaman mengikuti tren mode dalam bidang apa saja. Satu hal yang sangat menjadi keprihatian kita semua

perilaku tersebut kemudian akan menjadi perilaku dengan mental menerabas atau *potong kompas* apabila sudah bekerja keras tapi tidak bisa mencapai keberhasilan dalam hidup antara lain menjadi PSK, Penipu, koruptor dan lain sebagainya yang penting *dapa doi*.

Lain halnya dengan pengalaman yang dibagikan oleh beberapa Pengusaha pengembang dari Kota Manado beliau mengatakan bahwa orang minahasa yang merupakan orang manado asli, dari pengalaman yang dialami, orang manado yang bekerja sebagai buruh bangunan dalam usaha yang digelutinya sebagai Developer di Perum Griya Paniki Indah, bekerja tidak efisien waktu/pekerjaan terlambat, malas, hasil kerja tidak berkualitas dan tidak menghargai pekerjaan dibandingkan para pekerja dari Jawa. Sehingga dari pengalaman itu, beliau tidak lagi menerima pekerja sebagai buruh bangunan yang notabene adalah asli orang manado. Hal senada juga di utarakan oleh Karyawan pada Bank Central Asia di Kota Manado ini juga punya pengalaman yang buruk terhadap hasil kerja orang manado yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan pengasuh anak, menurutnya orang manado bekerja asal jadi, jorok, dan suka menunda-nunda pekerjaan, sehingga ibu satu anak ini mengaku kapok dan lebih senang dengan pekerja diluar orang manado yang lebih telaten, bersih dan efisien waktu dalam menyelesaikan pekerjaan Rumah.

Fenomena yang terjadi di atas, membuka paradigma berpikir penulis bahwa sesungguhnya nilai budaya kerja dikalangan masyarakat manado merupakan ancaman terhadap eksistensi tenaga kerja di Kota Manado, oleh karena itu penulis ingin menggali lebih komprehensif permasalahan yang terjadi.

KAJIAN PUSTAKA

Kebudayaan

A. L. Krober dan C. Kluckhohn (1952) mengatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan pola tingkah laku, baik eksplisit maupun implisit yang diperoleh dan diturunkan melalui simbol, yang akhirnya mampu membentuk sesuatu yang khas dari kelompok-kelompok manusia, termasuk perwujudannya dalam benda-benda materi. Kebudayaan merupakan pedoman bagi kehidupan manusia serta pranata-pranata sosial yang digunakan sehingga kebudayaan tersebut dapat hidup dan berkembang.

Budaya sebagai sistem pemikiran mencakup sistem gagasan, konsep-konsep, aturan-aturan serta pemaknaan yang mendasari dan diwujudkan dalam kehidupan yang dimilikinya melalui proses belajar. Oleh karenanya Clifford Geertz (1963) berpendapat bahwa kebudayaan adalah sistem pemaknaan yang dimiliki bersama dan kebudayaan merupakan hasil dari proses sosial dan bukan proses perseorangan. Senada dengan hal tersebut Koentjaraningrat dan Poerwanto (2000), mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

Adapun ketiga wujud kebudayaan yang telah dijelaskan di atas, dalam kenyataan kehidupan sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Kebudayaan ideal dan adat istiadat mengatur dan memberi arah kepada perbuatan dan karya manusia, salah satu contoh adat adalah aturan sopan santun. Karya tersebut baik pikiran-pikiran dan ide-ide maupun perbuatan dan karya manusia, menghasilkan benda-benda kebudayaan fisiknya. Sebaliknya, kebudayaan fisik tersebut membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang makin lama makin menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya, sehingga mempengaruhi cara berpikinya. Adat dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkat, antara lain, yaitu : (1)

tingkat nilai budaya, (ii) tingkat norma, (iii) tingkat hukum (iv) tingkat aturan khusus.

Norma-norma adalah nilai-nilai budaya yang sudah terkait kepada status dan peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat. Status dan peranan manusia dalam kehidupan sosial sifatnya relatif dan manusia sering berubah peranan dari waktu ke waktu. Suatu saat manusia berperan sebagai guru, waktu yang berbeda dia berperan sebagai ketua Rukun Tetangga (RT), suatu waktu manusia berperan sebagai atasan, namun di hari yang lain dia berperan sebagai bawahan. Setiap peran terikat dengan norma atau aturan main yang mengatur bagaimana seharusnya dia memainkan peranan.

Tingkat adat yang ketiga adalah sistem hukum (hukum adat atau hukum tidak tertulis, maupun hukum tertulis). Biasanya jumlah undang-undang hukum yang mengatur masyarakat sudah jauh lebih banyak dari pada jumlah norma yang berlaku di masyarakat. Tingkat adat yang terakhir adalah aturan-aturan khusus yang mengatur aktivitas-aktivitas yang amat jelas dan terbatas ruang lingkungannya dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah sebabnya aturan-aturan khusus tersebut amat konkret sifatnya dan sebagian besar terkait dengan sistem hukum.

Nilai-nilai sosial berkaitan erat dengan gagasan-gagasan atau pikiran-pikiran atau pengalaman-pengalaman masa lalu yang akhirnya dipakai sebagai panduan dalam kehidupan masyarakat. Ini berarti nilai-nilai terkait erat dengan moral, dan dalam realitanya terkait pula dengan perilaku masyarakat. Karena perilaku masyarakat terkait dengan moral, maka perilaku masyarakat yang baik dan yang buruk, perilaku masyarakat yang boleh dan tidak boleh perilaku masyarakat yang berdosa dan yang tidak berdosa atau yang melanggar dan yang tidak melanggar nilai-nilai atau norma-norma masyarakat. Mengingat nilai-nilai tersebut merupakan juga gagasan-gagasan atau pikiran-pikiran

yang berkembang di masyarakat dan satu sama yang lain saling terkait, dan nilai-nilai tersebut berkembang di masyarakat maka nilai-nilai tersebut disebut juga nilai-nilai sosial.

Sistem Nilai Budaya

Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling abstrak dari adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup di alam pikiran sebagian besar masyarakat yang dianggap bernilai dan dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Sistem perilaku manusia lain yang tingkatnya lebih konkret, seperti aturan-aturan khusus, hukum dan norma-norma semuanya berpedoman pada sistem nilai budaya. Mengingat nilai budaya merupakan hasil karya, karsa dan cipta dari masyarakat, maka nilai sosial juga adalah nilai budaya (Kontjaraningrat, 2000:25).

Sebagai bagian dari adat istiadat dan wujud ideal dari kebudayaan, sistem nilai budaya seolah-olah berada di luar dan di atas diri para individu yang menjadi warga masyarakat. Biasanya para individu yang merupakan warga masyarakat sejak kecil sudah diperkenalkan dan diajarkan tentang nilai-nilai budaya yang ada dan berkembang di masyarakat tersebut. Oleh karena itu mereka sudah sejak lama mengenal konsepsi-konsepsi yang ada dan berakar dalam alam jiwa masyarakat mereka. Itulah sebabnya nilai budaya dijadikan wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya, maka konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia.

Nilai Budaya Bekerja

Konsep budaya tentang bekerja bagi masyarakat Minahasa dalam tulisan ini dibatasi pada individu yang sudah menyelesaikan

kan pendidikan pada tingkat SMA sederajat atau akademi/sekolah tinggi dan universitas (sarjana) harus mencari di pekerjaan di kantor sebagai PNS, Karyawan BUMN/swasta, dan pekerjaan lainnya yang diluar aktivitas pertanian. Konsep Pergi bekerja adalah ke kantor, harus bangun pagi, siap dengan pakaian rapih / menggunakan seragam dan pada jam kerja berada di luar rumah dan pulang kantor pada jam

tertentu secara rutin. Ketika seorang anak dalam keluarga berhasil memperoleh pekerjaan sesuai cita-cita dan harapan atau sesuai dengan nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat. Hal tersebut akan menjadi suatu kebanggaan bagi keluarga karena berkaitan dengan status sosial keluarga dalam masyarakat.

Teori Perubahan sosial

Kata berubah dari asalnya, baik yang bersifat bertambah atau berkurang maupun yang bersifat pergantian, baik karena disengaja maupun tidak disengaja, kata sosial berarti masyarakat, didalamnya mempunyai struktur yaitu pola-pola perilaku dan interaksi. Sehingga perubahan sosial oleh kebanyakan ahli ilmu sosial diartikan atau didefinisikan sebagai perubahan penting dari struktur sosial dan yang dimaksud dengan struktur adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial, dan dalam berbagai ekspresi mengenai struktur seperti norma, nilai dan fenomena kultural (More dalam Lauer 2003:4).

Bila lebih jauh kita melihat definisi perubahan sosial yang terdapat dalam buku-buku ajar sosiologi, terlihat bahwa berbagai pakar meletakkan tekanan pada jenis perubahan yang berbeda. Namun sebagian besar mereka memandang penting perubahan struktural dalam hubungan, organisasi, dan ikatan antar unsur masyarakat. Seperti nampak pada definisi-definisi perubahan sosial yang kami kutip dari buku Sosiologi Perubahan Sosial karangan Piotr Sztompka (2008 : 5) berikut ini :

Menurut Tilaar, (2003:3-19), perubahan sosial dapat dilihat dari dua sarkan sub etnik mengembangkan usaha yang berbeda antar satu dengan yang lain. aspek yakni perubahan struktur sosial dan budaya, dan proses adaptasi individu terhadap perubahan yang dimaksud. Adapun perubahan yang terjadi dalam masyarakat menurut Hilmes dan moore dalam Soelaiman Perubahan yang terjadi pada masyarakat dapat dilihat dari 3 dimensi perubahan yaitu 1) dimensi perubahan structural, 2) dimensi perubahan cultural, 3) dimensi perubahan interaksional (1998:69). Dimensi struktural mengacu pada perubahan dalam bentuk struktur dalam masyarakat, misalnya perubahan peran, munculnya peran baru, perubahan struktur kelas sosial dan lembaga sosial. Dimensi perubahan cultural adalah perubahan masyarakat dan kebudayaan akibat discovery innovation dan invention, kontak dengan kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya difusi dan imitation . Sedangkan dimensi interaksional mengacu pada perubahan hubungan sosial dalam masyarakat, berkaitan dengan perubahan dalam frekuensi, jarak sosial, saluran, aturan-aturan dalam tindakan yang berpola.

Macionis (1987:638) mendefinisikan perubahan sosial sebagai transformasi dalam organisasi masyarakat dalam pola berpikir dan dalam perilaku pada waktu tertentu.

Tentu setiap perubahan itu adalah proses dan setiap proses itu mempunyai jalannya sendiri, mekanik deterministis atau indeterministis. Dan setiap jalan perubahan itu mempunyai faktor-faktor khusus yang mendorong terjadinya perubahan tersebut, baik faktor dari dalam maupun dari luar, baik disengaja (direncanakan) maupun yang terjadi secara alami. Dan setiap perubahan yang terjadi mempunyai bentuk dan pola-pola tersendiri, dapat melalui evolusi, revolusi, difusi dan akulturasi dan lain sebagainya.

Konsep-konsep perubahan di atas, baik dari segi pengertiannya, prosesnya, faktor-faktor yang mendorongnya serta pola atau

bentuk-bentuk perubahan, juga penulis jadikan paradigma dalam memahami perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat multi-kultural di kecamatan Airmadidi.

Teori Perilaku Sosial

Perilaku manusia tidak hanya sekedar warisan dari keluarganya tetapi juga merupakan produk masyarakatnya (Gustav Le Bon dalam Wardi Bachtiar, 2006 : 201). Artinya perilaku individu manusia itu banyak juga dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di sekitar mereka, baik yang melekat pada dirinya maupun yang ada di luar dirinya. Schubungan dengan perilaku sosial ini. Skinner mengemukakan bahwa tingkah laku individu yang berlangsung dalam hubungan dengan faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat, atau perubahan dalam faktor lingkungan menimbulkan perubahan tingkah-laku (Ritzer, 1992 : 82), sehingga dalam teori ini terdapat hubungan fungsional antara tingkah-laku dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan aktor dalam melakukan pekerjaannya. Weber membuat klasifikasi perilaku sosial pada empat tipe, yaitu :

1. Kelakuan yang diarahkan secara rasional kepada tercapainya suatu tujuan.
2. Kelakuan yang berorientasi kepada suatu nilai, seperti keindahan (nilai estetis), kemerdekaan (nilai politik), persaudaraan (nilai keagamaan) dan seterusnya.
3. Kelakuan yang menerima orientasinya dari perasaan atau emosi seseorang dan karena itu disebut "kelakuan kolektif atau emosional"
4. Ada kelakuan yang menerima arahnya dari tradisi, sehingga disebut "kelakuan tradisional" (Veeger, 1990:174)

Tentang perilaku ini Parsons mengemukakan konsep perilaku sukarela yang menyangkut beberapa elemen pokok, yaitu :

- . Aktor individu
- . Aktor memiliki tujuan yang hendak dicapai
- . Aktor memiliki berbagai cara yang mungkin dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut.
- . Aktor dihadapkan pada berbagai kondisi dan situasi yang dapat mempengaruhi pemilihan cara-cara, yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.
- . Aktor dikomando oleh nilai-nilai, norma-norma dan ide-ide dalam menentukan tujuan yang diinginkan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.
- . Perilaku termasuk bagaimana aktor mengambil keputusan tentang cara-cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, dipengaruhi oleh ide-ide dan situasi-situasi yang ada (Zamroni, 1992 : 27).

Di dalam teori perilaku ini terdapat suatu pendekatan behaviorisme, di mana pendekatan ini sudah dikenal sejak lama dalam ilmu sosial, khususnya di bidang Psikologi. Dalam sosiologi pendekatan ini dipelopori B. F. Skinner (1963) menganggap paradigma fakta sosial dan definisi sosial sebagai perspektif yang misterius, mengandung persoalan yang masih teka-teki dan tidak dapat diterangkan secara rasional.

Termasuk paradigma perilaku sosial adalah teori sosiologi perilaku (*behavioral sociology theory*) dan teori pertukaran (*exchange theory*). Teori perilaku sosial menitik beratkan pada hubungan antara tingkah laku aktor dengan tingkah laku aktor dengan tingkah laku lingkungannya. Konsep dasarnya adalah pemberdayaan (*reinforcement*) yang dapat diartikan sebagai hasil atau ganjaran. Suatu ganjaran yang tidak membawa pengaruh kepada aktor pasti tidak akan diulangi. Teori ini tidak dapat dilepaskan dari ide yang pernah dilontarkan pendahulunya, semisal Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill. Berdasarkan ide-ide mereka.

dikembangkanlah asumsi-asumsi yang medasasari teori tingkah laku tersebut :

1. Manusia pada dasarnya tidak mencari keuntungan maksimum, tetapi mereka senantiasa ingin mendapatkan keuntungan dari adanya interaksi yang mereka lakukan dengan manusia, lainnya;
2. Manusia tidak bertindak secara rasional sepenuhnya, tetapi dalam setiap hubungan dengan manusia lain, mereka senantiasa berpikir untung-rugi;
3. Manusia tidak memiliki informasi yang mencakup semua hal sebagai dasar untuk mengembangkan, tetapi mereka paling tidak memiliki informasi walau terbatas yang dapat untuk mengembangkan alternatif, guna memperhitungkan untung rugi tersebut;
4. Manusia senantiasa berada pada serba keterbatasan, tetapi mereka ini tetap berkompetisi untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dalam transaksinya dengan manusia lainnya;
5. Walaupun manusia senantiasa berusaha untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari hasil interaksinya dengan manusia lainnya, mereka dibatasi oleh sumber-sumber yang tersedia;
6. Manusia berusaha memperoleh hasil dalam wujud material, tetapi mereka juga akan melibatkan dan menghasilkan sesuatu yang bersifat non-materi, semisal emosi, perasaan suka dan sentimen (Zamroni, 1992: 66).

Bentuk-bentuk perilaku sosial yang dimiliki teori ini adalah

1. Proposisi tentang keberhasilan
2. Proposisi tentang stimulus
3. Proposisi tentang nilai
4. Proposisi tentang kejenuhan-kerugian, dan

5. **Proposisi tentang persetujuan-perlawanan (Wallace dan Wolf Alison, 1986 : 145-186)**

BAGIAN 8

POLITIK UANG SEBAGAI GAYA HIDUP INSTANT DAN RENDAHNYA ETOS KERJA

PENDAHULUAN

Realita sosial yang kian menjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia adalah terjadinya praktek politik uang dijumpai dalam berbagai ranah kehidupan terlebih dalam perpolitikan di Indonesia. Potret penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pilcaleg), pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Bupati (Pilbud) dan pemilihan Walikota (Pilwakot), sampai pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), nyaring terdengar dalam berbagai diskusi warung kopi (warkop) atau diskusi formal diselenggarakan instansi pemerintah atau LSM, berbagai pemberitaan media masa cetak dan elektronik menyorot secara tajam, terjadinya praktek politik uang (*money politic*). Lebih ironis lagi praktek seperti ini terkadang mengemuka pula di institusi pendidikan dan keagamaan sekalipun, yang melaksanakan sesuatu ivent pemilihan.

Adanya isu praktek politik uang (*money politik*) kondisinya tidak saja berlaku di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, tetapi di negara maju sekaligus hal yang sama mengemuka. Pada masa-masa pemilihan Presiden Clinton misalnya, pernah dipermasalahkan mengenai sumbangan yang diterima oleh Partai Demokrat (pendukung Clinton) dari seorang simpatisan partai

tersebut. Masyarakat mempersoalkan dan mempertanyakan hal tersebut, karena diduga ada *interest* politik dan ekonomi dibelakang pemberian sumbangan tersebut.²¹

Di Indonesia, secara historis adanya isu-isu praktek politik uang, dimasa Orde Baru kicauan tersebut tidak terbantahkan mengemuka di masyarakat. Dengan tiga partai peserta Pemilu yakni Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) tidak terlepas dengan isu adanya praktek tersebut. Golkar sebagai partai penguasa tidak lepas menjadi bahan pergunjungan yang hangat. Betapa tidak, masyarakat melihat bahwa dari tiga partai politik yang ada, masyarakat melihat bahwa yang paling dominan adalah partai Golkar, yang berafiliasi dan dianggap sentra kekuasaan. Ada semacam pemeo di masa pemerintahan Orde Baru yakni; 'kalau mau cepat naik jabatan, mau cepat kerja, mau hidup enak pilihlah Golkar'. Terkadang didalam pemeo itu adanya permainan politik uang²². Pameo seperti di atas mengakar dalam kehidupan masyarakat dan cenderung terpolarisasi dari tahun ke tahun. Itulah sebabnya bagi mereka yang memaknainya dalam tindakan nyata mengalami kemulusan pencapaian keinginan dengan relatif mudah. Sebaliknya jika berbantahan dengan kondisi sosial tersebut maka pergerakan kehidupan terasa sangat sulit menjalankan roda kehidupan.

Catatan sejarah kekuasaan Orde Baru sudah berakhir dan roda pemerintahan sekitaran tahun 2000 beralih ke orde reformasi. Suasana dan harapan baru kuat pada komponen anak bangsa dengan tema umum yang diusung "perubahan" terpatri kuat dalam kehidupan masyarakat yang nota bene mengusung stikma pikir perubahan. Namun realitanya praktek politik uang tidak

21 Kartini Sjahrir. 1999. "Antropologi Melihat Money Politik", dalam *Antropologi Indonesia*. : 46.

22 *Ibid* hal. 45.

kunjung berakhir bahkan lebih marak terjadi dimana-mana. Sungguh ironis kondisi sosial masyarakat atas tumbuh subur ibarat 'jamur di musim penghujan' di bumi pertiwi Indonesia tercinta.

UANG DAN MORALITAS PERTUKARAN

Kehidupan manusia tidak terpisahkan dengan uang sebagai alat tukar. Tidak ada hari manusia tidak bersentuhan dengan uang sebagai alat transaksi. Secara antropologis, ketika masyarakat berkembang, teknologi semakin meningkat, dan sistem barter tidak lagi dianggap mencukupi untuk memuaskan kebutuhan yang ada, maka dibuatlah suatu kesepakatan. Kesepakatan diantara kelompok-kelompok yang melakukan transaksi melahirkan apa yang sekarang kita kenal dengan kosa kata uang. Pada masyarakat suku-suku bangsa yang masih sederhana telah menggunakan uang sebagai alat transaksi. Uang tersebut ada yang berbentuk koin, berbentuk gelang atau kalung, dan adapula dalam bentuk lembaran kain. Uang tersebut hanya beredar dan berlaku di antara kelompok-kelompok terbatas yang bersepakat untuk bertransaksi²³. Contoh sekilas bentuk perdagangan kula pada masyarakat Trobriand di Melanesia Barat. Sebagaimana dikemukakan Kartini Sjahrir, bahwa kelompok-kelompok yang terikat dalam perdagangan kula sepakat bahwa dalam setiap transaksi mereka akan menggunakan 'mata uang' kalung panjang (*soulava*) dan gelang kerang putih (*mwali*). Mata uang *soulava* hanya bisa dipertukarkan dengan X. Sebaliknya mata uang *mwali* berlaku untuk transaksi barang Y. orang-orang Trobriand sangat memahami hal ini dan sadar akan sanksi adat yang akan diterima bila hal tersebut dilanggar. Paul Bohannon 1998 dalam artikelnya berjudul *the impact of money on*

23 Ibid hal. 47.

an African subsistence economic, menunjukkan bahwa penggunaan uang sebagai alat transaksi di benua Afrika telah merupakan suatu fenomena umum jauh sebelum bangsa-bangsa Eropa menduduki benua tersebut. Lebih lanjut Boharnan melukiskan tentang penggunaan uang pada orang-orang Tiv berada di Lembah Benue Nigeria Tengah. Orang Tiv menggunakan *brass rod* (koin terbuat dari metal) untuk bertransaksi. Bagi orang Tiv, *brass rod* boleh dipakai untuk membeli seorang istri, budak, dan ternak. Akan tetapi, *brass rod* tidak berlaku untuk transaksi di luar ketiga hal tersebut.

Masyarakat suku bangsa Asmat Irian Jaya, mulanya alat tukar uang rupiah mulai diperkenalkan dalam kehidupan mereka kecuali uang kertas yang berwarna merah dengan tulisan Rp 100 akan mudah diterima masyarakat. Contoh harga *noken* (tas orang Asmat yang terbuat dari kulit kayu) Rp 500, tidak boleh kurang tidak boleh lebih. *Noken* harus dibayar dengan 5 lembar uang kertas Rp 100. Bila pembeli ingin membayar 20 lembar uang kertas Rp 25 atau 10 lembar uang kertas Rp 50 atau 1 lembar Rp 500, pembayaran tersebut pasti akan ditolak²⁴.

Beberapa contoh yang terjadi pada masyarakat suku-suku bangsa yang masih sederhana seperti gambaran di atas, alat tukar umum telah direduksi sifatnya menjadi *special-purpose money*. Hal ini berbeda dengan yang berlaku pada masyarakat lebih maju yang bersifat *multi-purse money*²⁵. Penggunaan uang dalam fungsinya sebagai *multi-purse money* berkembang sesuai dengan perkembangan pasar. Semakin penting peran pasar dalam kehidupan masyarakat semakin penting pula arti uang. Melalui penggunaan uang seseorang dapat memiliki dan mengontrol asset-aset jarak jauh. Uang memungkinkan seseorang memiliki

24 Ibid hal 48.

25 Lih. Plattener 1989 : 177 dikutip oleh Kartini Sjahrir, hal 48.

pabrik, tanah, dan perusahaan di luar wilayah tempat tinggalnya. Itu sebabnya dalam masyarakat ada semacam pemujaan kepada uang, karena ia dianggap mempunyai kekuatan magis. Tidak mengherankan orang-orang berduit sering mendapat perlakuan khusus dalam masyarakat dimana ia bertempat tinggal. Di Amerika misalnya, para politisi, senator, presiden sangat memperhitungkan keberadaa dan pendapat para pemilik modal (orang-orang berduit), banker, *fund manager*, dan para pemain bursa saham. Ada pemeo di Amerika Serikat yang mengatakan bahwa Robert Rubin (*chairman of federal reserve*) lebih berkuasa dibanding dengan presiden²⁶.

Magis uang dalam kehidupan manusia dapat dijumpai banyak hal. Parry dan Block dalam bukunya *Money and the Morality of Exchange (19890)* sebagaimana dikutip Kartini (hal 49) mengatakan bahwa dalam upaya memahami penggunaan uang adalah penting bagi setiap orang untuk memahami kebudayaan yang mendukung penggunaan uang tersebut. Uang hakekatnya dapat menggalang solidaritas, menggalang persatuan dan kesatuan berbangsa dan bertanah air. Tetapi sebaliknya uang dapat pula memecah solidaritas dan persahabatan. Dengan uang dapat menyebabkan terjadi perkelahian bahkan terjadinya tindakan-tindak anarkis, keberingasan sosial, dan tingkah negatif lainnya. Hakekatnya uang dapat memberikan pesan positif tetapi juga negatif. Masyarakat pendukung mata uang pada umumnya mempunyai kesepakatan bahwa meskipun uang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan apa saja, padahal mengandung suatu nilai moral. Menurut Kartini Sjahri²⁷ nilai moral dapat terlihat pada; 1) penggunaannya harus transparan. Artinya anggota masyarakat pengguna mata uang bisa saja menggunakan uang untuk hal-hal yang mengandung resiko

26 Ibid hal. 48.

27 Ibid hal 48-49.

vested interest yang tinggi seperti kegiatan politik (berkampaye). Namun setiap pemasukan yang diterima harus jelas dari siapa, untuk apa, berapa jumlahnya dan bagaimana *performance* keuangan si pemberi. 2) penggunaan uang tidak boleh ditujukan bagi hal-hal yang oleh masyarakat ditabuhkan, dianggap buruk, atau tidak bermoral. Menggunakan uang, misalnya untuk transaksi ibat bius, pelacuran, menyuap, membunuh, mencari demonstran bayaran, dan sejenisnya dianggap tabu, memalukan, dan tidak patut terjadi. Namun disesalkan kenyataan lapangan indikasinya praktek penggunaan uang yang dilakukan oleh orang-orang tertentu tidak bertanggungjawab (baca insan bermoral rendah) terjadi di mana-mana dalam berbagai lapangan kehidupan masyarakat.

POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*)

Politik uang stigma pikir masyarakat itu berkonotasi negatif, dan itu dapat dimaknai sebagai upaya mobilisasi dana bagi kepentingan pribadi atau kelompok dengan menggunakan kekuasaan yang dipercayakan masyarakat kepadanya²⁸. Politik uang yang tujuannya sudah tentu pada kepentingan politik praktis, dengan menyalagunakan kekuasaan tadi, jelas suatu transparansi mengenai asal usul sumbangan (uang atau bentuk lainnya) dan untuk keperluan apa saja digunakan akan sangat sukar diperoleh. Menurut Kartini, adalah hak dari setiap warga Negara untuk mendapatkan *accountability* dari penggunaan dana-dana politik. Pada saat yang sama adalah kewajiban dari kekuasaan politik atau partai-partai politik memberi pertanggungjawaban kepada public. Dalam politik uang, nilai moral yang terkandung dalam mata uang tersebut telah larut, serta tidak adanya suatu transparansi. Larutnya nilai moral, otomatis si pemegang kekuasaan akan

kehilangan 'kekuasaan magis' (yang dibawah oleh mata uang tersebut). Bila cara ini berlaku terus menerus, tokoh-tokoh yang terlibat dalam politik uang akan mengalami erosi kepercayaan dan pada gilirannya kekuatan politik yang dihimpun dengan cara ini dapat diibaratkan sebuah pohon yang keropos didalamnya.

Jatuhnya rezim Orde Baru merupakan contoh kasus dan masih segar dalam ingatan kita secara pribadi (*individual memory*) ataupun dalam ingatan kolektif (*collective memory*) kita sebagai sesama anak bangsa. Dengan ikon parta Golkar, diakui atau tidak, bisa dibuktikan secara formal atau tidak, adalah partai yang paling sering dituding terlibat dalam lakon-lakon politik uang. Kedekatannya dengan sentra kekuasaan tidak terlalu dipersoalkan bila transparasi dari sumbangan-sumbangan yang diterima. Ada suatu pertanggungjawaban secara public. Terdapat kecenderungan partai politik saat ini, yang dekat dengan kekuasaan mereka cukup mengatakan; 'dana kami peroleh dari para pendukung dan rakyat' sementara itu, pimpinan partai (terutama ketua) *track-record* politik dan kemampuan finansialnya dipertanyakan tidak kapabel, apalagi kemungkinan keberadaannya sebagai pimpinan partai karena factor kekuasaan dimana bapak/ibu pemegang kekuasaan tertinggi (presiden/gubernur/bupati atau walikota dan lainnya). Jika ini yang terjadi maka dugaan kuat praktek politik uang akan menjadi isu hangat dalam percaturan politiknya.

Fakta sejarah Golkar di masa keemasannya mengemukan informasi adalah partai katanya dibangun oleh rakyat selama lebih tiga dekade, memiliki dana yang mumpuni, fasilitas canggih, konstituantenya banyak dan setia, kenyataannya terpuruk hanya dalam hitungan sekejap. Jatuhnya Soeharto terpilih sebagai presiden pada waktu itu karena dipilih pada bulan Maret 1999 oleh mayoritas anggota legislatif RI, kenyataannya beberapa bulan kemudian di tahun yang sama lengser dari prabon tidak lagi sebagai presiden. Ini merupakan contoh catatan sejarah karena

politik uang mendominasi dalam alur perpolitikan di Indonesia. Tragis saat dipilih dieluk-elukkan, tetapi giliran jatuh diberi hadiah cacian dari masyarakat termasuk dengan kroni-kroninya turut serta menjustifikasi presiden Soeharto tidak lagi didukung.

Sejak tahun 2000 kita tengah bergelut di era baru yang dikenal era reformasi. Berbagai harapan adanya perubahan dari keterbetasan mengemukakan pendapat ke kondisi yang serba terbuka, merupakan satu fenomena sosial terwarnai dalam potret kehidupan masyarakat. Dalam angan-angan anak bangsa bahwa era baru ini membawa harapan perubahan tidak saja pada kebebasan mengemukakan pendapat, tetapi sampai pada masalah perut (baca meningkatnya derajat ekonomi), meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dan lebih penting berkurang atau hilang sama sekali praktek-praktek politik. Selain itu penyelenggaraan roda pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) harus bebas dari penyakit sosial Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Semua yang disebut tadi menjadi harapan akan dinikmati di era reformasi.

Bergulirnya waktu, kini era reformasi sudah dalam hitungan 12 tahun berjalan jika hitungannya kita sepakati mulai tahun 2000. Memotret keberadaan masyarakat dilihat dari sisi sosial budaya dan ekonomi, ternyata kondisinya hampir tidak jauh berbeda ketika kita berada di penghujung masa keberkuasaan rezim Orde Baru (ORBA). Praktek-praktek politik uang muda ditemukan di masyarakat. Demikian pula dengan masalah KKN yang tumbuh subur. Diperhadapkan pada kondisi yang tidak kunjung membaik, justeru masyarakat mulai membanding-bandingkan bahwa rezim Orba dinilai oleh sebagian anak bangsa 'masih lebih baik' dibanding dengan kondisi sekarang ini yang nota bene era reformasi.

Politik uang dalam percaturan di Indonesia menurut hemat kami itu bagian dari 'budaya instant' dan tumbuh subur dilakonan

panggung sandiwara politik di Indonesia. Selain itu turut pula berkembang politik kekerabatan, dan semuanya terkategori sebagai 'budaya instant'. Pengertian 'budaya instant' dapat kami artikan sebagai kebiasaan-kebiasaan manusia yang tidak mendasar, tidak memiliki pondasi yang kuat (mudah rapuh), kebiasaan copy paste, kebiasaan meniru/ciplak milik orang lain, kebiasaan copy paste, kebiasaan cepat punya hasil tanpa diimbangi keluarnya keringat, dan lain-lain.

Gaya hidup yang instan implementasi kehidupannya antara lain; tidak memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas dan terukur, tidak memiliki program yang jelas, tidak taat proses formal dan informan, tidak terseleksi secara alamiah dan lain-lain. Dampak dari gaya hidup yang terperangkap pada 'budaya instant' ketika dorongan kebutuhan dan keinginan mendesak, maka segala daya dan upaya yang secara cepat sungguhpun tidak tepat dan bermanfaat, akan diupayakan dengan berbagai cara demi tercapainya yang diinginkan.

Kebutuhan membangun bangsa Indonesia kini dan ke depan, dibutuhkan meningkatnya etos kerja semua elemen masyarakat terlebih para kaum elite sebagai publik figure. Kenapa kaum elite diposisikan sebagai garda terdepan, itu lebih disebabkan karena sikap dan prilaku kaum elite disuriteladankan oleh warga masyarakat dimana para elite-elite tersebut hidup dan berinteraksi. Sangat ironis ketika kaum elite disaat kondisi bangsa sedang sulit, namun mereka hanya menyembunyikan diri apalagi meniupkan api untuk lebih menjurumuskan kondisi sulit tersebut sampai pada nadi terendah.

Bercermin pada tampilan sikap dan prilaku kaum elite di negara maju antara lain; Jepang, Cina, dan Korea misalnya, ketika sebagai pemimpin insitusi/lembaga mengalami kemunduran atau menuju pada kebangkrutan akibat salah pengambilan dan penentuan kebijakan nasional, maka sebagai pertanggungjawaban

moralnya dengan gentle sang pemimpin akan menggunakan media massa (cetak-eletronik) dan juga forum resmi lainnya mereka akan mengakui kesalahan dan kegagalannya. Atas kesalahan yang terjadi ia rela melepaskan jabatan pun dikenakan sanksi organisatoris seberat apapun yang diberikan akan diterima sebagai wujud rasa tanggungjawab. Sebagai politisi atau pun kompetensi lainnya yang disadangnya dengan sadar mereka mengundurkan dan tidak mau menyalahkan orang lain.

Sikap dan perilaku seperti ini sangat jauh berbeda dengan sebagian elite public figure di Indonesia terlebih mereka yang sering terperangkap dalam gaya hidup instant dengan politik uang dan kekuasaan yang di kedepankan. Para elite-public figure sungguhpun mereka telah terpublikasi lewat media massa (cetak dan eletronik) membuat kesalahan bahkan melakukan tindakan korupsi ataupun melakukan tindakan asusila dan tindak menyimpang lainnya, tetapi terkadang ada yang menciptakan opini public seolah-olah tidak bersalah dan lebih ironis lagi mereka cenderung melemparkan kesalahan yang terjadi pada orang lain. Tidak ingin mundur dalam jabatan sungguhpun telah melakukan kesalahan, sering terlakoni sebagai upaya panggung sandiwara murahan dalam menghilangkan jejak kesalahannya. Sikap licik dan picisan sering dimunculkan dalam upaya pembohongan public.

Identik dengan budaya rasa bersalah (*guilt-culture*) juga tidak jauh berbeda tampilan para public figure kaitannya dengan budaya malu (*shame-culture*) dan budaya takut akhir (*fear-and-culture*). Potret kehidupan sosial para elite-publik figure dan juga kita sebagai sesama anak bangsa dalam kapasitas apapun yang disandang, budaya rasa malu cenderung mulai terdegradasi pada titik nadi terenda, dan budaya takut akhir sulit terhindari.

Budaya rasa malu (*shame-culture*) jelas kita jumpai di kalangan elite misalnya mereka sebagai politisi dengan menyandang anggota legislative yang terhormat, tidak sedikit tampilan sikap dan

prilakunya menyimpang seperti; korupsi, pelecehan seksual, melakukan kegiatan ilegal logging, turut serta melancarkan proses terbitnya produk hukum yang implementasinya merugikan masyarakat, dan sikap-sikap tidak terpuji lain sebagainya bertentangan dengan etika dan moral. Dikalangan birokrat, tidak sedikit pejabat public yang terjerat dengan masalah hukum terutama tindak korupsi dan masalah keterlibatan tindak-tindak amoral.

Budaya malu sudah terjadi pergeseran seiring dengan bergulirnya waktu. Kita yang hidup di era globalisasi sekarang ini, sudah begitu banyak produk budaya warisan leluhur yang kian hilang teraplikasi pada sikap dan perilaku mayoritas anak bangsa, baik di kalangan elite ataupun warga masyarakat strata sosial menengah ke bawah. Budaya malu misalnya, di masa lampau ketika seseorang kedapatan melakukan pelanggaran melawan hukum, yang bersangkutan akan menyembunyikan diri/tidak mau berbaur bebas dengan warga masyarakat lainnya. Dengan kesadaran yang tinggi ia akan mengisolirkan diri untuk tidak terlibat pada kegiatan-kegiatan pemerintahan ataupun masyarakat. Demikian juga dalam laku-laku sosial masyarakat, akan merasa malu jika mengambil atau menerima yang bukan hak dirinya.

Kini budaya malu sudah sangat jauh bergeser. Cerminan tampilan para elite public figure, yang sungguhpun kehidupannya sudah tercemar tetapi ketika di masyarakat itu dianggap hal yang lumrah bahkan cenderung membuat trik-trik negatif seperti melakukan tindak-tindak provokatif masyarakat demi bertindak melanggar hukum, menentang kebijakan-kebijakan pemerintah, bertindak anarkis dan tindak-tindak menyimpang lainnya. Kiat-kiat menggagal massa untuk melakukan demonstrasi pun sering terlakoni yang tujuannya demi kepentingan pencitraan diri seolah-olah yang bersangkutan tidak bersalah. Dalam beberapa kasus tindak korupsi seperti yang terpublikasi melalui media masa (cetak-elektronik) nasional dan local, adalah cerminan sebagian

sikap dan perilaku para public figure di Indonesia. Kepada mereka yang menyimpang, adalah bijaksana sekiranya dalam sikap dan perilakunya akan menyadari kesalahan yang dilakukan dan mengedepankan pola hidup rasa malu yang tinggi mutlak hukumnya untuk dilakukan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Budaya takut akhir (*fearand-culture*) juga tidak banyak tersaji dan dilakoni masyarakat terlebih mereka sebagai public figure. Rekaman corak kehidupan mereka yang berada pada piranti kekuasaan, tidak sedikit yang terjebak pada budaya takut akhir. Panggung sandiwara sering ditontonkan oleh mereka yang memegang tampuk kekuasaan terkadang disaat akhir periodik kekuasaannya, memunculkan sikap dan perilaku yang menyimpang diantaranya membangun primamodial yang mengara pada nepotisme, kolusi, ataupun merampok milik institusi yang bukan miliknya pribadi. Sikap-sikap seperti ini merupakan tindakan menyimpang yang tidak pernah dilakoni di awal ybs masuk dalam lingkaran kekuasaan. Munculnya sikap seperti ini dalam pendekatan psikologi itu erat kaitannya dengan perasaan takut karena sudah akan mengakhiri dan tidak lagi dalam bingkai "berkuasa". Dengan tampilan lakon tersebut, *post syndrome* lebih tepat dialamatkan ke public figure tersebut dan sangat disesali jika ybs terjebak pada kondisi yang berkepanjangan.

Beretos kerja yang tinggi merupakan tuntutan alami dan dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Peran-peran masyarakat dalam strata sosial apapun sangat dibutuhkan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga anak bangsa dalam wilayah NKRI. Untuk itu demi cepat majunya kegiatan pembangunan, maka beretos kerja yang tinggi jawabannya terutama oleh para elite public figure, dituntut aplikasinya demi mendorong warga masyarakat terutama strata sosialnya tidak dalam kategori elite. Semoga.